



UNIVERSITAS TERBUKA

# Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika Dan Demokratis

Editor:

M. Husni Arifin

Ridho Harta

Made Yudhi Setiani



# **Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis**

Editor : 1. M. Husni Arifin, Ph.D.  
2. Ridho Harta, M.Si.  
3. Made Yudhi Setiani, Ph.D.

ISBN: 978-602-392-217-8  
e-ISBN: 978-602-392-218-5

Penyunting : Ridho Harta, M.Si.  
Perancang Kover dan Ilustrasi : Dra. Suparmi  
Penata Letak : Heru Junianto, S. Kom..

Penerbit:  
Universitas Terbuka  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan - 15418  
Banten – Indonesia  
Telp.: (021) 7490941 (hunting); Fax.: (021) 7490147  
Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id).

Edisi kesatu  
Cetakan pertama, November 2017

©2017 oleh Universitas Terbuka

Hak cipta dilindungi Undang-Undang ada pada Penerbit Universitas Terbuka  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



*Buku ini dibawah lisensi \*Creative commons\* Atribut Nonkomersial  
Tanpa turunan 3.0 oleh Universitas Terbuka, Indonesia.  
Kondisi lisesi dapat dilihat pada [Http: //creativecommons.or.id/](http://creativecommons.or.id/)*

## **Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Transformasi sosial menuju masyarakat informasi yang beretika dan demokratis  
(BNBB) / Tim FHSIP-UT, editor, M. Husni Arifin, Ridho Harta, Made Yudhi  
Setiani. – Cet. 1; ed. 1--. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2017.  
(251 hal: 21 cm).

Termasuk daftar referensi.

ISBN: 978-602-392-217-8 e-ISBN: 978-602-392-218-5

1. *perubahan sosial* 2. *etika sosial*

3. *masyarakat informasi*

I. Tim FHSIP-UT

II. Arifin, M. Husni (editor)

III. Harta, Ridho (editor)

IV. Setiani, Made Yudhi (editor)

303.4--ddc23

201700086

## KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Editor buku ini yang diketuai oleh Muhammad Husni Arifin, PhD. Tanpa kerja keras tim editor, buku ini tidak dapat selesai dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para kontributor tulisan yang telah menyumbangkan ide, pemikiran dan gagasan dalam bentuk artikel sehingga dapat memungkinkan berbagi ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong terwujudnya open educational resources, buku ini mengadopsi lisensi Creative Common Attribution yang memungkinkan terjadinya *reuse*, *repurpose* dan *remix* konten dalam buku ini oleh para pembaca.

Topik yang diangkat oleh buku ini sangat relevan dengan perubahan revolusioner masyarakat yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi sosial menuju masyarakat informasi saat ini telah mendorong proses liberalisasi informasi yang secara fungsional meningkatkan akuntabilitas publik dan kapasitas masyarakat. Namun disisi lain kebebasan dalam memperoleh dan memproduksi informasi juga memiliki sisi negatif dari aspek etika dan hukum dimana proses produksi dan reproduksi informasi tidak didasarkan pada data yang benar dan bahkan menyembunyikan informasi yang benar. Hal ini tentunya dapat mengancam kehidupan masyarakat demokratis yang mendasarkan pada pilar kebenaran, persamaan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan tanggungjawab. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan konstruktif untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih maju baik secara kapasitas dalam menggunakan teknologi maupun ekonomi sebagai salah satu perwujudan dari cita cita Bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Akhirnya, sebagai bagian dari sumbangsih dari civitas akademika Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka terhadap transformasi masyarakat Indonesia yang lebih baik, buku ini diharapkan dapat mendorong terjadinya diskursus lebih lanjut dan menyumbangkan pemikiran kritis terhadap perkembangan masyarakat Indonesia di era kebebasan informasi.

Tangerang Selatan, November 2017

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka

Ttd

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAGIAN I. POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETIMPANGAN DIGITAL</b>	 <b>1</b>
Internet, Ketimpangan Digital dan Kebijakan Inklusif <i>Muhammad Husni Arifin.....</i>	 <b>3</b>
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bali <i>I Wayan Gde Wiryawan, I Kt. Sukawati Lanang P Perbawa, Lis Julianti</i>	 <b>17</b>
Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung <i>Dedy Hermawan, Simon Sumanjoyo Hutagalung.....</i>	 <b>35</b>
Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita): Upaya Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum melalui Pendaftaran Tanah <i>Nurma Khusna Khanifa.....</i>	 <b>55</b>
Dukungan Politik Anggota DPRD terhadap Kepala Daerah dari Jalur Perseorangan: Studi Kasus Di Kabupaten Kupang <i>Susanti.....</i>	 <b>71</b>
 <b>BAGIAN II. MEDIA SOSIAL DAN MULTILITERASI DI ERA DIGITAL</b>	 <b>93</b>
Multiliterasi Pada Masyarakat Informasi Indonesia <i>Sri Suharmini Wahyuningsih.....</i>	 <b>95</b>
 Pengaruh Iklan Melalui Media Televisi Bandar Udara terhadap	 <b>107</b>

peningkatan Brand Awareness Universitas Terbuka

**Ace      Sriati      Rachman,      Ami      Pujiwati,      Olivia  
Idrus.....**

Analisis Pemahaman Kepo (Knowing Every Particular Object)

Di Kalangan Mahasiswa

**Pranajaya..... 135**

Sikap Kritis Mahasiswa terhadap Isi Berita di Media Sosial

**Syahaabul Huda..... 149**

### **BAGIAN III. ETIKA DAN HUKUM**

**167**

Fungsi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

**Ika Atikah..... 169**

Etika Komunikasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh

**Sri Sedyaningih..... 185**

Etika Bisnis Transportasi *Online* Dalam Era Globalisasi

**Purwaningdyah Murti Wahyuni..... 197**

Globalisasi Informasi dan Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

**Subkhan Rojuli..... 209**

Peran Lembaga Praperadilan Dengan Konsep Hakim Komisaris Dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka Pada Proses Upaya Paksa (Dwang-Middelen) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

**Seno Wibowo Gumbira..... 223**

**Profil Penulis..... 235**

## DAFTAR TABEL

### BAGIAN I. POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETIMPANGAN DIGITAL

Internet, Ketimpangan Digital dan Kebijakan Inklusif

**Muhammad Husni Arifin**

Tabel 1. Kelompok 20 Negara dengan Pengguna Internet Tertinggi..... 6

Tabel 2. Prediktor Ketimpangan Digital..... 7

Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung

**Dedy Hermawan, Simon Sumanjoyo Hutagalung**

Tabel 1. Identifikasi Faktor Penghambat atau Pendorong Keberhasilan Program Partisipasi Masyarakat di Provinsi Lampung..... 42

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita): Upaya Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum melalui Pendaftaran Tanah

**Nurma Khusna Khanifa**

Tabel 1: Stuktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.... 61

Tabel 2 Data Angket Keterterapan Inovasi *One Day Service*..... 66

Dukungan Politik Anggota DPRD terhadap Kepala Daerah dari Jalur Perseorangan: Studi Kasus Di Kabupaten Kupang

**Susanti**

Tabel 1. Pilkada dan Kemenangan Berdasar Jalur..... 73

Tabel 2. Pola Kemungkinan Eksekutif..... 76

Tabel 3. Pola Hubungan Eksekutif – Legislatif..... 77

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Jumlah Kursi Parpol Pada DPRD Kab. Kupang. Periode 2009-2014 dan 2014-2019..... 79

### BAGIAN II. MEDIA SOSIAL DAN MULTILITERASI DI ERA DIGITAL

Pengaruh Iklan Melalui Media Televisi Bandar Udara terhadap peningkatan Brand Awareness Universitas Terbuka

**Ace Sriati Rachman, Ami Pujiwati, Olivia Idrus**

Tabel 1.	Variabel Operasional Penelitian.....	120
Tabel 2.	Kriteria dan Standarisasi dalam Evaluasi Outer Model – Refleksi.....	127
...		
Tabel 3.	Nilai <i>Loading Factor</i> pada Variabel Pesan Iklan, Brand awareness, dan Efektivitas Penayangan Iklan.....	128
Tabel 4.	Nilai AVE pesan iklan, brandawareness, dan efektivitas penayangan iklan.....	129
Tabel 5.	Nilai <i>Composite Reliability</i> Pesan Iklan, Brand awareness, dan Efektivitas Penayangan Iklan.....	130
Tabel 6.	Nilai Path Coefficients.....	130

Analisis Pemahaman Kepo (Knowing Every Particular Object)

Di Kalangan Mahasiswa

**Pranajaya**

Tabel	1.	Empat	Skala
Pengukuran.....			139

### BAGIAN III. ETIKA DAN HUKUM

Globalisasi Informasi dan Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

**Subkhan Rojuli**

Tabel 1.	Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS SMP yang Memuat Etika.....	215
----------	---	-----



## DAFTAR GAMBAR

### BAGIAN I. POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETIMPANGAN DIGITAL

Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung

***Dedy Hermawan, Simon Sumanjoyo Hutagalung***

Gambar 1. Model Pengelolaan Program Partisipatif Berbasis Perilaku Masyarakat (Hermawan.et all, 2017).....

49

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita): Upaya Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum melalui Pendaftaran Tanah

***Nurma Khusna Khanifa***

Gambar 1 Layanan ODS (draft 1).....

64

Gambar 2 Prosedur Pelayanan Larasita (Draft 2).....

65

### BAGIAN II. MEDIA SOSIAL DAN MULTILITERASI DI ERA DIGITAL

Pengaruh Iklan Melalui Media Televisi Bandar Udara terhadap peningkatan Brand Awareness Universitas Terbuka

***Ace Sriati Rachman, Ami Pujiwati, Olivia Idrus***

Gambar 1. Kerangka Penelitian.....

120

Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	123
Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	124
Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	124
Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	125
Gambar 6. Model Pengaruh Pesan Iklan Dan Brandawareness Terhadap Efektifitas Penayangan Iklan Di TV Bandara Soeta .....	126



## DAFTAR GRAFIK

### BAGIAN II. MEDIA SOSIAL DAN MULTILITERASI DI ERA DIGITAL

Analisis Pemahaman Kepo (Knowing Every Particular Object)

Di Kalangan Mahasiswa

**Pranajaya**

Grafik 1:	Jenis Kelamin.....	140
Grafik 2:	Asal Angkatan 2016 (30).....	140
Grafik 3: P-1:	Saya pernah mendengar istilah Kepo.....	141
Grafik 4: P-2:	Saya menggunakan media sosial <i>Facebook</i> .....	141
Grafik 5: P-3:	Saya menggunakan media sosial <i>Twitter</i> .....	142
Grafik 6: P-4:	Saya menggunakan media sosial <i>Instagram</i> .....	142
Grafik 7: P-5:	Saya suka membuka profil seseorang di salah satu medis sosial.....	143
Grafik 8: P-6:	Saya tidak bisa lepas dari telepon seluler.....	143
Grafik 9:	P-7: Saya selalu meng- <i>update</i> status.....	144
Grafik 10: P-8:	Saya merasa terganggu jika tidak melihat foto atau video di media sosial dan tidak mem- <i>follow</i> .....	144
Grafik 11: P-9:	Saya tidak mau ketinggalan info atau ingin selalu disebut mengetahui informasi terbaru dan meng- <i>upload</i> -nya di media sosial.....	145
Grafik 12: P-10:	Saya selalu menuliskan <i>lol</i> ( <i>laugh out loud</i> = tertawa terbahak-bahak) untuk menanggapi lelucon orang lain.....	145

Sikap Kritis Mahasiswa terhadap Isi Berita di Media Sosial

***Syihhaabul Huda***

Diagram	1.	Sikap	Sebatas	Membaca	
Judul.....					154
Diagram	2.	Sikap	Setelah	Membaca	Isi
Berita.....					155
Diagram	3.	Sikap	Sebatas	Membaca	
Judul.....					157
Diagram	4.	Sikap	Setelah	Membaca	Isi
Berita.....					157
Diagram	5.	Sikap	Sebatas	Membaca	
Judul.....					159
Diagram	6.	Sikap	Setelah	Membaca	Isi
Berita.....					160
Diagram	7.	Sikap	Sebatas	Membaca	
Judul.....					162
Diagram	8.	Sikap	Setelah	Membaca	Isi
Berita.....					162



## **BAGIAN I**

# **POLITIK, KEBIJAKAN PUBLIK DAN KETIMPANGAN DIGITAL**





# Internet, Ketimpangan Digital dan Kebijakan Inklusif

Muhammad Husni Arifin

Program Studi Sosiologi  
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimulai di era 90-an telah mengubah konstruksi tatanan sosial lama menjadi tatanan sosial baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi informasi (Ferro, Dwivedi, Gil-Garcia, & Williams, 2010). Manuel Castells (1996) menyebut tatanan sosial baru dengan istilah “network society” di mana fungsi dan sistem masyarakat lebih banyak diatur dalam struktur jejaring (*network*) daripada struktur fisik. Tatanan sosial baru yang berbasis teknologi ini merupakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya atau yang disebut dengan *cyberspace*. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi telah memicu suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya berdasarkan relasi-relasi alamiah berubah berdasarkan cara baru yang sebagian besar bersifat artifisial (Piliang, 2012).

Perkembangan pesat TIK ini setidaknya juga telah menghidupkan harapan baru, terutama bagi kelompok ekonom Neoklasik, bahwa efek dari inovasi teknologi dan kekuatan pasar akan mampu menghapus ketimpangan dalam masyarakat. Jalinan antara TIK dan aktivitas sehari-hari juga semakin tidak bisa dipisahkan, seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan, belanja, distribusi barang dan jasa, komunikasi antar individu, dan berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, para pembuat kebijakan (*policy makers*) di hampir seluruh dunia juga berbondong-bondong untuk menerapkan *e-governance* dalam sistem pemerintahan mereka.

Meskipun demikian, hubungan antara relasi sosial dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selain dapat memberdayakan individu atau kelompok sosial juga memiliki sisi lain yang dapat mengakibatkan fragmentasi, marginalisasi dan ketidakberdayaan. Fenomena semacam ini dinamakan dengan ketimpangan digital (*digital divide*). Ketimpangan digital

ini juga digunakan untuk membedakan antara individu yang kaya terhadap informasi (*information rich*) dan individu yang miskin informasi (*information poor*) atau tidak memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (Bagchi, 2005; Chinn & Fairlie, 2007). Ketimpangan digital tidak bisa dianalisis dalam sebuah “ruang hampa” tanpa mengaitkan dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat. Sebagaimana Manuel Castells (2006) mengatakan bahwa untuk memahami kondisi-kondisi baru yang muncul sebagai akibat penetrasi teknologi digital kita harus memahami kelompok-kelompok strategis yang berkuasa dan relasi-relasi kuasa yang terbentuk dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjelaskan ketimpangan digital dalam perspektif sosiologi dimana ketimpangan digital harus dikaitkan dengan konteks sosial, politik, kultural, dan ekonomi suatu masyarakat.

### **Teori Normalisasi dan Difusi (Normalization and Diffusion Theories)**

Penggunaan dan masa depan internet di masyarakat telah memunculkan perdebatan di kalangan pakar ilmuwan sosial dan teknologi informasi dan komunikasi. Setidaknya ada dua teori utama yang dapat menjelaskan masa depan pemanfaatan internet dan ketimpangan digital dalam masyarakat, yakni teori normalisasi dan teori difusi.

**Teori Normalisasi.** Teori normalisasi dapat dikatakan sebagai teori berperspektif optimis (*cyber optimists*) di mana teori ini memprediksi internet selalu berdampak positif dan dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat. Tokoh utama yang mewakili teori normalisasi adalah Resnick D (1998). Menurut Resnick (1998), perbedaan tingkat antara pemilik akses internet dan yang tidak memiliki akses akan semakin menurun, setidaknya dalam masyarakat pos industri. Ekspektasi ini didasarkan pada fenomena semakin luasnya pemanfaatan internet, baik sebagai pusat layanan publik atau komersial. Semakin populernya internet sebagai media interaksi dan bisnis akan memunculkan pasar terbuka (*open market*) yang pada gilirannya mengatasi masalah ketimpangan digital tanpa perlu meminta bantuan kepada pemerintah. Pasar terbuka ini akan meningkatkan kompetisi dan akan menurunkan biaya-biaya layanan internet dan alat-alat komputer. Dengan begitu, di bawah perspektif “normalisasi”, penyebaran internet akan semakin meningkat di masing-masing negara sampai dengan 90 – 95% dari seluruh populasi pengguna internet.

**Teori Difusi.** Berbeda dengan teori normalisasi, teori difusi meramalkan terhadap meningkatnya penyebaran ketimpangan digital di dunia. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Everett Rogers (1996). Rogers (1996) mengemukakan bahwa teori difusi bersumber dari analisis terhadap beberapa studi kasus tentang pengenalan beberapa teknologi sebelumnya, misalnya pengenalan teknologi televisi sebagai media massa, mesin uap sebagai teknologi produktif, dan bubuk mesiu dalam strategi militer. Terhadap semua kasus tersebut, pengenalan suatu teknologi baru memerlukan jaminan bahwa adopsi teknologi akan berhasil dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengenalan suatu teknologi baru memerlukan keterlibatan sekelompok sosial kecil yang dianggap mampu mengadopsi teknologi tersebut karena dianggap memiliki kesanggupan finansial dan intelektual (pengetahuan). Upaya untuk melibatkan kelompok sosial elit ini tentu akan menambah ongkos produksi dan ini merupakan suatu resiko untuk memunculkan inovasi teknologi. Dengan model semacam ini, penyebaran teknologi informasi dan komunikasi akan mengikuti model kurva S di mana pada bagian bawah kiri dari kurva adalah kelompok sosial yang selalu tertinggal dalam mengadopsi teknologi baru sehingga tidak dapat memaksimalkan fungsi teknologi internet untuk kepentingan sosial dan ekonomi mereka. Sementara itu, pada bagian atas kanan dari kurva adalah kelompok sosial elit memiliki tingkat pendidikan dan status sosial yang lebih tinggi. Dengan begitu, mereka dapat mengadopsi suatu teknologi baru lebih cepat dan mampu memaksimalkan manfaat internet bagi kepentingan mereka. Kondisi ini pada akhirnya terus memunculkan gap antara kelompok sosial bawah dan elit. Gap semacam ini berpotensi menciptakan stratifikasi dalam penggunaan internet (Chadwick, 2006).

### **Ketimpangan Digital sebagai Masalah Sosial**

Pemanfaatan internet oleh masyarakat di negara-negara Asia terus berkembang pesat. Sebagai contoh, data pengguna internet di Indonesia terus meningkat pesat per tahun. Pada tahun 2014 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 83,7 juta dan menempatkan Indonesia sebagai pengguna internet ke-6 terbesar di Dunia. Namun pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat drastis menjadi 132,700,000 dan menempatkan posisi Indonesia naik menjadi peringkat ke-5 (tabel 1).

Mencermati begitu massifnya pengguna internet di dunia maka dapat dikatakan bahwa TIK sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. TIK telah memiliki peran inklusif mulai dari peran dalam lingkup personal sampai dengan peran makro di level masyarakat, seperti e-governance (Selwyn & Facer, 2010).

Tabel 1. Kelompok 20 Negara dengan Pengguna Internet Tertinggi

No	Country or Region	Population, 2017 Est.	Internet Users 30 June 2017	Internet Penetration	Growth (*) 2000 - 2017
1	<u>China</u>	1,388,232,693	738,539,792	53.2 %	3,182.4 %
2	<u>India</u>	1,342,512,706	462,124,989	34.4 %	9,142.5 %
3	<u>United States</u>	326,474,013	286,942,362	87.9 %	200.9 %
4	<u>Brazil</u>	211,243,220	139,111,185	65.9 %	2,682.2 %
5	<u>Indonesia</u>	263,510,146	132,700,000	50.4 %	6,535.0 %
6	<u>Japan</u>	126,045,211	118,453,595	94.0 %	151.6 %
7	<u>Russia</u>	143,375,006	109,552,842	76.4 %	3,434.0 %
8	<u>Nigeria</u>	191,835,936	91,598,757	47.7 %	45,699.4 %
9	<u>Mexico</u>	130,222,815	85,000,000	65.3 %	3,033.8 %
10	<u>Bangladesh</u>	164,827,718	73,347,000	44.5 %	73,247.0 %
11	<u>Germany</u>	80,636,124	72,290,285	89.6 %	201.2 %
12	<u>Vietnam</u>	95,414,640	64,000,000	67.1 %	31,900.0 %
13	<u>United Kingdom</u>	65,511,098	62,091,419	94.8 %	303.2 %
14	<u>Philippines</u>	103,796,832	57,607,242	55.5 %	2,780.4 %
15	<u>Thailand</u>	68,297,547	57,000,000	83.5 %	2,378.3 %
16	<u>Iran</u>	80,945,718	56,700,000	70.0 %	22,580.0 %
17	<u>France</u>	64,938,716	56,367,330	86.8 %	563.1 %
18	<u>Turkey</u>	80,417,526	56,000,000	69.6 %	2,700.0 %
19	<u>Italy</u>	59,797,978	51,836,798	86.7 %	292.7 %

20	<u>Korea, South</u>	50,704,971	47,013,649	92.7 %	146.9 %
TOP 20 Countries		5,038,740,614	2,818,277,245	55.9 %	944.1 %
Rest of the World		2,480,288,356	1,067,290,374	43.0 %	1,072.2 %
<u>Total World Users</u>		7,519,028,970	3,885,567,619	51.7 %	976.4 %

Sumber: <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari persentase penetrasi internet maka Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara-negara yang memiliki gap yang besar antara penduduk yang memiliki akses terhadap internet dan mereka yang tidak memiliki akses (Tabel 2). Di berbagai distrik di negara-negara berkembang, penetrasi teknologi ternyata tidak berjalan secara merata. Penetrasi teknologi sebagian besar terjadi di wilayah-wilayah perkotaan atau sub-urban dan meninggalkan banyak wilayah terpencil dengan fenomena ketimpangan digital.

Munculnya ketimpangan digital sesungguhnya tidak bisa dilihat sebagai suatu fenomena tersendiri namun harus dianalisis terkait dengan konteks sosial, kultural, dan ekonomi pada masyarakat tersebut. Suatu studi tentang ketimpangan digital menemukan fakta bahwa ketimpangan digital dipengaruhi oleh jender, umur, gaji, ras, latarbelakang pendidikan, geografi, dan disabilitas (Selwyn & Facer, 2010).

Studi yang dilakukan oleh Lianzhin Yu (2006) menjelaskan beberapa prediktor ketimpangan digital yang dirangkum melalui tabel 2. Studi ini menunjukkan bahwa suatu ketimpangan digital harus dilihat secara lebih luas dan mendalam dalam konteks ketimpangan dan ketidakadilan sosial (*social inequalities and injustice*) dalam suatu masyarakat.

Tabel 2. Prediktor Ketimpangan Digital

Age	Increased age associated with decreased levels of access, limited modes of use and patterns of connecting. Age differences are especially pronounced in those individuals aged 60 years and over.
Culture/Social participation	Communities and individuals with higher levels of social contacts tend to make more use of ICTs.
Education	Lower levels of education are also shown to be

	associated with digital divides concerning access to and use of a range of ICTs.
Family structure	Family composition, adult caring responsibilities (i.e. for an older parent) tend to be associated with less contact with ICT. Conversely, the presence of school-age children within the household tend to increase contact with ICT.
Gender	Whilst gender differences were associated with digital divides during the 1990s, more recent academic research seems to indicate declining gender differences in ICT access and basic levels of engagement.
Geography/ rural-urban location	Levels of ICT use generally less in rural and inner-city areas, although often differences are not evident once other socio-economic variables are taken into account.
Income/ socio- economic status	Lower levels of income are consistently shown to be associated with digital divides concerning access to and use of a range of ICTs.
Race	Some US studies report lower levels of access and use amongst African-American and Latino populations. However, many studies report that then racial differences in ICT use disappear when issues of income and education are taken into consideration.

Sumber: Yu, L. (2006).

Fenomena ketimpangan digital, terutama di negara-negara berkembang, dianggap oleh sebagian ilmuwan dari kelompok *cyber-pessimists* dapat menjadi faktor yang semakin meningkatkan ketimpangan ekonomi dan proses marginalisasi terhadap kelompok non-digital (Castells, 1996). Oleh karena itu, ketimpangan digital sangat terkait erat dengan ketimpangan ekonomi. Efek yang dibawa oleh perkembangan internet dianggap oleh kelompok *cyber-pessimists* ternyata semakin meningkatkan ketimpangan ekonomi di seluruh dunia karena selama ini internet hanya berfungsi maksimal dalam menciptakan berbagai sumber daya baru di negara-negara kaya (Franda, 2002).

Pendapat dari kelompok *cyber-pessimists* ini dibantah oleh studi-studi yang dilakukan oleh kelompok *cyber-optimists* bahwa munculnya internet

telah memberikan dampak positif bagi negara-negara miskin, khususnya di bidang ekonomi, misalnya teknologi internet telah banyak membantu menciptakan koneksi antara pedagang lokal dan para pembeli di seluruh dunia. Internet bisa dikatakan merupakan instrumen vital untuk mendukung produk-produk lokal dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital telah membantu untuk menghapus hambatan-hambatan dalam era industri dan mempromosikan berbagai bentuk industri jasa (Parthasarathy, 2005). Meskipun demikian, aspek yang perlu dijelaskan oleh kelompok ini adalah bagaimana menjelaskan data tentang ketimpangan digital yang masih muncul sampai saat ini meskipun teknologi internet telah dikenal luas sejak tahun 1990-an.

Beberapa studi menemukan fakta bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan digital pada suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Hargittai (1999) menemukan fakta bahwa tingkat ekonomi suatu negara yang diukur melalui GNP merupakan faktor utama yang mempengaruhi munculnya ketimpangan digital. Studi-studi lainnya juga menemukan fakta yang serupa bahwa perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap kemunculan ketimpangan digital (ITU, 1999; Rodrigues & Wilson, 2000). Selain faktor sosial ekonomi, studi yang dilakukan oleh Norris (2001) menemukan faktor lainnya, yaitu tingkat investasi di bidang teknologi dan pengetahuan atau pendidikan. Semakin tinggi tingkat investasi dalam dua bidang tersebut maka semakin rendah tingkat ketimpangan digital dalam negara tersebut. Investasi di bidang pendidikan terkait erat dengan tingkat pengembangan modal manusia (*human capital development*) yang menjadi prasyarat utama terbentuknya masyarakat informasi. Investasi di bidang pendidikan akan menghasilkan masyarakat yang terdidik (*well-educated people*) yang pada gilirannya mereka akan dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Norris, 2001; Roger, 1995).

Selain itu, kondisi politik yang otoriter dan represif juga memungkinkan munculnya ketimpangan digital. Umumnya, suatu pemerintahan diktator berupaya membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi dengan cara menekan penggunaan internet di kalangan masyarakat. Pembatasan ini diharapkan dapat meningkatkan hegemoni pemerintah dan menghambat munculnya aktor-aktor politik baru yang dapat mengancam keberadaan rezim politik yang sedang berkuasa (Milner, 2006; Norris, 2001).

### **Kebijakan Teknologi yang Inovatif dan Inklusif**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa fenomena ketimpangan digital merupakan fenomena sosial yang terkait dengan aspek sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat ketimpangan digital, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan intervensi sosial dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dan *civil society*. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan dapat memunculkan kebijakan teknologi yang inovatif dan inklusif.

Kebijakan teknologi di sini dapat dipahami sebagai upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penyediaan dan penggunaan internet. Dengan demikian, kebijakan teknologi tidak terbatas pada aspek teknologi saja tetapi juga meliputi kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang juga berpengaruh terhadap ketimpangan digital, seperti kebijakan pendidikan, literasi, kesejahteraan individu, dan kebijakan lainnya (Chary & Aikins, 2010).

Kebijakan teknologi dituntut tidak hanya inovatif tetapi juga harus bersifat inklusif, yakni merefleksikan kebutuhan semua segmen masyarakat, yang tidak membedakan atas dasar gender, umur, status sosial, ras, serta ramah terhadap kelompok difabel. Berdasarkan beberapa studi, ada beberapa area yang dapat menjadi fokus kebijakan dalam rangka menjembatani ketimpangan digital, yakni kebijakan pendidikan, literasi, akses internet yang mudah dan terjangkau, dan pemberian layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memfasilitasi individu untuk belajar cepat menggunakan internet.

Kebijakan sosial untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mendorong peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi internet (Hoffman & Novak, 1998). Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menerima informasi, memungkinkan seseorang untuk mampu mengembangkan pengetahuan dan memaksimalkan kesempatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Berbagai kemampuan dan keterampilan yang dihasilkan dari investasi pendidikan tentu saja sangat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan digital (Baghchi, 2005; Chinn & Fairlie, 2007).



Sementara kebijakan di bidang pendidikan merupakan kebijakan berjangka panjang maka juga diperlukan kebijakan yang bersifat jangka pendek seperti kebijakan pemanfaatan internet bagi kelompok yang mengalami hambatan linguistik dan literasi. Salah satu contoh adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah India dengan mengembangkan dan meluncurkan “Simple Computer” (SIMPUTER) yang portabel di mana teknologi ini dapat mengonversi teks menjadi ucapan dalam berbagai bahasa lokal dan juga bahasa Inggris. Alat Simputer tersebut digunakan oleh para nelayan di teluk Bengal India untuk mengetahui kondisi cuaca (Meall, 2002).

Kebijakan berdampak langsung lainnya yang dapat didorong adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk wilayah-wilayah yang terpencil, tertinggal, dan terluar. Salah satu contoh adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses broadband (pitalebar). Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar (broadband) yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode lima tahun (2014 – 2019). Program RPI ini masuk dalam salah satu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Program RPI memiliki target untuk membangun prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perkotaan hingga persebarannya mencapai 30% dari populasi, dan 71% di rumah tangga dengan akses kecepatan mencapai 20 Mbps. Sedangkan untuk wilayah pedesaan program RPI menargetkan bisa menyebar hingga 6% populasi dan 49% rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps. Tak sampai situ saja, infrastruktur dan dukungan prasarana akses bergerak pitalebar (mobile broadband) juga digenjut pemerintah melalui program ini. Ditargetkan, jaringan mobile broadband bisa mencapai seluruh populasi di perkotaan dan 52% populasi di pedesaan dengan masing-masing bisa mengakses hingga kecepatan 1Mbps (Priambada, 2017).

Selain itu, kebijakan lainnya yang perlu didorong adalah pemanfaatan internet yang bersifat publik (konteks sosial) dengan memberikan layanan *e-governance*. Layanan *e-governance* terbukti efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik (James, 2001). Layanan *e-governance* juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif (Wilhem, 2004). Dengan demikian, layanan *e-governance* secara langsung maupun tidak langsung

mendorong masyarakat untuk belajar memanfaatkan teknologi internet sehingga pada gilirannya dapat menurunkan ketimpangan digital dalam masyarakat. Pada konteks ini, politik dan kultur dapat memainkan peran bersama dalam meningkatkan penggunaan internet.

## Penutup

Tulisan ini bermaksud menyajikan fakta bahwa ketimpangan digital bukan merupakan ilusi semata. Data tentang negara-negara pengguna internet di dunia menunjukkan bahwa ketimpangan digital lebih rentan terjadi di negara-negara berkembang. Untuk memahami akar masalah terjadinya ketimpangan digital di suatu negara atau masyarakat maka kita harus memahami bagaimana konteks sosial, ekonomi, politik dan kultural negara tersebut. Dengan demikian, ketimpangan digital tidak bisa dikategorikan hanya sebagai masalah penggunaan teknologi internet semata melainkan meliputi kompleksitas masalah sosial dalam suatu masyarakat.

Untuk mengatasi ketimpangan digital diperlukan suatu terobosan kebijakan teknologi yang inovatif dan inklusif. Kebijakan teknologi ini tidak hanya memfokuskan pada luaran (*output*) jangka panjang seperti investasi di bidang pendidikan namun juga pada luaran (*output*) berjangka pendek, seperti kebijakan pemanfaatan internet yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, pembangunan infrastruktur fisik, dan pemberian layanan publik, seperti *e-governance*.

## Referensi

- Bagchi, K. (2005). Factors contributing to global digital divide: Some empirical results. *Journal of Global Information Technology Management*, 8(3), 47–65.
- Castells, M. (1996). *The rise of the network society*. Oxford, UK: Blackwell Publishers.
- Chadwick, A. (2006). *Internet politics, states, citizens, and new communication technologies*. New York: Oxford University Press.
- Chary, M., & Aikins, S. K. (2010). Policy as a Bridge across the Global Digital Divide. In E. Ferro, Y. K. Dwivedi, J. R. Gil-Garcia, & M. D. Williams (Eds.), *Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society* (1st ed.). Hershey USA: Information Science Reference.
- Chinn, M. D., & Fairlie, R. W. (2007). The determinants of the global digital divide: A cross-country analysis of computer and Internet penetration. *Oxford Economic Papers*, 59, 16–44. doi:10.1093/ oep/gpl024.
- Ferro, E., Dwivedi, Y. K., Gil-Garcia, J. R., & Williams, M. D. (2010). *Handbook of Research on Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society*. Hershey USA: Information Science Reference.
- Franda, M. (2002). *Launching into cyberspace: Internet development and politics in five world regions*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Hargittai, E. (1999). Weaving the western web: Explaining differences in Internet connectivity among OECD countries. *Telecommunications Policy*, 23(10-11), 701–718. doi:10.1016/S03085961(99)00050-6

- Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1998). Bridging the racial divide on the Internet. *Science*. New Series, 280(5362), 390–391.
- James, J. (2001). The global information infrastructure revisited. *Third World Quarterly*, 22(5), 813–822. doi:10.1080/01436590120084610.
- Meall, L. (2002). Business: The digital divide— eastern promise. *Accountancy*, 129(1303), 1–4.
- Milner, V. H. (2006). The digital divide: The role of political institutions in technology diffusion. *Comparative Political Studies*, 39(2), 176–179. doi:10.1177/0010414005282983
- Parthasarathy, B. (2006). The political economy of the Indian software industry. In G. Parayil (Ed.), *Political economy and information capitalism in India. Digital divide, development, and equity*. New York: Palgrave Macmillan.
- Priambada, A. (2017). Lima Kebijakan Pemerintah yang harus Diperhatikan dalam Mendukung Keterlibatan Digital UKM. Diakses pada 12 Oktober 2017 dari <https://dailysocial.id/post/kebijakan-pemerintah-keterlibatan-ukm>.
- Resnick, D. (1998). Politics on the Internet: The normalization of cyberspace. In C. Toulouse & W. T. Luke (Eds.), *The politics of cyberspace*. New York: Routledge.
- Rogers, M. E. (1995). Diffusion of innovation. New York: Free Press.
- Piliang, Y. A. (2012). Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Siositeknologi*, 27(11).
- Selwyn, N., & Facer, K. (2010). Beyond Digital Divide: Toward an Agenda for Change. In E. Ferro, Y. K. Dwivedi, J. R. Gil-Garcia, & M. D. Williams (Eds.), *Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society* (1st ed.). Hershey USA: Information Science Reference.

- Van Dijk, J. (2005). The deepening divide. Inequality in the information society. London: Sage Publications.
- Wilhelm, A. G. (2004). Toward an inclusive information society. Cambridge, MA: MIT Press.
- Yu, L. (2006). Understanding information inequality: Making sense of the literature of the information and digital divides. *Journal of Librarianship and Information Science*, 38(4), 229–252. doi:10.1177/0961000606070600.



# Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bali

I Wayan Gde Wiryawan  
I Kt. Sukawati Lanang PPerbawa  
Lis Julianti

Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

## PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia yang berimplikasi pada lahirnya Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Upaya pencapaian tujuan bernegara dalam konsep *welfare state* dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, profesional dan yang mampu menjawab tantangan perubahan masyarakat.

Ditetapkannya regulasi tentang Pelayanan Publik pada kenyataannya tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan besar dalam pelayanan publik tersebut, seperti telah diungkapkan pada hasil

Survei yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM pada tahun 2013, yang menemukan bahwa praktek penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota di Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan. Pada tahun 2010 juga dirilis hasil penelitian dual lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPKRI) dan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Hasil Survey KPK RI memberikan penilaian indeks prestasi pelayanan publik 5,42 dari skala 1-10. Artinya, masyarakat menilai pelayanan publik di Indonesia tidak memuaskan, cenderung korup, dan merugikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian PERC tahun 2010 yang menempatkan kualitas birokrasi Indonesia

ranking kedua terburuk di Asia setelah India di mana peringkatnya telah dilakukan sejak 1999-2010. Dan hasilnya, kualitas birokrasi Indonesia selalu menempati peringkat terendah.

Pengembangan Konsep Pariwisata Budaya di Bali telah menjadikan Bali sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata utama pada tingkat internasional. Hal tersebut menyebabkan industri pariwisata sebagai sektor utama dalam perekonomian masyarakat Bali. Dampak perkembangan industri pariwisata tersebut menyebabkan perubahan masyarakat Bali yang sangat cepat sebagai akibat interaksi masyarakat Bali dengan wisatawan, pelaku industri pariwisata dari berbagai negara. Perubahan masyarakat yang sangat dinamis dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia menyebabkan birokrasi di Bali sebagai pelaku pelayanan publik memiliki tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Adanya kepentingan dari wisatawan dan pelaku pariwisata dari berbagai negara akan menuntut birokrasi yang profesional dan modern sebagaimana layaknya di negara asal mereka yang cenderung menjadi tuntutan yang tidak terelakan di Bali.

Tuntutan tersebut menjadikan Bali tidak dapat melepaskan diri dari Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology*, ICT) yang telah membawa pengaruh yang besar terutama bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi ini telah memaksa organisasi pemerintah untuk melakukan transformasi besar-besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya dalam produk layanan, tetapi juga pada struktur dan manajemen organisasi (Bennis dan Mische, 2000).

Pada sisi yang lain eksistensi Bali saat ini tidak terlepas dari konsistensi Bali dalam mempertahankan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat yang memiliki identitas yang jelas yaitu budaya ekspresif yang termanifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai-nilai dasar yang dominan seperti: nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni, dan nilai keseimbangan (Geriya, 2000), yang sejalan dengan prinsip pelayanan. Penggunaan kearifan lokal dalam pelayanan publik dalam reformasi birokrasi telah didengungkan oleh Mantan wakil Menteri dan Reformasi Birokrasi Eko Prasjojo pada seminar internasional dengan tema Akselerasi Reformasi Berbasis Kearifan Lokal dan budaya



ya Unggul pada tanggal 20 Februari 2014 di Denpasar, menyatakan bahwa kearifan lokal nilai budaya setempat banyak yang bisa menjadi inspirasi dan prinsip dalam birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi yang diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, yang mencakup dua hal yaitu reformasi struktur dan reformasi budaya. Oleh karena itu, nilai budaya dapat menjadi dasar kepentingan politik bersama sehingga mampu mendorong budaya dalam birokrasi. Penerapan kearifan lokal dalam reformasi birokrasi khususnya dalam pelayanan publik seharusnya dapat dilakukan secara optimal di beberapa daerah seperti Bali, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan lain-lain yang memiliki budaya dan kearifan lokal yang masih terjaga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan perilaku, interaksi dan peranan pejabat negara dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Dengan Lokasi Penelitian di Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, subyek penelitian adalah pelaku pelayanan publik di pemerintahan, prajuru Desa Pakraman, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Adapun teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara mendalam, informan dipilih secara purposive (2) kuisioner terbuka terhadap masyarakat pengguna pelayanan publik, (3) Observasi terhadap perilaku pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, (4) Studi dokumentasi. Sebelum dilakukan wawancara maka terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara (*interview guide*). Selanjutnya data dianalisis memakai teknik analisis data secara kualitatif disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika.

### **PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Desa Adat/Pakraman dalam Menjaga Sistem Pelayanan berbasis Kearifan Lokal di Bali**

Satuan-satuan masyarakat hukum Adat yang telah ada sejak zaman sebelum masuknya pemerintah Belanda di Indonesia dengan berbagai nama seperti *Marga* di Sumatera Selatan, *Nagari* di Sumatera Barat, *Hutta* di Tapanuli, *Gampong* di Aceh, *Hureiya* di Batak, *Dasan* di Lombok, *Desa* untuk Jawa Bali dan Temukung di NTT oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan istilah *Inlandsche Gemeenten*. Satuan masyarakat hukum Adat tersebut terdapat baik dalam swapraja maupun di Wilayah yang dikuasai langsung oleh Belanda (*direct gebied*) (Walhof, 1960: 284).

Bentuk-bentuk *Desa Adat* yang beragam ini seperti yang diatur berdasarkan ketentuan IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie*), stb 1906 No. 3 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengeweten*), stb 1938 No. 490 jo stb 681 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Supomo, 1980: 77) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan arah dan tujuan dibentuknya *Desa Adat* tersebut. Sehingga tidak ada satupun yang sama persis dalam bentuk, susunan kepengurusannya, tugas pokok dan fungsinya.

Secara konstitusional pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia telah diatur dalam Perubahan UUD 1945, Pasal 18 B ayat (1) dikenal dengan “otonomi khusus” dan ayat (2) pengakuan dan penghormatan pada “masyarakat hukum adat”. Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap lembaga adat diwujudkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Berdasarkan rumusan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan *Desa Pakraman* adalah; kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut jelas nampak bahwa unsur-unsur yang menjadi syarat pokok berdirinya sebuah *Desa Pakraman* adalah sebagai berikut; 1) Kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali. 2) Mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun. 3) Mempunyai ikatan *Kahyangan Tiga* (*Pura Puseh, Dalem, Desa*). 4)

Mempunyai wilayah tertentu. 5) Mempunyai harta kekayaan sendiri. 6) Berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, berarti *Desa Pakraman/Desa Adat*, diikat oleh adat istiadat atau Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum Adat yang tumbuh dari masyarakat dikenal dengan *Awig-Awig* yang dijadikan landasan tertulis dalam pengaturan tata kelola *Desa Pakraman* tersebut.

Konsep dasar terbentuknya *Desa Pakraman*, berlandaskan pada Konsep *Tri Hita Karana*, yaitu 1) *Parhyangan* (tempat suci dalam bentuk *Kahyangan Tiga*); 2) *Pawongan* (anggota masyarakat yang disebut dengan *kerama desa*); dan 3) *Palemahan* (unsur wilayah desa). Filosofi inilah yang sesungguhnya menjadi karakter desa pakraman yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar Bali. Filosofi *Tri Hita Karana* ini bersumber dari ajaran Hindu, yang secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan (*tri*=tiga, *hita*=kesejahteraan, *karana*=sebab). Tiga unsur yang ada dalam *Tri Hita Karana* adalah *Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *Bhuana* (alam semesta), dan *manusa* (manusia) (Institut Hindu Dharma, 1996:3). Secara umum dapat dikemukakan bahwa konsepsi *Tri Hita Karana* berarti bahwa kesejahteraan umat manusia didunia ini hanya dapat terwujud bila terajadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur Tuhan-Manusia-Alam di atas, yaitu: a. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik sebagai individu maupun kelompok. b. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. c. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, sesungguhnya konsepsi *tri hita karana* tiada lain adalah nilai harmoni atau keseimbangan.

Disamping nilai keseimbangan, nilai Ketuhanan dan kekeluargaan/kebersamaan juga mewarnai konsepsi ini. Nilai Ketuhanan dapat dilihat dari unsur hubungan yang seimbang antara manusia dengan *Sanghyang Jagat Karana*/Tuhan Sang Pencipta, sedangkan nilai kekeluargaan tercermin dalam unsur hubungan antara dengan sesamanya, baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai-nilai ini sesuai dengan alam pikiran tradisional masyarakat Indonesia umumnya yang bersifat kosmis relegius magis dan komunal.

Manusia dilihat sebagai bagian dari alam semesta yang tidak dapat dipisahkan dengan Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua itu, yaitu manusia, alam semesta, dan Tuhan Sang Pencipta, saling berhubungan

dan berada dalam suatu keseimbangan yang senantiasa harus tetap dijaga. Untuk dapat mencapai tujuan hidup yang hakiki, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan jasmani dan rohani (*moksartham jagadhitaya ca iti dharma*) maka masyarakat Bali (etnis Bali beragama Hindu) senantiasa mengupayakan dan menjaga terpeliharanya suasana yang harmonis dalam masyarakat, baik vertikal (dalam hubungan manusia dengan Tuhan) maupun horisontal (dalam manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya) atau yang disebut keharmonisan secara duniawi (*sekala*) dan akhirat (*niskala*). Kehidupan yang serba harmonis, serba seimbang dan lestari merupakan bagian dari cita-cita masyarakat Bali, suatu konsepsi berpikir yang merupakan repleksi dari filsafat *tri hita karana*. Dalam konteks hukum, suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat dapat diterjemahkan sebagai suasana yang tertib, adil, aman dan damai atau *trepti, sukerta sekala niskala* (Sudantra, 2001:2), yang selanjutnya dituangkan dalam *awig-awigdesa pakraman*. Cita-cita tersebut umumnya dirumuskan dalam awig-awig dilokasi penelitian dengan kalimat: "*ngerajegang sukertan desa saha pawonganya sekala kalawan niskala*".

Keberadaan Desa Pakraman sebagai komunitas masyarakat adat secara konkrit dijalankan oleh pengurus Desa Pakraman, yang disebut dengan *Prajuru Desa Adat*, dengan pimpinannya disebut dengan *Bendesa Adat*. Menurut hasil wawancara dengan para *Bendesa Adat Desa Pakraman* dinyatakan bahwa pada saat pertama kali terbentuknya *Desa Pakraman* tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing di bidang agama, adat, budaya dan gotong royong yang dilandasi semboyan hidup *sagilik saguluk salunglung sabayan taka* maksudnya suka dan duka dipikul bersama-sama. (Surpha, 2004: 18). Tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat Tugas pokok dan fungsi *Desa Pakraman*, berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat setempat, perkembangan dan kemajuan teknologi.

Keberadaan *Desa Pakraman* sebagai sebuah organisasi sejalan dengan teori organisasi yang di kemukakan oleh Mary Jo Hatch, dalam bukunya *Organization Theory*, menyatakan bahwa tumbuhnya sebuah organisasi apabila ada sejumlah orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dan saling ketergantungan satu sama lain, akan tumbuh sebuah organisasi. Berdasarkan teori organisasi tersebut, maka organisasi tradisional di Bali yang saat ini disebut dengan *Desa Pakraman*, yang berdirinya bersamaan

dengan adanya masyarakat Bali memiliki tugas pokoknya adalah memberikan perlindungan terhadap anggota kelompok dari gangguan dan serangan kelompok lain, serta perlindungan dari ganasnya kondisi alam. Sebagai organisasi tanggungjawab tersebut dibebankan kepada *Bendesa Adat* selaku pimpinan desa pakraman yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara tulus ikhlas tanpa pamrih dengan filosofi “*Ngayah*”, yaitu melaksanakan kewajiban untuk melayani sang pencipta dan masyarakat dengan tulus ikhlas.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran terhadap tugas pokok *Desa Pakraman*, yang sebelum masuknya pemerintahan kolonial Belanda, yaitu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pembina dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan adat. Pada masa kerajaan Bali dan masuknya Pengaruh kerajaan Majapahit, *Desa Pakraman* telah menjalankan tugas ganda; pertama tugas adat dan budaya sebagai wadah komunitas asli tradisional sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, Kedua *Desa Pakraman* menjalankan tugas – tugas yang diberikan oleh Raja, termasuk memungut *Utpeti* (pajak) sekaligus menjadi pembela kerajaan dari serangan pihak lain. Perkembangan tugas dan fungsi tersebut diberikan pada kenyataannya dapat dilaksanakan dengan baik karena Desa Pakraman telah memiliki prinsip-prinsip pelayanan publik yang bersifat fundamental yang secara konsisten dilaksanakan oleh *Bendesa Adat Desa Pakraman*.

Keberadaan Desa Pakraman sebagai organisasi yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat adat di Bali, didasarkan atas konsep ajaran Hindu yang disebut dengan *Sewaka Dharmopadesa*. Implementasi dari ajaran Hindu tersebut melahirkan prinsip *Sewaka Dharma* adalah konsep pelayanan Hindu yang menekankan pada keselarasan pikiran, ucapan, dan tindakan pelayanan demi harmoni nilai-nilai kemanusiaan, kealaman, dan ketuhanan. *Dharma* adalah *karma* yang dalam kehidupan sehari-hari dipahami menjadi kewajiban. Kewajiban inilah *bhakti*, yakni pelayanan kepada sesama, alam, dan Tuhan. kiranya diperlukan untuk membangun pengertian tentang pelayanan yang dapat memperkuat komitmen pada pengabdian itu sendiri. eksistensi *Sewaka Dharma* inilah yang menjadi dasar dari bendesa Adat pada masing masing Desa Pakraman dalam menjalankan fungsinya yang secara hakiki sama dengan fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*service*) untuk menuju keadilan, pemberdayaan (*empowerment*) mendorong kemandirian, dan pembangunan (*development*) untuk menciptakan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendesa adat di lokasi penelitian dinyatakan bahwa *sewaka dharma* mengandung arti bahwa pelayanan (*sewaka*) adalah kewajiban (*dharma*). Kewajiban dalam pelayanan ini melekat pada setiap peran yang sedang dijalani manusia dalam kehidupannya. Demikian juga dalam setiap status ataupun profesi (*warna*) yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai individu maupun sosial, kewajiban melaksanakan pelayanan (*sewaka dharma*) selalu melekat kepadanya. Baik itu kewajiban melayani Tuhan, melayani sesama manusia, maupun melayani alam dan lingkungannya. Ini merupakan spirit humanisme Hindu yang tumbuh dan berkembang pada setiap insan demi tercapainya tujuan kehidupan tertinggi (*moksartham jagadhita ya ca iti dharma*). Jadi, *Sewaka dharma* berarti bahwa pelayanan (*sewaka*) adalah kewajiban (*dharma*).

Adanya keyakinan tersebut menyebabkan seluruh *Prajuru Desa Pakraman* (pengurus desa pakraman) dapat menjalankan fungsi pelayannya dengan baik dan tulus tanpa adanya kepentingan pragmatis dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adat, sehingga eksistensi desa pakraman sebagai komunitas masyarakat adat di Bali sampai saat ini masih dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Bali walaupun ditengah-tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi akibat perkembangan industri pariwisata.

### **Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Sistem Pelayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) masyarakat informasi (*The World Summit on the Informations Society*), bulan Desember 2003 yang melahirkan rencana aksi (*plan of action*) bagi Negara-negara di dunia bertujuan agar pada tahun 2015 setiap Negara mengupayakan setiap lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit telah terhubung dengan jaringan komunikasi dan informasi, serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi (Muarif, 2004).

Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Gov* (*electronic-Government framework*), dengan mana kebijakan tersebut

merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-Government*.

Dinamika sosial-ekonomi-politik masyarakat Bali yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan modernisasi sebagai akibat perkembangan pariwisata telah membangun kesadaran masyarakat akan adanya hak untuk mendapatkan pelayanan oleh pemerintah (*the right to know*) yang transparan, professional dan akuntabel. Secara global, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan masyarakat informasi (*information society*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) (Suprawoto, 2007). Dari hasil penelitian pada pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota di Bali situasi itu merupakan tantangan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat (*obligation to tell*) sebagai salah satu instrument penting dalam menciptakan prinsip transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah, terutama dalam hal pemberian pelayanan publik. Pada kenyataannya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua Pemerintah Kabupaten dan Kota yang menjadi obyek penelitian mampu menyediakan informasi yang memadai bagi masyarakat dan belum mampu merancang sebuah sistem manajemen informasi yang optimal bagi pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah di Provinsi Bali.

Hasil penelitian terhadap masyarakat pengguna pelayanan publik di Provinsi Bali menunjukkan bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa lebih baik dilayani oleh petugas atau birokrat dibandingkan dengan elektronik, responden yang menyatakan lebih baik pelayanan yang diberikan berbasis elektronik dan responden yang tidak memberikan pendapat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Hasniati, dkk (2010) tentang Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis E-Government (E-Services) Di Makasar dalam Jurnal PEKOMMAS, Vol. 13, No.1 yang mengungkapkan bahwa kebanyakan warga masyarakat lebih menyukai pelayanan publik melalui elektronik karena: (1) lebih aman, (2) lebih efisien, (3) tingkat kepastiannya lebih tinggi dibandingkan dengan petugas, dan (4) lebih transparan. Sedangkan warga masyarakat yang lebih menyukai pelayanan dengan kontak langsung karena berbagai alasan antara lain: (1) belum terbiasa dengan elektronik, (2) lebih sederhana, (3) mudah berkomunikasi dengan petugas, (4) petugas mendatangi pelanggan, dan (5) sudah menjadi kebiasaan.

Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di Bali telah mulai dirancang dan dibangun pada pemerintah daerah di obyek penelitian. Pembangunan sistem Pelayanan Publik Berbasis TIK, tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di Bali, karena sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Bali belum dapat menjalankan sistem pelayanan publik secara optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masalah SDM tetap menjadi kendala utama selain masalah dana dan infrastruktur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah Kabupaten di Bali walaupun infrastruktur telah tersedia, namun karena tidak ditunjang oleh tersedianya SDM yang terampil untuk itu, menyebabkan pemerintah daerah belum mampu memberikan pelayanan dengan berbasis TIK. Informasi-informasi tentang proses pelayanan belum bisa *diupdate* setiap saat akibat terbatasnya kemampuan inovasi SDM memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Adanya permasalahan budaya SDM untuk melakukan perubahan kebiasaan SDM dari manual ke teknologi informasi dan komunikasi menjadi pekerjaan besar dari pengambil kebijakan di pemerintah daerah. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa temuan penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan kendala dalam pengembangan Pelayanan Publik berbasis TIK di Bali pada dasarnya sejalan dengan apa yang dialami oleh Negara-negara berkembang lainnya. Sebagaimana yang dirilis oleh *National Information Society Agency* (2007), bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan penerapan *e-government* di Negara berkembang meliputi:

- Kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik yakni penolakan internal oleh pemerintah;
- Kurangnya rencana dan strategi *e-government* diperkenalkan dengan setengah-setengah dan tidak sistematis
- Kurangnya SDM yakni kurangnya pengembangan kapasitas institusi dan personal;
- Tidak adanya rencana investasi
- Kurangnya vendor sistem dan TI
- Ketidakmatangan teknologi: terlalu menekankan teknologi atau penerapan yang berorientasi teknologi; dan
- Implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan dan pengujian yang cukup.



Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pengembangan pelayanan publik berbasis TIK merupakan sistem yang terintegrasi dan saling berkaitan, sehingga diperlukan komitmen yang kuat yang diwujudkan dalam kebijakan yang komprehensif untuk mengembangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan sistem pelayanan publik tersebut, khususnya penyelesaian permasalahan Sumber daya Manusia yang menjadi salah satu faktor utama dalam berjalannya sistem pelayanan publik yang berbasis TIK. Hasil penelitian pada sisi kebijakan, menunjukkan bahwa permasalahan itu diakibatkan belum semua pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi dari hasil peneelusuran peneliti didapatkan bahwa terdapat salah satu pemerintah daerah yang menonjol dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik dari berbagai aspeknya secara sistematis yaitu pemerintah kota Denpasar, terutama dalam penyelesaian permasalahan SDM.

Pembangunan sistem pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan membangun sistem pelayanan berbasis TIK dengan berdasarkan kearifan lokal yang disebut “Sewaka Dharma”. Integrasi kearifan lokal yang menjadi spirit sikap mental dari pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik yang bermakna memberikan pelayanan sebagai kewajiban (*dharma*). Hal tersebut merupakan refleksi nilai-nilai budaya yang dibangun dari kebiasaan dan perilaku masyarakat yang secara turun temurun berkembang dan dilaksanakan dalam kehidupan kesehariannya diarahkan untuk menjadi fondasi dari pelaku pelayanan publik, sehingga sistem pelayanan publik berbasis TIK yang sudah dibangun dapat berjalan optimal. Pemerintah Kota Denpasar memaknai kearifan lokal sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dikembangkan lebih luas dan universal, dengan mengetengahkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber yang pertama dan utama dalam rangka membangun spirit sikap mental para pelaksana pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Ishomudin yang dikutip Sukarma dkk, bahwa pada zaman modern agama diharapkan dapat berperan lebih besar dalam pembangunan, baik dalam membangun sistem nilai motivasi, pedoman hidup, maupun pembentuk kata hati.

Berbagai sastra agama Hindu yang tertuang dalam kitab suci merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang berfungsi positif sebagai basis memaknai pelayanan publik, sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah Kota

Denpasar yang melahirkan berbagai prestasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit-unit layanan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Denpasar. Pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal di Kota Denpasar bersumber dari agama Hindu yang merupakan aktualisasi dari ajaran *Manusa Yadnya* (persembahan/ pengorbanan untuk manusia) yang selanjutnya direalisasikan sesuai prioritas nasional, antara lain meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, perijinan, administrasi kependudukan, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan sarana dan prasarana perkotaan serta keamanan/ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar yang diarahkan terlaksananya pelayanan publik yang efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibangun secara konsisten, berkesinambungan dengan tetap melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada atau terjadi dalam pelayanan publik dengan membuat regulasi daerah yang *soft law* seperti; Kode Etik, dan *hard law* seperti; Perwali dan Perda berbasis kearifan lokal terkait dengan pelayanan publik yang diderivasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian pemerintah Kota Denpasar memiliki keyakinan bahwa pelayanan publik di Kota Denpasar menjadi hak asasi warga masyarakat (*civil rights*) yang benar-benar dapat mewujudkan '*agawe sukanikang rat*'.

Nilai-nilai kearifan lokal Bali juga dijadikan dasar dalam membangun kode etik dari pelaku pelayanan publik di Kota Denpasar, yaitu konsepsi *Karmaphala* mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan (Titib, 2012), tidak terkecuali terhadap pelaku pelayanan publik.

Konsep ajaran Hindu yang juga dijadikan dasar dalam membangun budaya pelayanan di Kota Denpasar adalah ajaran yang diatur dalam Kitab *Dharma Vahini* ditegaskan bahwa tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi sebagai *Sevaka Dharma* berarti menerapkan kebajikan dan integritas tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Bahkan ajaran *Manava Seva-Madava Seva* menegaskan bahwa pelayanan yang

diberikan kepada sesama itu pada hakikatnya juga adalah pelayanan kepada Tuhan.

Nilai-nilai kearifan lokal tersebut diangkat sebagai jaminan atas akuntabilitas pejabat publik sebagai pelaku utama dalam pelayanan publik, karena ajaran Kitab Bharata Yudha yang diyakini oleh masyarakat Bali mengajarkan, “Hanya orang berkarakter teguh, berintegritas dan bijaksana dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih”. Hal itu berarti untuk menjadi pemimpin yang baik harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berkarakter, berintegritas serta bijaksana. Di samping itu juga terdapat tuntunan harmoni (keselarasan) agar pemimpin mampu bertindak adil dan akuntabel.

Pengaturan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Denpasar secara normatif pengaturannya harus bersumber pada Pancasila, yang kemudian diikuti oleh pengaturan perundangan Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan landasan dasar filosofis bagi pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis, Amanat ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (6), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 i ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal pasal tersebut merupakan amanat negara bahwa penyelenggaraan pelayanan publik (Maria Farida Indrati, *Ibid*, hal. 25.) harus dikelola, diatur dan diselenggarakan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu secara teoritis pengaturan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Denpasar berbasis TIK dengan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal diarahkan untuk menuju pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new public service*, yaitu pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada dan hidup terpelihara dalam kehidupan masyarakat, bersifat nondiskriminatif dan demokratis yang menjamin adanya persamaan di antara warga negara, tanpa membedakan asal usul warga negara, kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Oleh karena itu pemerintah Kota Denpasar berupaya mewujudkan fungsi utama pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan di antara

warga negara dan kelompok komunitas. Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalam pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

### Kesimpulan

Perkembangan industri pariwisata yang dibangun berdasarkan konsep Kepariwisataan Budaya menjadikan Bali memiliki tuntutan yang tinggi untuk membangun sistem pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai akibat modernisasi dan globalisasi tetapi pada sisi yang lain Bali juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang tumbuh dan berkembang di *desa pakraman* di Bali seperti konsep *Tri Hita Karana*, *Ngayah*, *Sewaka Dharma*, *Karma Phala* dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya Bali juga memiliki permasalahan pelayanan publik walaupun telah berupaya dibangun sistem Pelayanan Publik Berbasis TIK, karena terjadi permasalahan dalam Sumber Daya Manusia yang belum terjadi perubahan budaya dari pelayanan manual menjadi pelayanan berbasis TIK.

Inovasi pelayanan publik di Bali dengan mengelaborasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nilai-nilai kearifan lokal akan menjadi instrumen penting untuk memposisikan birokrasi sebagai wadah yang akan menampilkan citranya berdasarkan karakter manusia yang menggerakkan institusi dengan melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat Bali yang memiliki karakter yang terbangun atas kekayaan kearifan lokal. Pemerintah Kota Denpasar melakukan integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik berbasis TIK sehingga menimbulkan penilaian positif terhadap birokrasi karena inovasi pelayanan publik dalam pendekatan kearifan lokal akan langsung menyentuh dan mempengaruhi emosi, motif, dan persepsi masyarakat Bali sehingga dirasakan setiap langkah dan kebijakan birokrasi tidak semata mata pada pendekatan prosedural tetapi lebih pada upaya transformasi secara substansial yaitu implemtasi terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat Bali.

### Saran

Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota di Bali mesti memiliki *political will* yang kuat untuk membangun sistem pelayanan publik yang modern dengan basis TIK dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal

sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan SDM yang muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis TIK tersebut. Pengembangan regulasi yang mengatur pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal akan efektif dalam membangun jiwa profesionalitas dari pelaku pelayanan Publik.

Pengembangan sistem Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di Bali dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan pelayanan publik berbasis TIK hendaknya menjadi isu sentral dalam manajemen tata kelola pemerintahan di Bali, sehingga akan dirasakan konsistensi dan sinergitas dalam pengembangan sistem tata kelola pemerintahan di Bali yang menjadikan budaya sebagai basis penyelenggaraan aspek kehidupan masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas dana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Tahun 2017. Penghargaan juga diberikan kepada Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi program ini. Ucapan terima kasih atas dukungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Badung Gianyar dan Kota Denpasar. Ucapan terima kasih juga kepada para pemuka Desa Pakraman/Adat di Bali beserta pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

## Referensi

- Aldri Frinaldi (2011), Muhamad Ali Embi, Pengaruh Budaya Kerja Etnik Terhadap Budaya Kerja Keberanian Dan Kearifan Pns Dalam Pelayanan Publik Yang Prima (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat), Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 ISBN: 978-602-96848-2-7 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
- Ayatrohaedi (1986), Kepribadian Budaya Bangsa (lokal Genius), Jakarta: Pustaka Jaya Jakarta
- Ardianto, A. 2012. Filsafat kearifan lokal etnik sunda dan ilmu pengetahuan barat, <http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/20.elvinaro-unpad.pdf>, akses 9 Mei 2016
- BaliPost, Berpijak pada Kearifan Lokal dalam <http://www.balipos.co.id>, diakses 17/5/2016
- Bennis, W dan Michael Mische (2000), Organisasi Abad 21: Reinventing melalui Reengineering (terjemahan), Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo
- Bisnis.com, layanan-publik-skipd-gianyar-tabanan-karangasem-masuk-zona-merah, <http://116.197.130.52/read/20141210/1/48257/layanan-publik-skipd-gianyar-tabanan-karangasem-masuk-zona-merah>, diakses 25 april 2016
- Dwiyanti Selamat (2013), Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), 2013, Jurnal governance, Fisip Unsrat, Vol. 5 No. 1 Th. 2013 ISSN No. 2088-2815
- Hayat (2014), Konsep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance, Jurnal Borneo Administrator, Volume 10, Nomor 1, 2014
- Hasniati dan Muhammad Hamzah Syahrudin (2010), Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis E-Government (E-Services)

Di Makasar, Jurnal PEKOMMAS, Vol. 13, No.1, Juni 2010, halaman 77-94. ISSN: 1411-0385 (Terakreditasi LIPI)

Institut Hindu Dharma (1996), Keputusan Seminar XII Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu, Proyek Daerah Tingkat I Bali

Geriya, I Wayan (2000), Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI. Denpasar: Perusahaan Daerah Propinsi Bali, Unit Percetakan Bali.

Lovelock

Cristoper H. (1992), Managing Service: Marketing, Operations and Human Resources, New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs..

Muttaqin Andhyka (2011), Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayan Publik, Jurnal Administratio, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2011, ISSN: 2087-0825

Rony Setiawan (2015), Suryana Sumantri, Tb. Zulrizka Iskandar, Marina Sulastiana, Pengaruh Kepemimpinan Pelayan terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi, Prosiding Seminar Psikologi & Kemanusiaan, 2015, Psychology Forum UMM, ISBN: 978-979-796-324-8,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur, 2015-2019, Pemda Jatim, 2014

Shinta Tomuka (2013), Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli), Jurnal Politico, Prog. Studi Ilmu Politik, FISIPakulas Ilmu Sosial dan Politik, Unisrat, Manado Vol. 1, No. 3 th. 2013, ISSN. 2302-5603

Soebekti, R. Tobias, (1964), Some Facets of the Income Tax Administration in, Indonesia with reference to those in the United States, disertasi untuk mengambil gelar doktor di University Indiana, September 1964, (tidak dipublikasikan)

Surpha, I Wayan (2004), Eksistensi Desa Adat dan desa Dinas di Bali, Denpasar: Pustaka Bali Post

- Sudantra, I Ketut (2001), "Pola Penyelesaian Persoalan-persoalan Hukum Hukum Oleh Desa Adat". Dinamika Kebudayaan III (1), Denpasar: Lembaga Penelitian Universitas Udayana
- Thoha Miftah (1991), Perspektif perilaku birokrasi dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tia Muthiah Umar (2012), Menggagas Pencitraan berbasis Kearifan Lokal, Prosiding Seminar Nasional Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 26 September 2012, ISSN. 12110613
- Walholf (1960), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas
- Yeny (2013), Penerapan Prinsip – Prinsip Good governance Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. E-Journal Ilmu Administrasi Negara, Vol 1 no. 2 tahun 2013, ISSN 196-209, Universitas Mulawarman



## **Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung**

**Dedy Hermawan  
Simon Sumanjoyo Hutagalung**

**Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas  
Lampung**

### **PENDAHULUAN**

Dalam mewujudkan pemerintahan di daerah khususnya pelaksanaan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat daerah yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan daripada partisipasi masyarakat yang dipaksakan, karena hal ini merupakan awal kemandirian dan pengembangan kompetensi dalam pemerintahan. Partisipasi yang didorong oleh pemerintah juga menandakan tidak adanya dominasi ataupun hegemoni dalam pemerintahan tersebut (Kleden, 2004).

Pemerintahan tidaklah terlaksana dengan efektif jika tidak didukung oleh masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan rasa kesadaran yang memberi pengaruh pada perkembangan pemerintahan (Mansuri & Rao, 2012). Dalam konteks partisipasi, masyarakat sebagai individu berkinerja secara optimal guna mendukung kebijakan pemerintah. Secara kolektif, masyarakat bekerja secara bersama mendorong pencapaian kebijakan pemerintah agar mencapai hasil yang optimal. Secara individu dan kolektif saling memiliki keterkaitan dalam konteks partisipasi (Pelencia, Bassile, & Ceruti, 2015).

Pemerintah mendorong pembangunan di daerah melalui beberapa program yang mengandung muatan partisipasi. Namun demikian, wujud berbeda ditemukan dalam implementasi kebijakan dan program di beberapa sektor, dalam sektor pendidikan misalnya partisipasi muncul dalam wujud pemilihan anggota komite sekolah, perencanaan bersama antara komite sekolah dan pihak sekolah (Menno, et al., 2014). Dalam pengelolaan sampah partisipasi berwujud kesadaran kolektif untuk memilah sampah, mendaur ulang dan merubah sampah menjadi kompos (Dhokhikah, Trihadiningrum, & Sunaryo, 2015), pengentasan kemiskinan (Apriyanti, 2011) dan pengelolaan hutan (Alfitri, 2005). Partisipasi yang bersifat

terencana dan teorganisir juga muncul dalam program-program pembangunan infrastruktur di pedesaan dan perkotaan.

Berbagai program partisipasi tersebut menunjukkan gejala yang berbeda, termasuk memunculkan partisipasi semu, partisipasi administratif atau bahkan gagal mengadakan partisipasi (Muslim, 2017). Hal itu sekaligus mengindikasikan terjadinya perbedaan antara partisipasi organik (usaha endogen oleh aktivis masyarakat untuk menghasilkan perubahan) dan partisipasi yang diinduksi (upaya berskala besar untuk merancang partisipasi di tingkat lokal melalui program dan proyek) (Mansuri & Rao, 2012). Dalam konteks lain, partisipasi yang terjadi juga nampak masih belum mampu menguatkan relasi antara agensi kolektif dan kapabilitas kolektif yang menggerakkan kelompok sasaran program untuk melaksanakan proses partisipasi (Pelencia, Bassile, & Ceruti, 2015).

Dalam aspek relasi tersebut, maka partisipasi yang terjadi dalam lingkup lokal menarik untuk dikaji. Jika partisipasi mencakup pelibatan personal dan kelompok, mengapa partisipasi dalam program pemerintah senantiasa menghadapi kondisi tidak optimalnya capaian partisipasi yang dikehendaki. Dengan berusaha membatasi wilayah penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang tercipta dalam proses pelaksanaan program pemerintah daerah? (2) Apa saja faktor-faktor potensial perilaku masyarakat yang menghambat atau mendorong keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program partisipasi pada pemerintah daerah? dan (3) Bagaimanakah model partisipasi masyarakat yang berbasis perilaku masyarakat dalam proses pelaksanaan program pada pemerintah daerah?

## Tinjauan Pustaka

Partisipasi merupakan salah satu fundamen pokok dalam sistem yang demokratis. J.S. Mill pada 1861 telah mengemukakan partisipasi sebagai pembuktian bagi pemerintah untuk memuaskan seluruh komponen negara dimana seluruh rakyat dapat ikut serta; bahwa partisipasi, bahkan dalam fungsi pengelolaan publik yang paling terkecil, menjadi berguna; bahwa partisipasi seharusnya terdapat dimanapun sebagai kesepakatan umum dalam upaya pengembangan komunitas yang hendak dilakukan (Arblaster, 1987: 63; Bochel, 2006: 11).

Partisipasi sebagai sebuah prasyarat masyarakat yang demokratis merupakan sebuah premis, bahwa agar masyarakat menjadi demokratis, maka harus terdiri dari institusi yang benar-benar partisipatif (Foltz, 1999). Penggunaan kewenangan dan kekuasaan untuk mengendalikan keputusan teknis menunjukkan lingkup dimana publik dikeluarkan dari pergerakan yang dapat mempengaruhi nasib masyarakat. Masyarakat perlu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam institusi tersebut dalam cara yang substantif. Karenanya, meningkatkan level partisipasi dapat membuat institusi tersebut lebih baik (Foltz, 1999).

Sementara itu, Pretty (1995) dalam (Syahri, 2016) mengutarakan bahwa sesungguhnya ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal. yaitu: (1) Partisipasi pasif atau manipulatif. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program (Gustavsson, Lindström, Jiddawi, & De La Torre-Castro, 2016). (2) Partisipasi informatif. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian (Ford & King, 2015). Akurasi hasil penelitian, tidak dibahas bersama masyarakat. (3) Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. Belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama (Ford & King, 2015). (4) Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan (Adhikari, Kingi, & Ganesh, 2014). (5) Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya (DiPaola & Tschannen-Moran, 2014). (6) Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan (Conole, 2015). (7) Mandiri (*self mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung.

Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan (Lilleker & Koc-Michalska, 2017).

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pembangunan dengan sistem swadaya, partisipasi turut mendorong dan memperlancar proses pembangunan. Kaitannya dengan partisipasi dalam pembangunan menurut Slamet (1980) dalam (Panggabean, 2013), partisipasi didefinisikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembangunan, yang dapat berupa bantuan tenaga, materi, dana, keahlian, gagasan, alternatif dan kepuasan, dan ikut menikmati hasil pembangunan seperti yang dimaksud oleh tujuan pembangunan itu.

Sedangkan menurut Madrie (1988), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut mendapat keuntungan dan proses dan hasil pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Irwan Effendi, 2012:8). Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah masyarakat ikut serta dalam pembangunan guna meningkatkan, memperlancar, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan, masyarakat diharapkan untuk ikut serta karena hasil pembangunan yang dirancang dan diselenggarakan dirnaksudkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam rangka kegiatan yang konstruktif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik.

Perilaku dalam kegiatan partisipasi pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan (Winardi, 2004). Berikut merupakan definisi perilaku sebagai hasil dari konstruksi teori-teori dan riset, sebagai berikut:

- a. Perilaku merupakan sesuatu yang disebabkan karena sesuatu hal
- b. Perilaku ditunjukan ke arah sasaran tertentu
- c. Perilaku yang dapat diobservasi dapat diukur

- d. Perilaku yang tidak langsung dapat di observasi (contoh berpikir, melaksanakan persepsi) juga penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan
- e. Perilaku dimotivasi

Skinner (1938) dalam (Muller, 2015) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar), oleh karena perilaku itu terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespons. Respons dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) respondent respons atau reflexive, yaitu respons yang timbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Misalnya cahaya terang menyebabkan mata tertutup. Respons ini mencakup perilaku emosional, misalnya mendengar berita musibah menjadi sedih, dan (b) operant respons atau instrumental respons, yaitu respons yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perilaku tersebut akan mendorong terjadinya partisipasi dalam tingkatan yang berbeda.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell dalam Herdiansyah (2010:8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun. Kajian ini juga menerapkan *Socio Legal Analysis*, yang berupaya mengetahui penerapan dari peraturan perundangan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kebijakan publik.

Fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain: (1) Kategorisasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program atau kebijakan pada pemerintah daerah dapat dianalisis dengan mengidentifikasi dan menganalisa keberhasilan dan kegagalan praktek-praktek partisipasi masyarakat yang sudah dilaksanakan dalam beberapa program dan kebijakan pemerintah. (2) Faktor-faktor potensial perilaku masyarakat yang menghambat atau mendorong keberhasilan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan program partisipasi pada pemerintah daerah dapat dianalisis dengan mengidentifikasi dan menguraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan praktek partisipasi masyarakat dalam beberapa program atau kebijakan pemerintah, dan (3) Model partisipasi masyarakat yang berbasis perilaku masyarakat dalam proses pelaksanaan program pemerintah daerah dapat dianalisis dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, mencari keterkaitan dan menyimpulkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang menghambat atau mendorong keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program atau kebijakan publik.

Dalam penelitian kualitatif ini diterapkan beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan, antara lain studi data sekunder dan observasi. Sementara itu teknik analisis data diarahkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan pada proposal ini. Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman (1992:148) dengan menggunakan tiga komponen analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Bentuk Partisipasi dan Faktor Penentu Keberhasilan Program Partisipasi Masyarakat

Dalam penelitian ini dipilih tiga program pemerintah yang dilaksanakan pada masing-masing pemerintah daerah, yaitu:

1. Program Gemma Sewu Bersenyum Manis di Kabupaten Pringsewu
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung
3. Program Promosi Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur

Program tersebut dipilih secara *purposive* berdasarkan karakteristik anggaran, cakupan kegiatan dan format pelaksanaan kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing program. Program Gemma Sewu Bersenyum Manis merupakan program unggulan Bupati Pringsewu yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan fisik dan ekonomi serta menjadikan partisipasi masyarakat sebagai penilaian keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berada pada tangga partisipasi yang paling rendah yakni *non participation*. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat mampu menggerakkan

sumber daya dan dana namun lemah koordinasi serta belum dapat menjabarkan program. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan adalah partisipasi vertikal yakni masyarakat terlibat dalam suatu program dan statusnya sebagai pelaksana dari program tersebut. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa kendala mulai dari pemahaman masyarakat, kurangnya dana, air dan juga lemahnya koordinasi dalam pelaporan kegiatan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat. Sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perkotaan ini lebih mengutamakan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui partisipasi yang aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan; partisipasi dalam tahap pelaksanaan; Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil; dan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini sudah ada meskipun belum menyeluruh. Partisipasi masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan cukup baik dan partisipasi masyarakat menurut peneliti tergolong partisipasi dengan tipologi kemitraan (*partnership*). Pada tahap partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar yakni kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun *monitoring* atau evaluasi.

Program Promosi Kesehatan di Lampung Timur menjadi jawaban atas kebutuhan pokok kesehatan masyarakat yang dapat dikatakan vital, karena semua warga negara baik yang kaya atau yang miskin berhak dan layak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menggambarkan proses pemberdayaan dan mekanisme pengelolaan dana sehat dilakukan oleh kepala bidang promosi kesehatan yang di dampingi oleh bidan desa, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi ke masyarakat Desa Margosari oleh aparatur Desa dan sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas kegiatan dana sehat.

Keberhasilan proses pemberdayaan dan mekanisme pengelolaan dana sehat di dukung oleh adanya modal sosial yang ada pada masyarakat, yang terdiri dari kesadaran diri yang tinggi, dan rasa solidaritas serta kerjasama yang baik dalam meningkatkan standar kesehatan. Partisipasi pada program ini berada pada tangga partisipasi yang bersifat *risk taking*, dimana proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan.

Dari ketiga program tersebut dapat dianalisis beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dan pendorong pencapaian keberhasilan program partisipasi. Identifikasi tersebut dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1. Identifikasi Faktor Penghambat atau Pendorong Keberhasilan Program Partisipasi Masyarakat di Provinsi Lampung

No	PNPM Mandiri Perkotaan	Program Dana Sehat	Program Gemma Sewu Bersenyum Manis
1	Keterbatasan dana. Dana untuk kegiatan pembangunan (fisik) dirasa kurang dan dana yang diberikan terbagi jadi tiga tahap yang membuat pembangunan terhenti sementara.	Kesadaran Diri dan Solidaritas. Kesadaran diri yang tinggi dari individu-individu yang mengikuti kegiatan dana sehat ini, dan juga solidaritas yang tinggi serta kerjasama yang baik dalam meningkatkan standar kesehatan.	Aparatur yang Responsif. Aparatur desa yang responsif dan juga Pokmas yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya.
2	Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat. Masyarakat yang menganggap bahwa PNPM Mandiri Perkotaan merupakan	Manfaat yang Langsung Terasa. Kegiatan dana sehat juga sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Margosari yang	Pemahaman masyarakat terhadap Program Gemma Sewu Bersenyum Manis yang salah. Masyarakat yang menganggap program



	proyek saja dari pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi.	menjadi anggotanya, selain dapat meringankan beban saat sedang tertimpa musibah,	ini sebagai proyek sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi.
3	Lemahnya Pemahaman Masyarakat. Lemahnya pemahaman masyarakat pada saat pembuatan laporan administrasi yang dikarenakan tidak semua warga memiliki pendidikan yang cukup.	Dampak Yang Terasa. Kegiatan dana sehat ini juga meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kesehatan itu penting, dan kekeluargaan juga penting, sehingga harus saling menjaga kesehatan bersama.	Pendanaan yang Kurang. Dana stimulan kegiatan ekonomi kerakyatan dirasa kurang karena dana ini harus dibagikan untuk dua kelompok usaha
4	Kesibukan Masyarakat. Kesibukan masyarakat yang tidak bisa meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan, padahal kegiatan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.		Kordinasi Masih Lemah. Lemahnya koordinasi antara Pokmas dengan PMD terkait laporan kegiatan

Sumber: Analisis Peneliti, 2017.

Dari identifikasi terhadap factor-faktor tersebut, dapat disimpulkan adanya dua aspek, yaitu kelembagaan penyelenggara program dan aspek perilaku masyarakat yang cenderung belum optimal mendukung pelaksanaan program sehingga tidak mengarah kepada penciptaan

partisipasi yang efektif. Oleh karena itu diperlukan model partisipasi yang berbasis kepada perilaku masyarakat sehingga dapat mendorong pencapaian partisipasi menjadi lebih efektif.

### **Model Partisipasi Berbasis Perilaku dalam Pelaksanaan Program Pemerintah**

Sebagai dasar untuk membangun model partisipasi, maka perlu dianalisa dahulu faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat. Faktor tersebut menurut Slamet dalam Soleh (2014: 118-119), yakni: *pertama*, kepercayaan atau kesempatan untuk berpartisipasi yang meliputi; kemauan politik pemerintah atau penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan saat merencanakan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan hasil, kesempatan untuk memperoleh akses informasi yang diperlukan, kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan, kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat termasuk peralatan/perlengkapan lainnya, kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk mengakses dan menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan dan kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, mengembangkan dan memelihara partisipasi. Faktor pertama ini bisa dicermati dalam program gema bersewu manis yang berada pada tahap *non- participation*, kondisi tersebut didorong oleh kurangnya kepercayaan atau kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi.

*Kedua*, kemampuan untuk berpartisipasi. pemberian kesempatan/kepercayaan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti jika masyarakat sendiri tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan pembangunan. kemampuan yang dimaksud adalah; kemampuan untuk memahami dan menemukan kesempatan untuk membangun atau pengetahuan pengetahuan tentang peluang untuk memperbaiki mutu kehidupannya, kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan yang berarti berkenaan dengan pengetahuan dan penguasaan teknologi atau keterampilan yang harus dimiliki dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan peluang yang tersedia secara optimal. Faktor kedua ini bisa dicermati dalam pelaksanaan program

PNPM perkotaan, dimana masyarakat masih memiliki pemahaman yang lemah terhadap partisipasi dalam program tersebut sehingga pada akhirnya meskipun telah terjadi partisipasi dengan tipe kemitraan namun belum optimal.

*Ketiga*, kemauan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang bersangkutan. Kepentingan inilah yang akan menentukan sikap dan perilakunya apakah ia memutuskan untuk ikut berpartisipasi atau tidak. Kemauan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersangkut paut dengan; (1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang lama yang dinilai menghambat perbaikan kualitas hidup, (2) Sikap dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah/penguasa, dan (3) Sikap untuk selalu ingin maju dari kondisi sekarang atau tidak puas dengan keadaan sekarang, (4) Sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah bersama, dan (5) Sikap kemandirian atau kepercayaan diri atas kemampuan untuk memperbaiki mutu kehidupannya. Faktor ketiga ini bisa diamati terjadi dalam pelaksanaan program promosi kesehatan dimana masyarakat tertarik untuk berpartisipasi karena diyakinkan kepentingan mereka akan kondisi kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu dapat dipahami jika tingkatan partisipasi yang dicapai adalah pada tahap *risk-taking*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dapat berasal dari dalam individu yakni kemauan dan kemampuan, serta dari luar individu itu sendiri seperti pemerintah, ekonomi dan jugalegalitas.

### **Model Pengelolaan Program Partisipasi Berbasis Perilaku**

Model pengelolaan partisipasi berbasis perilaku dibangun dengan mengadopsi konsep *community engagement* dan *personal engagement*. *Personal engagement* adalah ekspresi diri secara fisik, kognitif, dan emosional selama bekerja. Individu yang *engaged* memahami penuh baik secara fisik, kognitif dan emosional dalam peran kerjanya (Herbert, 2011). Pendapat lain dikemukakan oleh Macey & Schneider (2008) mendefinisikan *engagement* sebagai *“an individual’s sense of purpose and focused energy, evident to others in the display of personal initiative, adaptability, effort, and persistence directed toward organizational goals”*, bila diartikan *engagement* menurut Macey dan Schneider (2008) adalah rasa seseorang terhadap tujuan dan energi yang terfokus,

memperlihatkan inisiatif pribadi, dapat beradaptasi, berusaha, dan tekun terhadap tujuan organisasi. *Engagement* merupakan suatu pengalaman energik dari keterlibatan dengan aktifitas pemenuhan secara personal yang dikarakteristikan melalui *energy*, *involvement*, dan *professional efficacy* yang merupakan lawan dari tiga karakteristik *burnout* (Demerouti & Bakker, 2007).

Albrecht (2010) berpendapat bahwa *engagement* mencerminkan dua kualitas: (1) suatu *state* motivasi positif dan berenergi yang berhubungan dengan pekerjaan, dan (2) keinginan murni untuk berkontribusi peran kerja dan kesuksesan organisasi. Definisi *engagement* membutuhkan perbedaan yang jelas dari konstruk yang dikonseptualisasikan lebih baik sebagai anteseden atau “*driver*”/pendorong *engagement*. Dari kesemua definisi tersebut disepakati bahwa *engagement* adalah sesuatu yang diinginkan, memiliki tujuan organisasi serta memiliki aspek psikologis dan perilaku yang melibatkan energi, antusiasme, dan usaha yang terfokus (Herbert, 2011). Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan jika *engagement* sebagai cara pandang seseorang untuk termotivasi dan berhubungan dengan keadaan pemenuhan individu yang ditandai dengan energi dan resiliensi mental yang tinggi selama bekerja, rasa antusiasme, merasa penting serta bangga terhadap pekerjaan, dan fokus menikmati pekerjaan.

Pada dimensi individu, bangunan model partisipasi berbasis perilaku masyarakat terkait dengan konsepsi *personal resources* yang merupakan prediktor *work engagement*. *Personal resources* merupakan evaluasi diri positif yang berhubungan dengan resiliensi dan mengacu pada rasa kemampuan individu untuk mengontrol serta berdampak sukses dalam lingkungannya (Hobfoll, 2002; Herbert, 2011). *Personal resources* menunjukkan bahwa beberapa evaluasi diri positif memprediksi *goal-setting*, motivasi, kinerja, kepuasan kerja, kepuasan hidup, dan hasil menarik lainnya. Alasannya adalah bahwa semakin besar sumber daya pribadi individu, semakin positif pula diri individu dan tujuan keharmonisan diri diharapkan muncul (Judge, 2005; Herbert, 2011). Kata kunci dalam uraian tersebut adalah perlunya penguatan *self-efficacy* dalam desain program partisipasi.

*Self-efficacy* adalah keyakinan kemampuan seseorang untuk mengorganisir dan mengeksekusi bagian-bagian dari tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian (Bandura, 1997). Selain itu,

Schultz & Schultz (1994) mendefinisikan *self-efficacy* sebagai perasaan terhadap kecukupan, efisiensi, dan kemampuan diri dalam mengatasi kehidupan. Baron dan Byrne (1994) mengemukakan bahwa *self-efficacy* merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Menurut Bandura (1997), proses psikologis dalam *self-efficacy* yang turut berperan dalam diri manusia ada empat, yakni proses kognitif, motivasional, afeksi, dan proses pemilihan/seleksi. Keempat proses inilah yang kemudian perlu diakomodasi dalam desain program yang berbasis partisipasi masyarakat.

Pada dimensi komunitas, pendekatan *community engagement* adalah serangkaian langkah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menangani masalah (Swainston & Summerbell, 2008). Seperti membentuk koalisi, atau memfasilitasi lokakarya masyarakat. Terdapat tiga jenis utama prakarsa keterlibatan masyarakat, dengan beberapa inisiatif yang saling tumpang tindih antara kategori (Attree et al, 2011): (1) Inisiatif berbasis wilayah yang menargetkan disparitas sosial dan ekonomi, (2) Inisiatif berbasis orang yang bertujuan untuk melibatkan populasi terpinggirkan, dan (3) Inisiatif berbasis koalisi yang bertujuan memanfaatkan kekuatan dari kelompok kepentingan. Tipologi inisiatif ini akan muncul secara berbeda pada jenis-jenis program partisipasi yang di desain dengan karakteristik dan tujuannya masing-masing. Inisiatif tersebut nantinya berkisar pada tingkat keterlibatan, konsultasi, hingga wewenang yang didelegasikan dalam perencanaan dan perancangan, untuk menjalankan tata kelola bersama atau kerja sama.

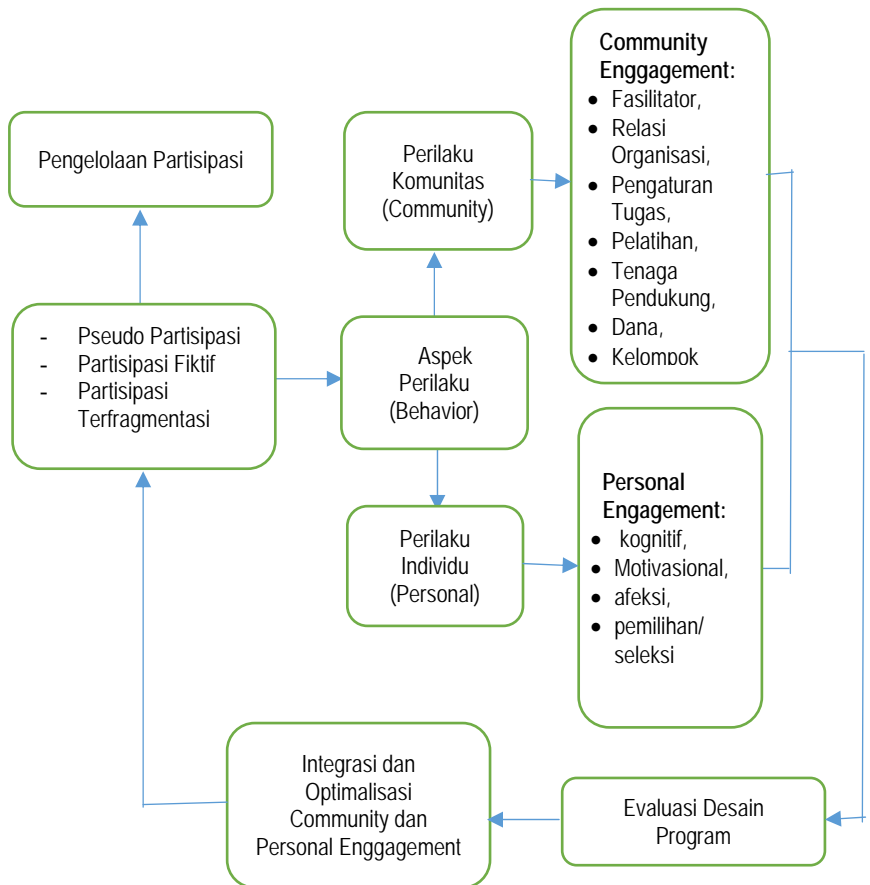
Pusat Study Etnis & Kesehatan di Inggris, sekarang dikenal sebagai International School for Communities, Rights, and Inclusion (ISCRI), mengembangkan model keterlibatan masyarakat dari pekerjaan mereka dengan komunitas etnis kulit hitam dan minoritas. Tujuan dari model ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil di mana individu, organisasi, dan lembaga dapat bekerja sama untuk menangani masalah yang menjadi perhatian bersama. Model ini telah digunakan oleh Center for Ethnicity and Health di lebih dari 170 proyek, dengan tingkat keberhasilan yang beragam (Fountain et al, 2007).

Dalam aspek *community engagement* pada desain program partisipasi, terdapat beberapa poin utama untuk memastikan keberhasilan penerapan model, yaitu:

1. Seorang fasilitator yang akan mengiklankan, merekrut, dan memilih organisasi masyarakat untuk berpartisipasi; Menyediakan dan mendukung tim staf; dan mendorong partisipasi antar dan intra-masyarakat
2. Organisasi masyarakat tuan rumah yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat sasaran
3. Tugas yang berarti, terbatas waktu dan mudah dikelola. Ini bisa menjadi salah satu atau semua lingkaran dalam diagram model, yang menghubungkan komunitas dan lembaga dalam hubungan kerja yang adil
4. Pelatihan anggota organisasi masyarakat sebagai koordinator proyek
5. Project support worker yang memberikan dukungan kepada masyarakat, seperti yang diarahkan oleh fasilitator
6. Dukungan dana untuk kegiatan proyek dan personil
7. Kelompok pengarah yang harus menyertakan perencana dan penyedia layanan/program setempat

Dalam konteks pengelolaan program partisipasi masyarakat, model yang mencakup kedua dimensi; dimensi personal dan dimensi komunitas diarahkan kepada perubahan sikap individu dan kelompok dari internal mereka sendiri. Karena perubahan yang didorong dari internal diri dan organisasi akan memberikan efek yang berjangka panjang.

Dari uraian tersebut maka dapat digambarkan model pengelolaan partisipasi berbasis perilaku tersebut sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pengelolaan Program Partisipatif Berbasis Perilaku Masyarakat (Hermawan.et all, 2017)

Model ini bertujuan untuk mengintervensi desain program yang kurang berhasil menciptakan partisipasi masyarakat yang optimal dengan lebih memaksimalkan aspek perilaku individu dan kelompok masyarakat. Perilaku individu dan kelompok yang terpahami dengan baik oleh desain program

akan mendorong daya terima dan arah penciptaan partisipasi menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, model ini perlu diuji melalui suatu eksperimen social yang mensimulasikan program dengan penguatan dimensi *engagement*.

### Kesimpulan

Tipologi partisipasi yang muncul dalam pengelolaan program partisipasi masyarakat berada pada area *non-participation*, risk taking dan kemitraan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh variasi implementasi program yang memiliki desain pelaksanaan berbeda. Pada program yang telah terancang baik, seperti PNPM Perkotaan telah mencapai tingkat kemitraan meskipun belum optimal menggerakkan partisipasi masyarakat. Sementara pada program yang tidak terdesain dengan baik, seperti program gema sewu bersenyum manis menunjukkan tingkat *non-participation* disebabkan desain program yang lebih berorientasi proyek, sehingga aspek partisipasi tidak terbangun.

Kondisi partisipasi yang terjadi didorong juga oleh factor perilaku masyarakat yang terdiri dari tiga wujud factor, yaitu: (1) Kepercayaan atau kesempatan untuk berpartisipasi. Faktor pertama ini bisa dicermati dalam program gema bersewu manis yang berada pada tahap *non-participation*, kondisi tersebut didorong oleh kurangnya kepercayaan atau kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi, (2) Kemampuan untuk berpartisipasi. Faktor kedua ini bisa dicermati dalam pelaksanaan program PNPM perkotaan, dimana masyarakat masih memiliki pemahaman yang lemah terhadap partisipasi dalam program tersebut sehingga pada akhirnya meskipun telah terjadi partisipasi dengan tipe kemitraan namun belum optimal, dan (3) Kemauan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang bersangkutan. Faktor ketiga ini bisa diamati terjadi dalam pelaksanaan program promosi kesehatan dimana masyarakat tertarik untuk berpartisipasi karena diyakinkan kepentingan mereka akan kondisi kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu dapat dipahami jika tingkatan partisipasi yang dicapai adalah pada tahap *risk taking*.

Model pengelolaan partisipasi berbasis perilaku dibangun dengan mengadopsi konsep *community engagement* dan *personal engagement*. Pada dimensi individu, bangunan model partisipasi berbasis perilaku masyarakat terkait dengan konsepsi *personal resources* yang merupakan prediktor *work engagement*. Kata kunci dalam uraian tersebut adalah



perlunya penguatan *self-efficacy* dalam desain program partisipasi. Proses perilaku dalam *self-efficacy* yang turut berperan dalam diri manusia ada empat, yakni proses kognitif, motivasional, afeksi, dan proses pemilihan/seleksi. Keempat proses inilah yang kemudian perlu diakomodasi dalam desain program yang berbasis partisipasi masyarakat. Pada dimensi komunitas, pendekatan *community engagement* adalah serangkaian langkah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menangani masalah, seperti membentuk koalisi, atau memfasilitasi lokakarya masyarakat. Dalam aspek *community engagement*, pada desain program partisipasi, terdapat beberapa poin utama untuk memastikan keberhasilan penerapan model, yaitu; fasilitator, relasi organisasi, pengaturan tugas, pelatihan, tenaga pendukung, dana, dan kelompok pengarah.

## Referensi

- Adhikari, S., Kingi, T., & Ganesh, S. (2014). Incentives for community participation in the governance and management of common property resources: the case of community forest management in Nepal. *Forest Policy and Economics*, 1-9.
- Alfitri. (2005). Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). *Indonesian Journal For Sustainable Future*, 29-42.
- Apriyanti. (2011). *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)*. Semarang: Undip.
- Arblaster, A. (1987). *Democracy (Concept in a Social Science)*. Bristol: Open University Press.
- Bochel, C. (2006). New Labour, Participation and the Policy Process . *Public Policy and Administration*, 10-22.
- Conole, G. G. (2015). MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. *Revista de Educación a Distancia*, 39.
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling*, 153-162.
- DiPaola, M., & Tschannen-Moran, M. (2014). Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. *Journal of School Leadership*, 424-447.

- Ford, J. D., & King, D. (2015). A framework for examining adaptation readiness. . *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 505-526.
- Franz, F. (1999). Five Arguments for Increasing Public Participation in Making Science Policy . *Buletin of Science, Technology and Society*, 117-127.
- Gustavsson, M., Lindström, L., Jiddawi, N. S., & De La Torre-Castro, M. (2016). Procedural and distributive justice in a community-based managed Marine Protected Area in Zanzibar, Tanzania. *Marine Policy*, 91-100.
- Kleden, I. (2004). *Masyarakat dan negara: sebuah persoalan*. Jakarta: Penerbit Agromedia Pustaka.
- Lilleker, D. G., & Koc-Michalska, K. (2017). What drives political participation? Motivations and mobilization in a digital age. *Political Communication*, 21-43.
- Mansuri, G., & Rao, V. ( 2012). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington: World Bank Publications.
- Menno, P., Suryadarma, D., Beatty, A., Wong, M., Gaduh, A., Alisjahbana, A., & Artha, R. P. (2014). Improving Educational Quality through Enhancing Community Participation: Results from a Randomized Field Experiment in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 105-126.
- Muller, E. N. (2015). *Aggressive Political Participation*. Princeton: Princeton University Press.
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 79-87.
- Panggabean, R. (2013). Penyuluhan Perkoperasian Dan Ukm. *INFOKOP*, 120-129.

- Pelenc, J., Bassile, D., & Ceruti, C. (2015). Collective capability and collective agency for sustainability: A case study. *Ecological Economics*, 226-239.
- Syahri, M. (2016). Bentuk – Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 109-136.
- Winardi, J. (2004). *Manajemen perilaku organisasi*. Jakarta: Prenada Media.

# **Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita): Upaya Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum melalui Pendaftaran Tanah**

**Nurma Khusna Khanifa**

**Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Di Wonosobo**

## **PENDAHULUAN**

Melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan dan Masyarakat pada tahun 1999/2000, ditemukan bahwa terdapat 4 (empat) sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu sektor perumahan, industri dan perdagangan, kependudukan dan pertanahan. Dalam sektor-sektor tersebut, antara 56 - 70% pegawainya dituding menerima suap oleh para responden yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dan perubahan. Sistem kerja birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah didorong untuk menuju kearah yang lebih baik. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi (internet), yang sering dinamakan dengan *e-government*. Melalui pengembangan *e-government*, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Salah satu institusi pemerintah yang sukses menerapkan *e-government* sebagai salah satu basis pelayanan publiknya adalah Badan Pertanahan Nasional dengan mengusung sebuah program bertajuk Larasita. Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, atau disingkat Larasita, merupakan kantor pertanahan bergerak (*mobile*) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan yang berlaku di kantor pertanahan. Larasita beroperasi dengan sistem "jemput bola" langsung mendatangi masyarakat.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria, yang kemudian pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009

tentang Larasita BPN RI. Selain itu, pencetusan ide mengenai Larasita tidak terlepas dari penjabaran mengenai Rencana Strategis BPN RI 2007-2009 dengan slogan *“Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat”* dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh.

Dimulai pada tahun 2006, ternyata sambutan masyarakat mengenai Larasita sangat bagus. Tahun pertama, jumlah masyarakat yang mendaftarkan sertifikat melalui Larasita mencapai 8000 pemohon dimana jumlah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2000 pemohon. Melihat fenomena ini, kemudian ujicoba Larasita berkembang di 20 Kota atau Kabupaten lainnya di Indonesia. Hasilnya, sebanyak 195.948 bidang tanah sudah disertifikasi dan sebanyak 205.000 akan disertifikasikan tahun 2009. Pada tanggal 16 Desember 2008 akhirnya resmialah Program Larasita ini diluncurkan di Candi Prambanan, Klaten Jawa Tengah oleh Presiden SBY. (Hastanto, Suara Merdeka:2009)

Terhitung tahun 2008 program ini (Larasita) dikembangkan secara nasional, dan pada akhir tahun 2008 telah siap sebanyak 124 armada Larasita dan 248 sepeda motor yang akan beroperasi di 124 Kabupaten atau Kota di seperempat wilayah Indonesia. Program ini telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya *pioneering mobile land information services*. Tahun 2009, sudah dibangun lagi Larasita di 134 Kabupaten atau Kota lainnya di Indonesia. Dengan demikian pada akhir tahun 2009 lebih dari 60 persen wilayah Indonesia terlayani Larasita (Joyo Winoto, Kepala BPN, Kompas: 2009).

Data yang saya ambil pada tahun 2015 dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu 98.467,93 Ha tanah yang telah bersertifikat seluas 31.177,22 Ha atau sekitar 31,79 % , hal tersebut mengisyaratkan bahwa dibutuhkan upaya dan strategi untuk pembenahan administrasi serta memacu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai salah satu alat atau bukti kepemilikan tanah yang sah. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:150).

Masih rendahnya prosentase kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2015 dapat terlihat dari 625.458 bidang yang ada, yang sudah bersertifikat sebanyak 134.896 bidang atau 20,72 % , akan tetapi apabila dilihat dari sisi luasan tanah maka prosentase tanah yang telah bersertifikat di Kabupaten Wonosobo

mengalami peningkatan sebesar 1,09 % dibandingkan tahun 2014, dan hal tersebut memacu upaya untuk meningkatkannya. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:151).

Akibatnya Polemik yang dihadapi di Kabupaten Wonosobo saat ini ialah permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, terutama yang bersinggungan dan berhubungan dengan aset pemerintah daerah. Guna meningkatkan tertib administrasi pertanahan yang menyangkut aset pemerintah daerah khususnya tanah maka sampai dengan tahun 2015 ini pemerintah telah berupaya dengan melakukan pensertifikatan tanah menjadi atas nama pemerintah Kabupaten secara bertahap. Dari 1.125 bidang tanah yang ada yang telah bersertifikat sebanyak 648 bidang atau 57,6 %, terdiri dari tanah yang bersertifikat Hak Pakai sejumlah 633 bidang, Hak Milik 13 bidang, dan Hak Pengelolaan 2 bidang, sedangkan 477 bidang atau 42,4% belum bersertifikat yang sebagian besar adalah tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:152).

Dari sinilah peneliti ingin mengembangkan program Larasita yang dikembangkan khususnya di Wonosobo karena sampai saat ini kurangnya kesadaran memunculkan konflik mengakibatkan persengketaan mengenai kepastian hukum atas hak tanah.

### **Tinjauan Pustaka**

Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Wonosobo Tahun 2016 yang telah direvisi dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA Nomor 056.06.2.350804/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Kegiatan Inventarisasi P4T dimaksud sebagai upaya untuk memperoleh data Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berbasis bidang tanah serta mempunyai kekuatan hukum secara komprehensif dan sistematis dalam satu hamparan dari seluruh batas yuridis desa, karena sifatnya sistematis, maka hasil kegiatan Inventarisasi P4T dapat mengungkap tentang Penguasaan Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan tujuan tersedianya data P4T yang dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian di bidang pertanahan. Target pelaksanaan kegiatan Inventarisasi P4T Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten

Wonosobo sebanyak 2000 bidang dengan lokasi, yaitu: Desa Mergosari, Kecamatan Wonosobo (Budi Waloyo: 2017).

Hasil pelaksana kegiatan IP4T di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut: Jumlah bidang tanah terdata: 2000 bidang; Jumlah luas tanah terdata: 2.249.400M<sup>2</sup>; Potensi kegiatan pertanahan: Redistribusi, Konsolidasi Tanah, Prona, UKM, SMS, Larasita (Bambang Sugeng Prijanto, 2016:i).

Salah satu arah kebijakan Reforma Agraria/Pembaruan Agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 5 ayat 1 butir b dan c adalah:

- a. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- b. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan regidtrasi penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan Landreform.

Kegiatan IP4T pada dasarnya adalah kegiatan inventarisasi P4T secara sistematis pada semua bidang tanah di Indonesia. Termasuk salah satu kegiatan prioritas nasional sehingga kegiatan IP4T wajib disukseskan pelaksanaannya karena merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mencapai cita lima dari nawa cita visi misi Joko Widodo yaitu melaksanakan reforma Agraria 9 juta Ha untuk rakyat tani/buruh tani.

Kegiatan IP4T adalah kegiatan yang salah satunya adalah penyusunan basis data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) secara komprehensif dan sistematis. Komprehensif dan sistematis bermakna bahwa data-data yang dikumpulkan harus berbasis bidang tanah yang mencakup seluruh bidang tanah dalam satu unit kesatuan batas yuridiksi pemerintahan Desa. Hasil akhir kegiatan Inventarisasi P4T ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

*Pertama*, basis data P4T yang berefrensi lokasi satuan data bidang tanah yang mencakup peta Penguasaan Tanah; Pemilikan Tanah; Penggunaan Tanah; Pemanfaatan Tanah. *Kedua*, hasil analisa berupa informasi P4T yang mencakup Tingkat ketimpangan penguasaan tanah; Tingkat ketimpangan pemilikan tanah; Kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang; Tingkat pemanfaatan tanah; Indikasi tanah-tanah objek



landreform sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, mencakup: tanah-tanah absente; tanah-tanah kelebihan maksimum; tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara; dan tanah-tanah negara lain (bekas tanah partikelir, HGU yang telah berakhir waktunya/dibatalkan, tanah kehutanan yang diserahkan kepada Negara); Potensi masalah landreform; Daftar tanah.

Berdasarkan basis data yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi data P4T tersebut di atas akan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk perumusan kebijakan pengaturan dan penataan pertanahan khususnya kebijakan landreform, sehingga pada gilirannya setiap jengkal bidang tanah diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Landasan Hukum pelaksanaan kegiatan inventarisasi data P4T adalah sebagai peraturan yang berkaitan dengan upaya penataan P4T antara lain: Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

## Metodologi

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu pengembangan program Larasita dalam kerangka kepastian hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah, maka penelitian ini menggunakan metode *research and development*, yaitu mengembangkan program pemerintah yang sudah ada dengan mengevaluasi program kerja tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Media ini menjadi inspirasi dalam memodifikasi kegiatan pemerintah melalui media yang dikembangkan ialah *One Day Service* antara lain (1) Pengecekan Sertifikat; (2) Penghapusan Hak Tanggungan (Roya); (3) Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan; (4) Peningkatan Hak atau Perubahan Hak; (5) Peralihan Hak; (6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); (7) Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko; (8) Pencatatan Sita; dan (9) Pencatatan Blokir.

Tempat penelitian desa Mergosari terdiri atas empat dukuh (Karangsari, Mangunsari, Mergasari, Rejosari), Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo Jawa tengah. Lokasi ini diambil karena indikasi konflik perebutan tanah dan masyarakat masih enggan untuk peduli mensertifikatkan tanahnya. Diharapkan di Kecamatan ini bisa memberi contoh tentang kesadaran masyarakat mengikuti program pemerintah dengan sistem *One Day Service*. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### 1. Keadaan Umum Desa Mergosari

Jumlah penduduk Desa Mergosari pada tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo adalah 2662 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1347 jiwa dan penduduk perempuan 1315 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 650 KK (BPS Wonosobo, 2017: 17).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo luas lahan Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo adalah 314.040 Ha, terdiri dari lahan sawah 30% Ha, dan lahan bukan sawah 45% Ha. Berdasar hasil digitalisasi lapangan pada program IP4T 2016 jumlah luas tanah yang ada di Desa Mergosari sebanyak 224,94 Ha ((BPS Wonosobo, 2017: 25). Adapun

struktur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Ilyas: 2017) dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1: Stuktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah  
Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

No	Struktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah	KK	Ket
1.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah hanya untuk rumah	115	
2.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah untuk rumah dan pekarangan	200	
3.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian	303	
4.	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah usaha non pertanian	5	
5.	Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tanah dan rumah	2	
6.	Jumlah rumah tangga yang menyewa tanah	25	
7.	Jumlah rumah tangga yang mengandalakan tanah	0	

Sumber data: Kantor Desa Mergosari

Berdasarkan pada pola penggunaan dan pemanfaatan tanah disuatu wilayah dapat menggambarkan sosial ekonomi penduduk yang bersangkutan, maka penggunaan tanah di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari 2000 bidang didominasi oleh penggunaan tanah pertanian kering (tegalan), sedangkan untuk pemanfaatan tanahnya digunakan sebagian besar untuk tanaman, tanaman yang dimaksud seperti padi, sayuran, salak. Sedangkan pemanfaatan yang lain digunakan untuk makam, masjid dan fasilitas umum lainnya.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Pertanian

Pemilikan tanah merupakan hubungan hukum antara subjek dengan subjek hak atas tanah. Hak atas tanah yang dimaksud disini adalah hak atas tanah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Jumlah seluruh bidang tanah yang ada di Desa Mergosari berdasarkan DHKP tahun 2015 sebanyak 2263 bidang, tahun 2016 sebanyak 2282 bidang dan tahun 2017 sebanyak 2344 bidang, sehingga dari tahun 2015 sampai 2017 tersebut berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanian sampai dengan

akhir 2016 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar/bersertipikat baru sebanyak 667 bidang (Samsul Rohman: 2017).

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dilakukan secara sistematis yang artinya seuruh tanah yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat ikut masuk dalam program IP4T yang nantinya tanah-tanah yang belum bersertipikat dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan sertifikasi tanah baik melalui Sertipikat Swadaya (SMS), PRONA, PRODA, UKM, dan LARASITA.

Berdasar hasil pendataan dari 2000 bidang tanah sampai dengan 2017 tidak diketemukan adanya konflik dan sengketa tanah baik fisik maupun yuridis. Konflik, sengketa dan perkara pertanahan bisa dikendalikan secara kekeluargaan tidak melibatkan aparat Desa bahkan BPN. Dari minimnya konflik, sengketa dan perkara pertanahan membuat warga Desa Mergosari bisa memiliki potensi pelaksanaan kegiatan pertanahan secara mudah diantaranya (Sulis: 2017): Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Sertipikat Melalui Program PRONA, UMK, Pertanahan SMS, Larasita.

### **3. One Day Service**

Kurun waktu 2015, 2016 dan 2017 Desa Mergosari belum melaksanakan kegiatan persertipikatan tanah kembali. Data terakhir masyarakat Desa Mergosari mengikuti sertipikat tanah pada tahun 2014 melalui program SMS dan PRONA sejumlah 301 warga. Untuk kegiatan Larasita sendiri Desa Mergosari belum pernah meminta permohonan sertifikat tanah melalui program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah. Akan tetapi Desa Mergosari memiliki potensi Larasita hanya saja banyak masyarakat lebih tertarik pada kegiatan SMS dan PRONA (Budi Waluyo: 2017).

Melihat efektifitas kegiatan reforma agraria sebenarnya Larasita memiliki layanan mudah untuk masyarakat di pedesaan. Salah satu layanannya adalah jemput bola yang memeperikan kemudahan dalam pengurusan tanah, kegiatan dilakukan sebagai upaya simpatik guna melayani warga oleh BPN langsung ke masyarakat.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan Larasita berangkat dari kehendak dan

motifasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masyarakat secara langsung.

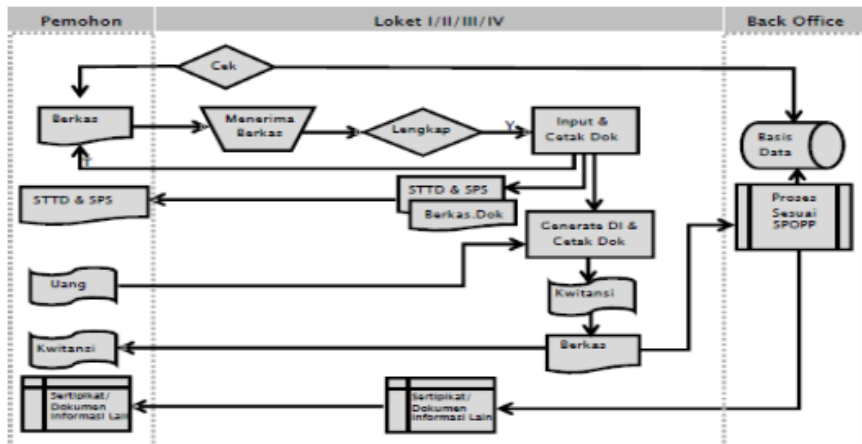
Akan tetapi kegiatan Larasita di Desa Mergosari belum berjalan efektif, belum ada masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya melalui program ini. Banyak masyarakat hanya datang mengikuti kegiatan sosialisasi BPN tentang program Larasita di Balai Desa. Target 2018 untuk Desa Mergosari diusahakan semua tanah yang belum bersertifikat harus sudah bersertifikat melalui program IP4T baik SMS, PRONA, UKM maupun Larasita (Budi Waluyo: 2017).

Untuk menarik minat warga Desa Mergosari kegiatan Larasita akan menggunakan sistem *one day service* kegiatan pengurusan tanah sehari jadi. Layanan seperti itu dimungkinkan *front office mobile* secara *online* dengan BPN. Sistem ini dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Guna mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah itu persyaratan yang diperlukan antara lain (perorangan) fotocopi KTP pemohon, PBB terakhir, surat tanah yang dimiliki apakah itu girik atau verponding, surat keterangan tidak sengketa, dan surat keterangan waris. Karena sistem jemput bola maka warga menunggu di Desa nantinya petugas akan datang ke kantor Desa guna pelayanan dari pendaftaran, pengukuran dan legalisasi tanah.

Dalam mempersingkat layanan Larasita menggunakan sistem *one day service*. Bila sebelumnya untuk mengurus sertifikat, si pemilik tanah paling tidak harus datang 3 kali ke kantor pertanahan di Kabupaten dengan menghabiskan biaya transportasi, maka dengan sistem Larasita biaya itu ditiadakan. Masyarakat juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk para perantara (calo), karena mereka cukup menunggu di Desa dalam waktu sehari jadi.

*One day service* prosedur atau langkah yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan pelayanan pertanahan pada Larasita tidaklah sulit dan berbelit-belit. Dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Layanan ODS (draft 1)

Dibanding mekanisme pelayanan Larasita berdasarkan prosedur BPN yang dirasa sangat sulit dimengerti. Media *one day service* yang diciptakan melalui draft 1 ini lebih sederhana diantaranya: pemohon (warga) menyerahkan berkas. Loket I/II/III/IV berfungsi pengecekan kebenaran dan keaslian, melengkapi berkas, pembayaran, dan penerimaan sertifikat. Terahir *back office* menerima berkas dari *front office* dan diproses sesuai pengajuan pemohon.

Faktor pendorong yang paling utama bagi masyarakat untuk segera memiliki sertifikat tanah dengan adanya program Larasita adalah lebih cepat dan mudah, karena bukan masyarakat pengurus sertifikat tanah yang mendatangi BPN akan tetapi BPN lah yang mendatangi atau jemput bola. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan uji coba dalam pemanfaatan layanan agar meningkatkan kesadaran hukum akan tertib administrasi diantaranya;

#### a. Uji Coba Skala Terbatas

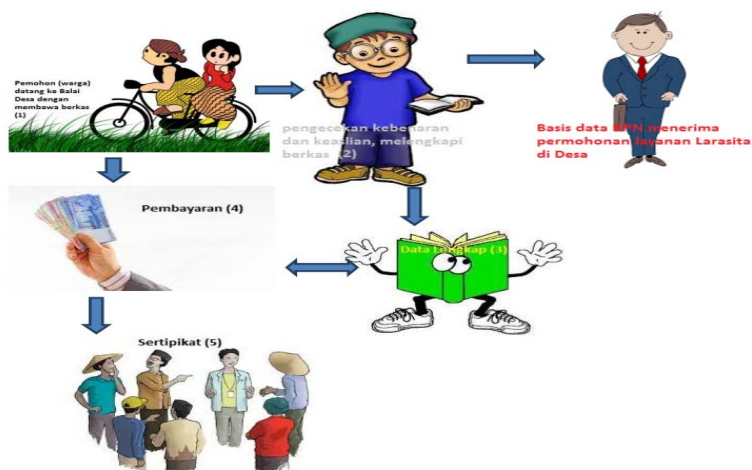
Berdasarkan data DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) tahun 2016 terdapat 2282 yang belum bersertifikat, hanya 667 warga yang sudah bersertifikat, dari 667 terdapat 301 warga yang mengikuti program IP4T SMS dan PRONA. Kegiatan sertifikasi tanah di Desa Mergosari terahir diadakan tahun 2014 sejumlah 151 PRONA dan 150 SMS. Data DHKP 2017

terdapat 2344 objek pajak yang masih menggunakan SPPT. Rentan 2016 sampai dengan 2017 terdapat kenaikan SPPT 62 warga dan belum bersertifikat (Ilyas: 2017).

Program lanjutan Desa di tahun 2018 ialah tertib administrasi dibidang pertanahan berupa pensertipikatan tanah warga. Dalam ikut serta menyukkseskan kegiatan tersebut layanan Larasita diharapkan mampu menyedot minat masyarakat dalam mewujudkan reforma agraria. Inovasi yang diberikan berupa layanan *one day service* dan jemput bola *front office mobile* secara *online*.

Uji coba skala terbatas dilaksanakan pada bulan Maret 2017 proses transfer informasi dilaksanakan mencapai seminggu sekali, itupun tergantung dari pemahaman dan kesiapan masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti 50 warga dengan melihat kegiatan IP4T tahun 2014 terdapat 301 warga terbagi dua kegiatan SMS dan PRONA.

Hasil dari uji coba skala terbatas menghasilkan beberapa masukan diantaranya: 1) Adanya keterangan gambar dalam proses alur pelayanan; 2) Prosedur pelayanan disederhanakan agar mudah dimengerti; 3) Gambar lebih menarik dan berwarna. Setelah uji coba skala terbatas dilakukan, draft 1 diperbaiki dan dikonsultasikan ke ahli untuk divalidasi kembali menjadi Draft 2 seperti ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2 Prosedur Pelayanan Larasita (Draft 2)

Prosedur pelayanan Larasita Draft 2 siap diujicobakan pada skala luas.

b. Uji Coba Skala Luas

Melihat Daftar Himpunan ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tahun 2017 terdapat 2344 objek pajak yang masih menggunakan SPPT maka diambil 105 warga secara acak di Desa Mergosari. Dari 105 warga digunakan sebagai uji coba skala luas dengan metode eksperimen. Hasil penelitian didapatkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Tertib Administrasi

Warga Desa Mergosari terbilang sangatlah sadar tentang kesadaran hukum guna membangun tertib administrasi. Kegiatan tersebut bisa dibuktikan dengan jumlah wajib pajak dan obyek pajak 2344 ditahun 2017 tertip membayar SPPT. Melihat realita pada tahun 2014 warga sangatlah antusias mengikuti program IP4T terbukti 301 warga mengikuti program SMS dan PRONA sebagai upaya reforma agraria. Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya hukum menjadikan daerah Mergosari tidak ada konflik, sengketa dan permasalahan pertanahan.

2. Keterterapan Inovasi *One Day Service*

Untuk melihat keterterapam inovasi *one day service* dalam meningkatkan minat masyarakat mengikuti program Larasita diambil dengan menggunakan angket yang disebarluaskan dan diisi oleh warga. Deskripsi data keterterapan inovasi *one day service* disajikan dalam tabel 5.2

Tabel 2 Data Angket Keterterapan Inovasi *One Day Service*

No.	Pernyataan	Pilihan	
		Ya	Tidak
1.	Inovasi one day service dapat digunakan dalam pendaftaran tanah	73%	27%
2.	One day service sebagai upaya egovernment di BPN	78%	22%
3.	Inovasi one day service sesuai dengan reforma agraria	70%	30%
4.	Inovasi one day service mudah dipahami dan dimengerti	70%	30%
5.	Inovasi one day service sesuai dengan layanan larasita	74%	26%



6.	Program Larasita one day service dapat digunakan dengan mudah dan fleksibel	62%	38%
7.	Inovasi one day service menyajikan tampilan gambar yang jelas dan menarik	74%	26%
8.	Inovasi one day service dapat menarik minat masyarakat	70%	30%
9.	Penggunaan inovasi one day service layanan Larasita dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran hukum guna tertib administrasi dibidang pertanahan	85%	15%
10.	Penggunaan inovasi one day service sebagai media tertib administrasi membuat masyarakat lebih semangat untuk mengikuti program Larasita	69%	31%
11.	Inovasi one day service yang disusun mengurangi waktu pendaftaran tanah yang semula tiga hari menjadi satu hari	70%	30%
12.	Penggunaan one day service merangsang rasa ingin tahu warga	74%	26%
13.	Inovasi one day service meningkatkan partisipasi masyarakat	84%	16%
14.	Inovasi one day service membantu warga menyelesaikan permasalahan pertanahan	76%	24%
15.	Inovasi one day service dapat membuat masyarakat peduli tentang pertanahan	90%	10%
<b>TOTAL</b>		<b>74.6</b>	<b>25.4</b>

Dari tabel 2 terlihat bahwa 74.6% inovasi *one day service* dapat diterapkan dalam kegiatan tertib administrasi membangun kesadaran hukum melalui persertipikatan tanah. Inovasi one day service adalah inovasi dimana layanan larasita yang semula masyarakat datang ke kantor BPN memerlukan waktu dan biaya banyak, setelah adanya Larasita BPN mendatangi warga di Balai desa (jemput bola) dengan sistem satu hari jadi (*one day service*). Jika hal ini berjalan dengan baik maka hasilnya banyak

masyarakat ikut serta dalam program Larasita *one day service* guna mendaftarkan tanah.

### **Penutup**

Dari hasil pendataan dan analisa data di lokasi objek Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan bahwa mengingat masih banyaknya bidang tanah di Desa Mergosari yang belum bersertipikat 2344 bidang di tahun 2017 dan hingga 2017 hanya 667 yang telah bersertifikat, maka kegiatan Larasita *one day service* diharapkan tetap berlanjut di Desa Mergosari. Selain itu, selama proses kegiatan Larasita tidak diketemukan adanya sengketa dan konflik pertanahan serta tanah lainya baik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya.

## Referensi

Badan Pusat Statistik. (2017). Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka (Sukoharjo Subdistrict In Figures). BPS Wonosobo.

Hastanto, Joko Dwi. 19 Oktober 2009. Kasus Sengketa Tanah Menumpuk di BPN, Suara Merdeka.

LKPJ. 2015. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. PEMKAB Wonosobo.

Prijanto, Bambang. (2016). Laporan Akhir IP4T Tahun Anggaran 2016 Desa Mergosari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. BPN Wonosobo.

Winoto, Joyo. 19 Juli 2009. Larasita, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau. Kepala BPN. Kompas. Dipublikasikan kembali oleh BPN 06 September 2011.

## Wawancara

Budi Waluyo. 13 Februari 2017. Kepala Desa Mergosari. Wonosobo.

Ilyas. 13 Februari 2017. Staf Desa Mergosari. 13 Februari 2017. Wonosobo.

Samsul Rohman, 13 Februari 2017. Staf Desa Mergosari.

Sulis, 3 April 2017. Pegawai Kantor Pertanahan Wonosobo. Wonosobo.



# **Dukungan Politik Anggota DPRD terhadap Kepala Daerah dari Jalur Perseorangan: Studi Kasus Di Kabupaten Kupang**

**Susanti**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka**

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan modern sebagaimana masa Yunani Kuno (508 SM) dalam *polis* tidaklah memungkinkan. Perkembangan demografi, kondisi geografis, dan faktor lainnya menjadi pertimbangan sebuah negara menerapkan sistem perwakilan (*representative government*). Pada sistem perwakilan, rakyat memilih para wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat melalui mekanisme yang diatur secara konstitusional. Demokrasi perwakilan menurut Strong merupakan suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas warga yang telah memenuhi persyaratan turut berpartisipasi melalui mekanisme tertentu untuk menjamin pertanggungjawaban semua tindakan pemerintahan kepada kelompok mayoritas (Strong, 2015:17). Artinya ada partisipasi rakyat dalam pergantian wakil rakyat melalui mekanisme tertentu serta jaminan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah kepada konstituen (masyarakat pemilih). Dengan demikian cara kerja demokrasi perwakilan dilandasi adanya kewenangan dan hubungan kedekatan dengan pemilih, sehingga diharapkan wakil dapat menyerap aspirasi rakyat.

Setelah Perang Dunia II (1939-1945), demokrasi mengalami perkembangan pesat dengan lahirnya negara-negara yang baru merdeka atau dikenal sebagai negara dunia ketiga. Hal ini terjadi karena demokrasi memberikan dukungan bagi desentralisasi pada dua tingkatan. *Pertama*, penguatan demokrasi nasional karena mendukung terciptanya stabilitas politik. Hal ini disebabkan karena dalam konsep otonomi mengandung adanya kebebasan untuk berprakarsa dan mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat tanpa adanya kontrol langsung dari pemerintah Pusat (Hoessein, 2004:63). *Kedua*, *local government* memberikan manfaat bagi

masyarakat setempat (*locality*) baik dalam hal *political equality*, *accountability* dan *responsiveness* (jurnal Hoessein, 2001). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi – desentralisasi - otonomi merupakan satu kesatuan yang komprehensif.

Ide-ide demokrasi – desentralisasi – otonomi ini diterapkan di Indonesia. Secara horizontal dikenal adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; sedangkan secara vertikal dikenal adanya pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Sesuai bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, maka hal ini menurut Kertapradja (2012) membawa konsekuensi teoritis. Konsekuensi tersebut adalah NKRI menjadi sebuah genus; dengan spesies desentralisasi, sentralisasi dan dekonsentrasi. Artinya desentralisasi yang berlaku di NKRI merupakan transfer kewenangan Pusat (dalam hal ini eksekutif atau presiden) ke Daerah sehingga kewenangan Daerah tergantung kemurahan Pusat. Secara normatif, hal ini nampak dalam undang-undang pemerintahan daerah yang pernah berlaku.

Setelah Reformasi di Indonesia tahun 1998 silih ganti peraturan tersebut dimulai dari berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014 dengan beberapa revisi. Salah satu faktor krusial dalam setiap undang-undang tersebut adalah menyangkut hak, kewajiban dan kewenangan penyelenggara pemerintahan di Daerah. Sebab hal ini berdampak pada konstelasi politik lokal terkait hubungan Kepala Daerah - DPRD maupun hubungan Pusat - Daerah.

Wakil rakyat di Indonesia dikenal dengan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota. Fokus pada DPRD Kab/Kota, kedudukan anggota DPRD ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah khususnya setelah masa Reformasi. Pada masa UU No. 22/1999 DPRD bukan saja berperan sebagai legislasi daerah yang cukup dominan dalam konteks politik lokal, tetapi juga kewenangan memilih, meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah serta mengajukan hak *impeach* kepada Presiden apabila pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya oleh DPRD. Kewenangan DPRD yang besar ini melahirkan *stagnasi (kemandegan)* pemerintahan di daerah.

Selanjutnya masa UU No. 32/2004, kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa ini, hak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah dinetralisir dalam rumusan hak dan kewajiban DPRD (Pasal 43 dan 44 UU No. 32/2004). Perubahan penting

lainnya pada Pasal 59 ayat 2 UU No. 32/2004 yang mengatur bahwa: “rakyat memilih langsung pasangan kepala daerah/wakilnya dalam sistem paket yang diajukan oleh Parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan”. Artinya dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 maka Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan secara demokratis berdasarkan asas luber, jujur dan adil. Dengan demikian melalui UU No. 32/2004, Kepala Daerah dan DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi.

Mekanisme demokrasi UU No. 32/2004 ini beberapa kali digugat publik ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan salah satu putusan yang berdampak yuridis sangat signifikan adalah Putusan MK No. 005/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang menghapus *frasa* pada Pasal 59 ayat 3 UU No. 32/2004 menjadi sbb.: “membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”. Artinya sejak Putusan MK tersebut, maka membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencalonkan melalui jalur perseorangan (*independen*) atau jalur parpol sesuai ketentuan yang berlaku.

Jalur perseorangan pada Pilkada ini menunjukkan bahwa parpol bukan satu-satunya sarana rekrutmen politik, tetapi menunjukkan kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan. Persyaratan dukungan masyarakat yang tidak terlalu *rigid* bagi bakal calon, membuka peluang rakyat untuk mendaftar melalui jalur perseorangan. Berdasar data pelaksanaan Pilkada dan kemenangan berdasar jalur dapat ditunjukkan sbb.

Tabel 1.  
Pilkada dan Kemenangan Berdasar Jalur

No.	Tahun	Jumlah Pilkada	Kemenangan Berdasar Jalur	
			Perseorangan	Parpol
1.	2005-2014	1027	10	1017
2.	2015	264	13	251
3.	2017	101	1	100
Total		1392	24	1368

Sumber: Diolah dari *otda.kemendagri.go.id* dan sumber lain.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kemenangan jalur perseorangan pada Pilkada Serentak 2017 semakin kecil. Hal ini disinyalir kuantitas pendaftar jalur perseorangan menurun dibanding sebelumnya, mengingat ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 semakin memperketat persyaratan tersebut al: peningkatan jumlah dukungan sebesar 3,5% dari sebelumnya baik untuk calon gubernur/bupati/walikota (Pasal 41 Ayat 1&2), “surat dukungan disertai fotokopi KTP Elektronik” atau surat keterangan domisili minimal 1 tahun di wilayah tsb. dari Dinas Dukcapil (Pasal 41 Ayat 3), dan verifikasi faktual pendukung calon dengan waktu yang terbatas (Pasal 48 Ayat 2). Artinya persyaratan calon perseorangan menjadi lebih mahal sebab surat dukungan harus sesuai format dan bermeterai. Waktu verifikasi faktual yang terbatas dan kesibukan pendukung, memungkinkan jumlah dukungan tidak memenuhi persyaratan. Meski secara kuantitas jumlahnya menurun pada Pilkada Serentak 2017, namun jalur perseorangan dapat mengatasi kebuntuan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi parpol yang lemah.

Secara yuridis, Undang-Undang No. 23/2014 mengatur bahwa unsur penyelenggara pemerintahan adalah Kepala Daerah bersama DPRD dibantu unsur pelaksana teknis Daerah. Kepala Daerah dan DPRD merupakan dua lembaga dalam satu kamar yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada dan Pileg yang kewenangannya diatur secara normatif dalam undang-undang. Sedangkan secara empiris, kemenangan Kepala Daerah jalur perseorangan di beberapa daerah memicu aktivitas politik lokal bahkan tidak jarang menyebabkan *kemandegan* pembangunan di daerah tersebut. *Lokus* di Kab. Kupang menjadi menarik di antara beberapa Daerah yang memenangkan Pilkada jalur perseorangan, karena beberapa alasan. *Pertama, Incumbent* pada masa jabatan pertama (2009-2014) didukung oleh PDIP yang kemudian setelah pelantikan menarik dukungannya. Akibatnya selama masa jabatan pertama hubungan Kepala Daerah – DPRD penuh ketegangan dan konflik (Itta, 2014:174), bahkan secara signifikan meningkatkan kuantitas unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dibanding masa sebelumnya. Namun hal tersebut tidak mengurangi minat *Incumbent* untuk mencalonkan kembali pada periode kedua (2014-2019) melalui jalur perseorangan bahkan memenangkan Pilkada. *Kedua*, tidak ada parpol dominan di DPRD Kab. Kupang hal ini ditunjukkan dengan indeks ENPP (*The effective Number of Parliamentary Parties*) tergolong tinggi (nilai 8,94). Artinya apabila kepala daerah melakukan pengambilan keputusan, maka terdapat sekitar 9 parpol yang memiliki kekuatan relevan untuk



mempengaruhinya (Sumber: Rumus Rae dalam Kartawidjaja&Aminuddin, 2015:35-36). Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Dukungan DPRD Periode 2014-2019 Pada Bupati Jalur Perseorangan Di Kab. Kupang.

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana dukungan DPRD pada Bupati Jalur perseorangan di Kab. Kupang? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dukungan DPRD pada Bupati jalur perseorangan di Kab. Kupang. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat membangun pola hubungan Kepala Daerah – DPRD sesuai situasi dan kondisi Kab. Kupang.

### Tinjauan Pustaka

Sanit (1985:228-229) mengungkapkan adanya lima tipe perwakilan rakyat yaitu : tipe wali (*trustee*), tipe utusan (*delegate*), tipe *politicio*, tipe partisipan dan orientasi pada pemerintah (eksekutif). Tipe wali (*trustee*) maka wakil rakyat bebas bertindak atas nama kepentingan dan pertimbangannya sendiri. Tipe utusan (*delegate*) maka wakil harus mengadakan konsultasi secara kontinu kepada pemilih, sehingga wakil hanya berperan sebagai penyalur aspirasi pemilih. Tipe *politico* adalah gabungan tipe wali dan utusan dimana orientasi wakil disesuaikan dengan isu yang dihadapi. Tipe partisipan, wakil lebih berorientasi pada organisasi politik yang menggerakkan dukungannya. Sedangkan tipe orientasi pemerintah maka wakil berorientasi pada pemerintah (eksekutif). Tipe perwakilan rakyat yang disandang wakil ini akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan proses penyelenggaraan pemerintahan, maka sebelum suatu program atau kebijakan pemerintah disahkan haruslah melewati proses perumusan kebijakan dalam lembaga DPRD sehingga terjadi *check and balances*. Proses politik ini digambarkan Easton (1987:5) dengan adanya Input (tuntutan dan dukungan) – Proses – Output (kebijakan atau keputusan) dan *feedback*. Dickerson & Flanagan (1998:316) serta Ndraha (2011:41) mengungkapkan dalam bahasa yang berbeda bahwa dukungan dalam sebuah proses politik di DPRD ini dapat berbentuk tuntutan, harapan dan dukungan (*support*). Dukungan DPRD ini mencerminkan sikap politik DPRD terhadap suatu program atau kebijakan Bupati.

Dukungan ini mempengaruhi hubungan Kepala Daerah – DPRD. Muttalib & Khan (1982:166) mengklasifikasikan eksekutif lokal berdasar

tiga kategori, yaitu: jumlah, *nature*, dan posisi. Berdasar jumlah dikenal ada dua bentuk yaitu mono (1) dan plural (2), berdasar *nature* dibedakan menjadi politis (3) dan non politis (4), dan berdasar posisi dikenal dalam dua kategori yaitu kuat (5) dan lemah (6). Klasifikasi tersebut menurut Muttalib & Khan menghasilkan delapan pola kemungkinan eksekutif sbb.

Tabel 2.  
Pola Kemungkinan Eksekutif

Pola Eksekutif	Kombinasi Bentuk yang Mungkin	Keterangan
A	1-3-5	Mono-politis-kuat
B	1-3-6	Mono-politis-lemah
C	1-4-5	Mono-non politis-kuat
D	1-4-6	Mono-non politis-lemah
E	2-3-5	Plural-politis-kuat
F	2-3-6	Plural-politis-lemah
G	2-4-5	Plural-non politis-kuat
H	2-4-6	Plural-non politis-lemah

Sumber: Diolah dari Muttalib & Khan (1982:166).

Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; maka dapat dipastikan bahwa Indonesia menganut model mono dan politis. Politis dalam arti dipilih langsung masyarakat memang kuat, namun mengingat proses pembentukan regulasi di daerah yang dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati, maka sifat politis ini sangat ditentukan juga oleh variabel kerjasama antara keduanya. Sedangkan dari posisi Kepala Daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhi posisi tersebut. Bahkan lebih lanjut Pasal 57 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 mengatakan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Dengan demikian ada tiga unsur utama yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: Kepala Daerah dan DPRD, yang masing-masing didukung oleh birokrasi lokal. Keberadaan karir birokrasi lokal di Indonesia

diatur dalam Undang-Undang ASN dan di bawah pembinaan oleh Kepala Daerah.

Sistem *checks and balances* yang ideal, menurut Zuhro dalam jurnal (2013:60) menggambarkan bila DPRD dan Eksekutif memiliki kekuasaan seimbang sehingga memungkinkan kedua lembaga saling mengontrol, mengisi dan mengimbangi. Sebaliknya bila salah satu kuat atau lemah, maka tercipta demokrasi yang tidak sehat. Dengan demikian apabila kepala daerah berasal dari partai minoritas terlebih jalur perseorangan, maka posisi Kepala Daerah menjadi sangat rawan terhadap DPRD. Pola hubungan ini digambarkan sbb.

Tabel 3.  
Pola Hubungan Eksekutif – Legislatif

		Eksekutif	
		Lemah	Kuat
Legislatif	Lemah	Kolusi tersembunyi dan konflik tersembunyi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legislatif di komando eksekutif.</li> <li>2. Legislasi usulan eksekutif mudah diloloskan.</li> </ol>
	Kuat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legislatif bisa dan mampu mencampuri urusan eksekutif.</li> <li>2. Legislatif bisa dengan mudah menurunkan eksekutif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saling mengimbangi dan saling mengontrol.</li> <li>2. Proses legislasi dan pemerintahan diawasi dan dijalankan seimbang.</li> </ol>

Sumber: Jurnal Zuhro (2013:60).

Pola hubungan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di Kab. Kupang.

### Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan berbagai metode (wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi) yang didukung oleh lingkungan alamiah (*natural settings*) serta melibatkan pendekatan interpretasi naturalistik yang diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian (Denzin&Lincoln, 1994:2). Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur dan terbuka pada informan yang ditetapkan secara *purposive*. Informan tersebut adalah: anggota DPRD, Bupati, Sekda, dan Partisipan. Interpretasi naturalistik ini bertujuan untuk memahami, memaknai, atau menafsirkan fenomena yang terjadi.

Kedekatan partisipan dengan peneliti perlu dibangun dengan tujuan agar *natural setting* yang terbangun akan mempermudah akses pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti juga membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari hal-hal khusus ke umum (induktif) dengan mengolah data menjadi informasi yang lebih abstrak. Oleh karena itu untuk memahami partisipan (*partisipants meaning*), Peneliti harus fokus pada makna yang disampaikan partisipan terkait dengan permasalahan. Dengan demikian peneliti harus berusaha untuk memahami makna dari para partisipan, bukan hubungan sebab akibat dari variabel.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah sebagaimana dikemukakan Creswell (2014:247) yaitu: (1) mengelola dan menyiapkan semua data untuk analisis, (2) membaca keseluruhan data, (3) melakukan koding data, (4) memilah data berdasarkan tema dan deskripsi, (5) menghubungkan tema/deskripsi dengan teori, (6) menginterpretasikan makna dari tema/deskripsi sehingga ada validasi dan akurasi informasi dalam laporan.

## Pembahasan

Pada prinsipnya DPRD merupakan lembaga politik meski keberadaannya dalam UU No. 23/2014 merupakan satu kamar dengan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Artinya kedua lembaga ini dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan, dengan hubungan kemitraan yang sejajar sebagai kepanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Keanggotaan DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 berjumlah 35 orang, dengan sebelas orang (31%) merupakan anggota periode sebelumnya yang terpilih kembali. Berbeda dengan periode 2009-2014 dimana Partai Gerindra hanya memperoleh dua kursi, pada Pileg 2014 mendapat kursi terbanyak

(lima kursi) bersama PDI Perjuangan. Perbedaan konteslasi politik pada DPRD Kab. Kupang ini dapat dilihat dari sudut perolehan jumlah kursi partai politik periode 2014-2019 dan 2009-2014 sbb.

Tabel 4.  
Perbandingan Perolehan Jumlah Kursi Parpol Pada DPRD Kab. Kupang  
Periode 2009-2014 dan 2014-2019

No.	Nama Parpol	Perolehan Jumlah Kursi Periode	
		2014-2019	2009-2014
1	2	3	4
1	Gerindra	5	2
2	PDIP	5	6
3	Golkar	4	8
4	NasDem	4	-
5	Demokrat	4	4
6	Hanura	4	4
7	PAN	3	-
8	PKPI	3	-
9	PKB	2	-
10	PBB	1	-
12	PDS*	-	3
13	Partai Karya Perjuangan*	-	3
14	Partai Karya Peduli Bangsa*	-	2
15	Partai Demokrasi Kebangsaan*	-	1
16	Partai Republik Nusantara*	-	1
17	Partai Pelopor*	-	1
Jumlah		35	35

Sumber : KPUD Kab. Kupang, 2016.

Catatan: \* Sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak memenuhi angka ambang batas (*parliamentary threshold*) 3,5% suara sah nasional.

Sepuluh parpol yang mendapat kursi di DPRD tersebut membentuk sembilan fraksi, yaitu (Sumber: DPRD Kab. Kupang 2016):

1. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F- Gerindra);
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F- PDI Perjuangan);
3. Fraksi Partai Golkar (F- PG);
4. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F- Partai Hanura);
5. Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat);
6. Fraksi Partai Nasdem (F-Nasdem);
7. Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (F-PKPI);
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); dan
9. Fraksi Gabungan Bintang Kebangkitan Bangsa (F-GBKB).

Fraksi adalah kepanjangan parpol, sehingga berkewajiban membahas dan memperjuangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penjarangan aspirasi konstituen, menyusun langkah dan strategi secara efektif dan efisien serta memperjuangkannya dalam forum DPRD melalui anggotanya yang duduk dalam komisi, badan, kepanitiaan serta merumuskan kata akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD.

Semua fraksi DPRD dalam bahasa yang berbeda sepakat bahwa Program Bupati sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Bupati yang menjawab permasalahan masyarakat ini menjadi tuntutan utama wakil rakyat. Permasalahan kebutuhan masyarakat ini menurut F-Demokrat dilakukan melalui penelitian dan uji kelayakan bersama pemerintah dengan 'turun langsung lapangan dan bersentuhan langsung' dengan masyarakat dalam rangka kunjungan kerja. Fraksi lainnya mengungkapkan memperolehnya melalui berbagai cara seperti: penelitian yang dilakukan parpol, masukan dari rapat internal Parpol dengan semua DPC, kunjungan ke konstituen pada masa reses, membangun hubungan baik dengan kepala desa. Dengan demikian program yang diusulkan Bupati merupakan permasalahan masyarakat yang diangkat dan ditanggapi oleh Pemerintah dan DPRD melalui alokasi anggaran dalam bentuk program atau kegiatan.

Program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini, antara lain: Tanam Paksa-Paksa Tanam (TP2T), pemberdayaan masyarakat dalam bentuk dana bergulir, pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan, program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan program pemberdayaan peternak dalam bentuk dana bergulir hewan ternak. Permasalahan masyarakat dan program Bupati yang relevan menjadi acuan utama tuntutan DPRD pada program bupati. Artinya ketika ada program yang menurut pandangan fraksi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka fraksi dapat menolak program tersebut. Dengan demikian kesepakatan semua fraksi ini, tidak berarti mengurangi sikap kritis DPRD terhadap program yang ada.

Berkaitan dengan program bupati tersebut, F-Hanura berpendapat perlunya dibangun koneksitas antarprogram. Segmen-segmen prioritas perlu ditentukan untuk mendukung program prioritas, minimal hal ini disesuaikan dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Namun belum ada ketentuan yang mengatur tentang koneksitas ataupun sinkronisasi antara prosentase anggaran yang dibelanjakan dengan matapencaharian masyarakat. Fakta empiris menunjukkan meski selama T.A. 2014-2016 DPRD tidak pernah secara frontal menolak program Bupati, tetapi pasti memberikan catatan perbaikan. Misalnya: besarnya anggaran perlu disesuaikan dengan keterbatasan dana, penempatan Program TP2T yang tidak sesuai dengan nomenklatur dan belum tersinkronisasi antar SKPD, dll. Masukan DPRD tersebut ditindaklanjuti, namun menyangkut program yang memerlukan sinkronisasi antar SKPD belum sepenuhnya dapat diakomodasi meski diusahakan terus menerus oleh pemerintah.

Selain tuntutan di atas, DPRD juga menuntut agar pemerintah bekerja keras menghilangkan predikat *disclaimer* dari BPK serta menindaklanjuti rekomendasi catatan strategis Pansus dan masukan dalam rapat bersama antara Pemerintah dan DPRD. Sejumlah tuntutan tersebut mewajibkan kerjasama kemitraan yang baik antara Pemerintah dengan DPRD yang kemudian membuahkan hasil, antara lain: predikat WDP dari BPK, peningkatan kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi Pansus, serta adanya penjadwalan program yang berjalan dengan baik.

Menghasilkan program yang sejalan dengan aspirasi masyarakat ini memerlukan sejumlah kiat khusus baik oleh Pemerintah ataupun DPRD. Kiat khusus tersebut antara lain: DPRD melalui fraksi mendapat masukan dari Parpol masing-masing, penelitian yang dilakukan parpol, kunjungan kerja

DPRD, penjaringan aspirasi konstituen dalam masa reses, dan masukan dari para kepala desa. Sedangkan Pemerintah sendiri al. melalui: musrembang, turun langsung ke masyarakat melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), atau masyarakat sendiri yang aktif menyampaikan permasalahan. Melalui kiat-kiat tersebut, maka program-program pemerintah menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemitraan yang baik antara Pemerintah dan DPRD ini diungkapkan sbb.: “menyebutkan SKPD sebagai teman” (F-PAN) atau “hubungan kemitraan yang saling menopang dan mengisi” (F-Nasdem). Dengan demikian koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga tersebut menjadi awal proses tersusunnya program-program pemerintah.

Tuntutan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat ini menurut Ndraha (2011) merupakan hak bawaan yang disebut hak eksistensial yang terkait dengan kewajiban DPRD dan Pemerintah sebagai lembaga yang dipilih masyarakat. Dalam tuntutan ini terkandung juga harapan dan dukungan. Apabila dibandingkan dengan kepemimpinan Petahana periode sebelumnya; maka hubungan kemitraan yang baik dengan saling menopang dan mengisi ini menjadi acuan utama untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Komunikasi informal ini dilakukan dalam bentuk diskusi dan *sharing* sebelum pembahasan dalam forum formal berhasil membangun persepsi yang sama terhadap permasalahan masyarakat dan penyelesaiannya dalam bentuk program, kegiatan dan penganggarnya. Beberapa fraksi dan pimpinan DPRD mengakui bahwa ide-ide Bupati sangat bagus seperti TP2T, namun dalam implementasinya tidak dapat diterjemahkan dengan baik antar SKPD sebagai program yang utuh. Dengan demikian faktor kompetensi birokrasi sangat menentukan keberhasilan dalam menterjemahkan program Bupati.

Berkaitan dengan harapan ke depan terhadap program Bupati informan F-Gerindra mengungkapkan sbb.:

“...kemampuan pengelolaan anggaran...lemah,... tolong ini diperhatikan. Supaya Kepala SKPD punya keseriusan...dalam pengelolaan anggaran. Karena percuma sudah anggarkan ratusan miliar, kalau faktanya dia berjalan lambat, kita yang rugi”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua F-PDIP sbb.:



“...tidak seluruh SKPD mampu menangkap pikiran-pikiran Pak Bupati, kalau kita lihat ada sebagian... Dari guru angkat jadi camat, kemudian dari camat dipaksakan untuk menjabat Kepala Dinas. Ini saya rasa sikap Pak Bupati yang mencederai Pak Bupati sendiri”.

Ungkapan senada juga dinyatakan oleh informan lainnya dalam bahasa berbeda, seperti:

“penempatan birokrasi ini harus pas pada *basic*-nya, kalau tentu tidak pas.. berdampak baik pengetahuan dan lain-lain karena dia baru mau belajar” (F-PG).

“... penyerapan anggaran rendah itu menunjukkan kinerja yang buruk dan Beliau melakukan ... nonjob bagi beberapa pejabat” (F-Nasdem).

“Program TP2T...perlu ada satu kebersamaan dalam menyamakan pikiran....jangan sampai kita paksa taruh anggaran di sana, kemudian tidak dapat direalisasikan, itu yang terjadi” (F-Hanura).

“Tidak saja SKPD saja yang datang...Kepala Daerah juga turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung, sehingga akhir masa jabatan dari seorang Kepala Daerah itu juga ada nilai tambah” (F-Demokrat).

“...*mentoknya* di SKPD, ini kadang agak sulit untuk mereka menterjemahkan secara baik kata Pak Bupati...Artinya mereka tidak terlalu patuh dengan yang sudah disusun. Semacam ada persoalan takut salah atau takut nanti berhadapan dengan kasus hukum” (F-PAN).

“...hampir 60% para Kadis di Kab. Kupang ini berasal dari guru,... para camat itu hampir 90% itu guru” (F-GBKB).

Berdasar data empiris maka dapat diungkapkan bahwa faktor penempatan birokrasi, kompetensi dan profesionalitas birokrasi menjadi harapan utama semua fraksi DPRD agar program Bupati berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar birokrasi diisi oleh guru yang kemudian menjadi pejabat struktural di pemerintahan. Penempatan birokrat tidak didasarkan pada basic kompetensi sesuai bidang tugas. Kendala birokrasi dirasakan menjadi penghambat utama penterjemahan visi-misi Bupati ke dalam program/kegiatan dan anggaran. Sebaik apapun visi-misi ini bila tidak dapat diterjemahkan dengan baik, maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kelemahan SKPD ini sebenarnya dapat diatasi melalui berbagai cara antara lain: pelatihan dan koordinasi yang baik antara Bupati – Wakil Bupati – Sekda. Pelatihan tanpa pengalaman yang memadai memerlukan proses yang panjang agar hasilnya nampak nyata. Sedangkan koordinasi Bupati – Wakil Bupati – Sekda ini penting, sebab Sekda merupakan perantara Bupati/Wakil Bupati dengan SKPD. Hubungan ketiganya ini digambarkan informan F-PKPI sbb.”...ya mau dibilang harmonis ya tidak, mau dibilang baik ya tidak. Adem-adem saja begitu...ini yang perlu diperhatikan. Komunikasi ketiganya harus baik sebab bagaimanapun ketiganya sebagai penggerak birokrasi”. Artinya kendala birokrasi tidak dapat diatasi secara cepat melalui pelatihan tanpa pengalaman, sedangkan Sekda sebagai perantara birokrasi tidak dapat menjalankan perannya sebagai penggerak birokrasi. Dengan demikian Bupati dari jalur perseorangan seharusnya didukung oleh birokrasi yang kuat, koordinasi dan kepemimpinan yang kuat sebagai jembatan komunikasi pengganti tugas parpol. Namun jembatan komunikasi ini meski terlihat harmonis, tidaklah substantif sebab program/kegiatan tidak dapat diterjemahkan dengan baik oleh birokrasi.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan ada dua hal penting yang menjadi harapan DPRD agar program-program Pemerintah dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan dalam Perda, yaitu: (1) Bupati tetap melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD, dan (2) Penataan birokrasi sesuai kompetensi agar program Bupati dapat terealisasi dengan baik. Kendala di lapangan terjadi manakala penempatan birokrasi atau Kepala SKPD tidak sesuai kompetensi bidang tugas dan pengalaman. Menurut informan hampir 60% Kepala SKPD dan 90% Camat adalah mantan guru. Meski tidak ada data resmi dari BKD yang menggambarkan perpindahan tenaga fungsional guru ke struktural, namun berdasarkan masa pelantikan dapat diidentifikasi data tsb. Misalnya: berdasarkan Surat Pelantikan No.:800/468.2/BKD.KAB. KPG/2015 tercatat seorang Guru Muda pada SDN dilantik menjadi Pj. Camat; Lampiran Keputusan Bupati No. 821.21/06/BKD.Kab.KPG/ 2015 tentang mutasi beberapa Guru Madya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pengawas, Kabid di SKPD PPO.

Terkait dengan hal ini, Bupati menyatakan bahwa: “visi-misi itu harus betul-betul satu sebagai kriteria utama dalam menentukan Kepala SKPD di samping faktor loyalitas”. Lebih lanjut Bupati mengungkapkan bahwa “kompetensi dapat diajarkan, tetapi kalau kepandaianya untuk menipu rakyat maka hal tersebut tidak ada artinya. Orang yang kurang dapat belajar,

tetapi kalau moral jelek susah untuk diperbaiki”. Lelang jabatan dengan uji kompetensi yang pernah dilakukan September 2014 untuk mengisi jabatan struktural eselon II, hanyalah salah satu indikator. Sebab menurut Sekda masih ada indikator lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu: integritas, kepribadian, dan pengalaman. Bahkan pada masa jabatan pertama Bupati (2009-2014) beralihnya tenaga fungsional ke struktural didasarkan pertimbangan tertentu oleh Bupati terutama soal pengkaderan. Hal ini diungkapkan Informan sbb.:

“...Kab. Kupang ini kan hampir 75% itu di dominasi oleh orang-orang Timor dan selama ini yang jadi pemimpin itu kan, orang Timor tidak pernah naik jadi Bupati. Jadi ketika ada Pak Bupati yang sekarang ini duduk jabatan dari 2009 sampai sekarang, Beliau bagaimanapun harus melihat kader di belakangnya”.

Kewenangan penataan birokrasi daerah menjadi kewenangan sepenuhnya Bupati, namun harapan DPRD adalah Bupati melakukan penataan birokrasi berdasar kompetensi dan bebas dari kepentingan politik. Menjadi hal dilemmatis, sebab data empiris menunjukkan bahwa faktor loyalitas, integritas, sukuisme, titipan politik dan balas jasa menjadi pertimbangan utama penempatan birokrasi.

Adanya dukungan DPRD pada Program Bupati jalur perseorangan ini tidak berarti semua program yang dihasilkan bermanfaat langsung untuk rakyat. Informan birokrat mengungkapkan sbb.

“Bagaimanapun juga DPRD lembaga politik dan kita (baca: birokrasi) harus menjaga komunikasi... segala informasi yang masuk, kita sadar mekanisme dan sistemnya, dan kita punya kewajiban untuk menterjemahkan dalam bahasa program. Rujukan kita jaring asmara (baca: penjangkaran aspirasi masyarakat), ada kebijakan pusat, ada RPJMP, dsb.”

Oleh karena itu menjadi dilemma birokrasi ketika di satu sisi harus bekerja sesuai mekanisme dan sistem yang berlaku, namun di satu sisi lain juga harus mengakomodasi kepentingan politik baik yang berasal dari DPRD ataupun Bupati. Sayangnya kewenangan birokrasi yang besar ini tidak ditunjang dengan profesionalitas dan kompetensi yang memadai. Faktor loyalitas, integritas, sukuisme, titipan politik, dan balas jasa dalam penempatan sumber daya aparatur lebih menjadi pertimbangan utama.

Akibatnya birokrasi tidak netral, dalam arti tetap menjaga loyalitas kepada DPRD maupun Bupati. Bahkan melalui program atau kegiatan yang dirancang, birokrasi justru melakukan kolusi dengan DPRD tanpa sepengetahuan Bupati dalam rangka membangun komunikasi yang baik di antara keduanya.

Birokrasi mengisi kekosongan peran yang dijalankan oleh parpol, sehingga informasi yang diberikan kepada Bupati penuh dengan *conflict of interest*. Hal ini sebagaimana diungkapkan Informan Tim Sukses ATEK sbb.

“...birokrasi sendiri diisi oleh orang-orang yang penuh dengan konflik kepentingan, artinya orang-orang yang berseberangan dengan Pak Bupati sendiri dari awal...Sekda seharusnya membantu Bupati menegakkan aturan namun kenyataannya diisi oleh orang-orang titipan DPRD.... pada posisi-posisi strategis....birokrasi tidak dapat menterjemahkan visi dan misi Bupati”.

Dengan demikian birokrasi sebagai *dual agents* yaitu agen politik dan agen pemerintah yang sarat kepentingan, tidak ditunjang profesionalitas dan kompetensi yang memadai. Implikasinya tidak mampu menterjemahkan visi dan misi Bupati menjadi sebuah program/kegiatan.

Birokrasi mengisi kekosongan peran yang dijalankan Parpol dan mengamankan posisinya ini melalui kolusi program dengan DPRD, pembelokan administrasi, dan pelemahan sistem. Pembelokan administrasi dilakukan birokrasi melalui pemindahan lokasi program/kegiatan sehingga tidak sesuai rencana. Komunikasi internal birokrasi yang lambat dan tidak profesional mengakibatkan target capaian program tidak tercapai. Bupati menyebutnya sebagai pelemahan proses dalam sistem (atau pelemahan sistem), padahal seharusnya birokrasi berprestasi dan melayani rakyat, bukan melayani DPRD.

Penelusuran lebih lanjut dukungan DPRD pada Bupati ini didasari oleh beberapa fakta empiris adanya balas jasa parpol dan beberapa anggota DPRD. Hal ini terjadi karena jaringan-aktor Petahana membantu anggota DPRD untuk memenangkan Pileg 2014. Informan Relawan Bupati mengungkapkan sbb.: “Saya punya massa dan mereka (baca: DPRD) datang...*Dorang* bilang, sudah kita tidak usah bikin perjanjian, tetapi nanti kita upayakan supaya searah dengan Pak Bupati”. Artinya relawan Petahana ini menuntut balas jasa anggota DPRD untuk sejalan dengan visi-

misi bupati dan menjaga hubungan harmonis dengan Bupati. Dengan demikian faktor kepentingan menjadi alasan dukungan DPRD bagi program Bupati jalur perseorangan.

### Diskusi

Tuntutan, harapan dan dukungan wakil rakyat ini seolah mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Namun dengan adanya faktor balas jasa dari DPRD karena pernah dibantu oleh relawan Bupati dalam Pileg, dan 'ketakutan pada ancaman relawan' maka tipe keterwakilan DPRD ini sebagaimana tipologi termasuk pada tipe orientasi pada pemerintah. Tipe orientasi pada pemerintah ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mendukung program eksekutif, tetapi juga untuk menyelamatkan posisi keterwakilannya di masa mendatang dengan cara mengakomodasi kepentingan konstituen dalam program sambil memanfaatkan kelemahan birokrasi. Akibatnya terjadi kolusi program antara birokrasi dan DPRD (Sanit, 1985:228-229).

Birokrasi yang seharusnya berperan menindaklanjuti program/kebijakan Bupati, namun faktor kepentingan untuk 'menyelamatkan' posisi jabatannya maka birokrasi melakukan kompromi dengan DPRD. Kebijakan bupati yang seharusnya ditindaklanjuti, ternyata mengalami pembelokan administrasi atau pelemahan sistem. Pembelokan administrasi atau pelemahan sistem ini tergolong sebagai penyimpangan perilaku birokrasi atau lebih tepat disebut sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi (*Dysfunction of bureaucracy*).” Perilaku birokrasi merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan “setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri yang akan membawanya ketika memasuki lingkungan tertentu (Thoha, 2005:138). Jika karakteristik individu dalam diri aparat dan karakteristik organisasi (birokrasi) berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu (aparat) dalam organisasi (birokrasi). Akibatnya meskipun hubungan DPRD dan Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berjalan harmonis, tetapi keharmonisan ini diwarnai oleh ketidakloyalan birokrasi dalam menjalankan visi-misi Bupati. Menjadi bahan evaluasi bagi aparat, manakala rakyat secara langsung melaporkan kinerjanya kepada Bupati, sehingga laporan birokrasi yang diberikan kepada Bupati cenderung menyenangkan Bupati atau berperilaku asal bapak senang (ABS). Akibatnya program-program pembangunan yang berjalan tidak mendukung ke arah pencapaian

visi-misi Bupati, selanjutnya manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan masyarakat.

Birokrasi paternalistik yang dibangun atas dasar ikatan primordial seperti loyalitas dan sukuisme (Timor) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kab. Kupang belum tentu membangun kekuatan birokrasi untuk menghadapi DPRD. Faktor loyalitas birokrasi sebagai individu ketika mendukung Bupati dalam Pilkada belum tentu berlangsung kekal manakala menghadapi tekanan DPRD. Ketika birokrasi tidak ditunjang kompetensi dan kinerja yang mendukung, maka yang terjadi adalah kompromi politik. Kompromi politik antara birokrasi dengan DPRD untuk mengamankan kepentingan birokrasi serta menjaga hubungan harmonis antara Bupati dan DPRD. Akibatnya terjadi pembelokan administrasi sebagai bentuk penyimpangan perilaku birokrasi, yang selanjutnya berdampak tidak tercapainya visi-misi Bupati. Lebih lanjut berdampak pada tidak tercapai program atau target pembangunan. Dengan demikian meskipun Bupati berperan sebagai pelindung birokrat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana hubungan patron-klien, namun ketika klien (birokrat) tidak mempunyai kompetensi dan kinerja yang memadai sebagaimana tuntutan birokrasi modern dan harus menghadapi DPRD; maka terjadilah penyimpangan perilaku birokrasi melalui pembelokan administrasi atau pelemahan sistem.

Secara teoritis, pola kemungkinan eksekutif yang terjadi sebagai dampak adanya Pilkada jalur perseorangan di Kab. Kupang melahirkan Pola B. Pola B ini berciri: Mono – Politis – Lemah. Berada pada posisi lemah, sebab tidak didukung oleh faktor kepemimpinan Bupati yang kuat dan birokrasi yang tidak profesional. Implikasinya, pola eksekutif yang mengungkapkan bahwa Pilkada menghasilkan pemerintahan yang Mono – Politis – Kuat belum tentu tepat. Kuat atau lemahnya pola eksekutif tergantung pada kepemimpinan Bupati dan birokrasi sebagai penggerak penyelenggara pemerintahan di Daerah (Muttalib&Khan, 1982). Kuat ketika kepemimpinan Bupati dapat memberdayakan profesionalitas birokrasi, dan lemah ketika kepemimpinan Bupati tidak dapat menggerakkan dan mengontrol kinerja birokrasi sesuai target yang direncanakan sesuai visi-misi.

Pola kemungkinan eksekutif ini akan melahirkan pola hubungan Kepala Daerah – DPRD. Adanya kolusi program antara Birokrasi dengan DPRD, pembelokan administrasi, dan pelemahan sistem menunjukkan bahwa keduanya berada pada posisi lemah. Apalagi hal tersebut dilakukan tanpa

sepengetahuan Bupati, meski koordinasi dan komunikasi yang baik terjadi antara Kepala Daerah dengan DPRD. DPRD yang secara kompetensi lemah ketika bertemu dengan eksekutif yang lemah, maka yang terjadi adalah kolusi tersembunyi dan konflik tersembunyi (jurnal Zuhro, 2013). Kelemahan ini dapat diatasi dengan meningkatkan profesionalitas Kepala Daerah dan DPRD yang dilandasi dengan kesamaan nilai untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.

## Penutup

Sebagai penutup studi ini menyimpulkan beberapa poin, antara lain:

1. Dukungan Bupati pada program bupati jalur perseorangan cukup kuat, karena dilandasi komunikasi dan koordinasi yang terbuka di antara keduanya. Hal ini menjadi awal tersusunnya program-program pemerintahan, meskipun dalam praktik ada kendala birokrasi yang menjembatani komunikasi namun sarat kepentingan.  
Tuntutan DPRD pada Bupati untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui dukungan pada Program Bupati, tidak semata-mata menjadikan wakil berpihak pada rakyat. Faktor balas jasa, kolusi program, dan 'ketakutan pada ancaman relawan' menjadikan DPRD Kab. Kupang berada pada tipe orientasi pemerintah.  
Harapan DPRD pada profesionalitas dan kompetensi birokrasi dalam penempatan sumber daya aparatur birokrasi tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini terjadi karena faktor loyalitas, integritas, sukuisme, titipan politik dan balas jasa menjadi pertimbangan utama penempatan birokrasi.
2. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah : (a) Faktor kepentingan sangat mempengaruhi tipe wakil terhadap aspirasi konstituen, (2) Kepemimpinan dan profesionalitas birokrasi mempengaruhi kuat/lemahnya pola kemungkinan eksekutif yang terjadi (Muttalib& Khan,1982); (3) Birokrasi yang tidak profesional tidak akan mampu mengatasi kelemahan Kepala Daerah dan DPRD.

3. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut tentang upaya membangun profesionalitas DPRD merumuskan program pembangunan yang substantif sesuai kebutuhan publik.

## Referensi

- Creswell, J.W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. USA: Sage Publications.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Dickerson, M.O., & Flanagan, T. (1998). *An Introduction to Government and Politics: A Conceptual Approach* (4<sup>th</sup> ed.). Ontario: International Thomson Publishing.
- Ditjen Otda Kemendagri. (2015, Maret 31). Rekap Pilkada 2005 sd. 2014. [http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data\\_dan\\_informasi/seputar\\_otda/4.%20Rekap%20Pilkada%202005%20s.d%202014.pdf](http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data_dan_informasi/seputar_otda/4.%20Rekap%20Pilkada%202005%20s.d%202014.pdf).
- Easton, D. (1987). "Analisis Sistem Politik". Dalam Mas'ood, M. & MacAndrews, C. *Perbandingan Sistem Politik*, hlm.3-20. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hoessein, B. (2004). *Desentralisasi & Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.



- Hoessein, B. (2001). Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara. Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Good Governance yang diselenggarakan Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: 30 Oktober.
- Kartawidjaja, P.R. & Aminuddin, M.F. (2015). Demokrasi Elektoral (Bagian I). Surabaya: Sindikasi Indonesia.
- Kertapraja, E.K. (2014). Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: Yayasan Damandiri.
- Muttalib, M.A., & Khan, M.A.A. (1982). Theory of Local Government. New Delhi: Sterling Publishers PVT, Ltd.
- Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanit, A. (1985). Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Strong, C.F. (2015). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk. Terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media.
- Thoha, M. (2005). Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zuhro, S. (2013). Relasi Antara DPRD dan Kepala Daerah Era Pilkada. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 40 Tahun 2013, 51-71. Jakarta: MIPI.



## **BAGIAN II**

### **MEDIA SOSIAL DAN MULTILITERASI DI ERA DIGITAL**



# **Multiliterasi pada Masyarakat Informasi Indonesia**

**Sri Suharmini Wahyuningsih**

**Jurusan Ilmu Komunikasi  
Universitas Terbuka**

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat informasi sudah mulai muncul pada saat mulai maraknya teknologi komunikasi dan informasi di dunia. Dampak dari maraknya teknologi yang begitu pesat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apalagi dengan ledakan informasi yang terjadi saat ini, masyarakat disuguhkan berbagai informasi yang sangat mudah untuk didapat sesuai dengan kebutuhan.

Jaringan internet yang ditawarkan dari berbagai provider, dengan mudah masyarakat dapat menyambungkan jaringan internet baik untuk rumahan maupun masyarakat yang bergerak kemana saja atau *mobile*. Berbagai fasilitas dari provider internet sangat memanjakan masyarakat yang haus akan informasi, baik informasi ilmiah, hiburan, intertainment dan lain-lain dengan mudahnya dapat diakses dari berbagai tempat.

Menurut sumber Kompas.com yang dirujuk dari eMarketer.com tahun 2014, dapat memprediksikan bahwa pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 112,6 juta orang, jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke enam dari pengguna Internet seluruh dunia. Sedangkan hasil survei tahun 2016 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna Internet Indonesia tahun 2016 sebesar 136,7 juta, berarti sudah melebihi prediksi tahun 2014. Sehingga dengan melihat data tersebut masyarakat Indonesia boleh dibilang sebagai masyarakat yang sudah terbuka dengan berbagai informasi atau tidak asing dengan literasi informasi.

Penggunaan handphone (HP) bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi, bahkan HP merupakan salah satu kebutuhan, terutama untuk berkomunikasi. Menurut Mochtar Riady (Chairman Lippo Group, 2014), menyatakan bahwa semua masyarakat Indonesia sudah menggunakan HP. Menurut beliau juga, bahwa peredaran HP di Indonesia sampai dengan

tahun 2014 adalah 260 juta unit, padahal jumlah penduduk Indonesia ± 240 juta, sehingga per orang memiliki HP 2 -3 unit.

Dengan peredaran HP dan penggunaan internet yang begitu besar, maka masyarakat Indonesia sudah dapat disebut sebagai masyarakat informasi, disamping itu masyarakat Indonesia boleh dibilang melek (Literate/literasi) terhadap berbagai hal seperti: melek huruf, melek informasi, melek media sehingga dapat disebut bahwa masyarakat Indonesia sudah multi literasi. Dengan keadaan tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan tentang multi literasi pada masyarakat informasi khususnya di Indonesia.

### **Literasi**

Istilah literasi sudah sering didengar dalam berbagai hal. Istilah literasi tidak lepas dari istilah keberaksaraan dan berkaitan dengan proses membaca dan menulis. Seperti pengertian berikut secara bahasa, literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca. Sehingga literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

Literasi bukan hanya sekedar kegiatan yang berkaitan dengan baca dan tulis semata. Menurut Nurhadi (2016) menyatakan bahwa dengan perkembangan kebutuhan dan kepandaian manusia, maka cakupan dari kegiatan literasi lebih melebar yaitu berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, dan hubungan sosial serta terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya. Sesuai dengan deklarasi UNESCO (2003) literasi terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi persoalan.

Karena literasi sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia maka, pada Desember 2004 Pemerintah Indonesia meluncurkan “Pergerakan Keaksaraan” dalam rangka menekan tingkat buta aksara bagi penduduk Indonesia. Menurut data yang dikemukakan Jalal (2005) bahwa tingkat keberaksaraan orang dewasa di Indonesia 15,4 juta jiwa. Dengan gerakan keaksaraan yang diluncurkan pada tahun 2004 dan kerja keras dari berbagai pihak maka pada tahun 2017 dalam acara puncak “Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 2017, di GOR Ewangga, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat”, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyatakan bahwa “Tingkat buta huruf di Indonesia sudah mengalami penurunan yang secara

drastis sekarang tinggal 2,07 persen untuk negara yang jumlah penduduknya terbesar ke-4 di dunia, ini suatu prestasi yang luar biasa," (Tribunnews.com)

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum terbebas dari keberaksaraan atau literasi, berarti Indonesia masih harus bekerja keras untuk menjadikan tingkat keberaksaraan 0%. Sekarang bangsa Indonesia sudah berada pada abad ke-21, di mana pada abad ini dikenal dengan era informasi atau era digital.

Dalam tulisan Sharp (2014) bahwa definisi literasi adalah "melek huruf" (literacy), berkaitan dengan perkembangan jaman maka lingkup literasi diperluas mencakup "digital, elektronik, dan ekspresi visual". Institusi pendidikan diharapkan dapat memenuhi keterampilan kebutuhan peserta didik melalui integrasi abad ke-21. Keberhasilan di abad ke-21 menuntut penguasaan keterampilan kritis sebagai berikut: literasi informasi, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, pemecahan masalah, komunikasi, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Primary English Teaching Association Australia (PETAA) memberikan pengertian bahwa literasi di abad ke-21 telah berkembang sebagai cerminan dari perubahan sosial, meningkatkan spesialisasi dan teknologi digital. Karena literasi pada saat ini memerlukan pemahaman, seleksi dan penggunaan kode multimodal serta konvensi untuk menafsirkan dan mengekspresikan gagasan, perasaan dan informasi.

Meningkatnya kompleksitas komunikasi modern sehingga memunculkan sejumlah kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan atau kemampuan lintas kurikuler bila digabungkan, dikenal sebagai literasi abad ke-21 atau disebut juga 'multiliteracies' (multiliterasi). Menurut PETAA multiliterasi disebut juga dengan 'literasi baru', karena merupakan penggabungan keterampilan yang lebih luas mencakup melek visual, melek informasi, melek budaya dan keaksaraan digital. Literasi baru digabungkan dengan literasi cetak dapat menciptakan kemampuan yang memungkinkan masyarakat untuk mendekati, memahami dan menggunakan jenis teks baru.

Menurut PETAA (2015) menyatakan ada 3 poin kunci literasi abad 21 yaitu sebagai berikut:

- a. Siswa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai teks yang akan mereka ciptakan dan temui di masa depan, termasuk teks cetak dan jenis teks yang muncul dari teknologi saat ini dan masa depan.

- b. Literatur abad ke-21 adalah aspek kritis pendidikan bahasa dan literasi siswa serta kemampuan melek huruf yang lebih tradisional.
- c. Guru dapat membuat literatur baru yang eksplisit bagi siswa dengan menggabungkan secara sadar dan sistematis dalam pelajaran bahasa serta area pembelajaran lainnya, dan melalui pedagogi kelas yang terampil dan fleksibel.

### **Multiliterasi**

Di atas telah dinyatakan oleh PETAA bahwa penggabungan beberapa literasi menjadi multiliterasi atau literasi baru. Menurut Cairtin (2016), menyimpulkan dari berbagai literatur bahwa multiliterasi atau multimodal memiliki dua definisi yaitu: mengacu pada cara bahasa dan makna yang berkaitan dengan konteks budaya atau sosial.

Istilah multiliterasi pada umumnya dipahami sebagai cara pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh dan tercermin melalui representasi multimodal. Bentuk tertulis kemudian digabungkan dengan representasi pendengaran, visual, spasial, lisan dan taktil untuk menghasilkan makna baru. Makna dibangun dengan cara multimodal yaitu mengumpulkan informasi dan belajar melalui berbagai sumber, antara lain: buku, e-book, Websites, Films and video clips, Infographics, Social media posts dan Podcasts.

Multiliterasi menurut New London Group adalah sebuah pedagogi multiliterasi yang menerima dan mendorong berbagai perspektif, alat, dan perspektif linguistik, budaya, komunikatif, dan teknologi, kemudian digunakan sebagai alat bantu dalam mempersiapkan diri yang lebih baik menuju dunia global yang cepat berubah. Di samping itu juga dapat digunakan untuk terus membantu seseorang memiliki peluang seluas mungkin dalam menciptakan kehidupan baru dan juga berkontribusi pada komunitas mereka di masa depan mereka.

Multiliterasi berhubungan dengan multimodalitas, karena banyak mode didorong untuk digunakan dalam berbagai bentuk ekspresi. Selain itu, berbagai teknologi dan saluran komunikasi memungkinkan berbagai mode untuk digunakan dalam mengekspresikan diri mereka sendiri.

Representasi informasi, terutama di media, yang muncul dalam format multimodal, dapat meningkatkan pentingnya memahami representasi dan kepercayaan pada jenis format multimodal atau multiliterasi. Untuk mempermudah belajar dan mengumpulkan informasi dalam konteks



multimodal secara efektif, yang perlu dilakukan adalah mereka harus terlebih dahulu belajar menggunakan berbagai literatur. Kemampuan untuk belajar dalam berbagai bentuk, diharapkan dapat membantu mengumpulkan informasi secara efektif, sehingga menghasilkan pemahaman dan mencerminkan pengetahuan mereka.

Selanjutnya Caitrin menyampaikan bahwa terdapat beberapa kompetensi dalam multiliterasi antara lain:

1. Literasi visual. Memahami dan merenungkan melalui sarana visual, termasuk kemampuan mengolah dan merepresentasikan pengetahuan melalui gambar
2. Melek huruf tekstual. Membaca untuk memahami dan mengevaluasi menggunakan berbagai sumber (sastra, artikel, dokumen sejarah) serta kemampuan untuk mencerminkan pengetahuan melalui cara tertulis.
3. Literasi digital. Mengumpulkan dan mensintesis informasi dari media digital, termasuk sumber online atau media.
4. Literasi teknologi. Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab untuk belajar, berkomunikasi, mendistribusikan, dan menciptakan.

Segala hal yang menyampaikan arti bisa dinyatakan sebagai ‘teks’. Ragam literasi jamak disebut multiliterasi (Mursyid, 20..). Jika seseorang mampu berliterasi, maka dikatakanlah individu yang "literat". Literat dalam segala hal bentuk teks. Literasi dalam konteks kemampuan berpikir menggunakan sumber pengetahuan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis literasi. Literasi dalam bentuk gambar dinamakan sebagai *visual literacy*. Kemudian literasi dasar (*basic literacy*), literasi perpustakaan (*library literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), dan literasi visual (*visual literacy*).

Yunus (2015), menyatakan bahwa persinggungan literasi dengan konteks, budaya, dan media komunikasi dikenal dengan istilah multiliterasi. Multiliterasi merupakan kemampuan berbahasa yang bertemali dengan konteks, budaya dan media. Wujud dasarnya adalah keterampilan berbahasa, yakni keterampilan membaca, menulis, berbicara dan menyimak. Dalam penerapannya keempat keterampilan tersebut dipadukan dengan keterampilan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, guru di

sekolah atau bahkan masyarakat harus berpikir bahwa literasi merupakan sebuah konsep yang berkembang dan mempunyai konsekuensi pada penggunaan berbagai media digital di kelas, sekolah dan masyarakat. Pada intinya menjadi literat pada abad informasi berarti harus mampu untuk terlibat dalam berbagai praktik literasi dan mampu menggambarkan berbagai perangkat keterampilan literasi dalam keberagaman domain literasi.

Pengertian multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol dan multimedia. Media dalam konteks pembelajaran multiliterasi memiliki makna yang lebih luas yaitu segala bentuk peranti yang digunakan oleh siswa untuk membangkitkan, peroleh pemahaman, keterampilan dan juga peranti yang digunakan untuk menyalurkan berbagai pemahaman.

Media multiliterasi bersifat multimedia yang mencakup literasi visual, tekstual, performa, seni dan literasi digital. Dengan demikian media pembelajaran multiliterasi bisa berupa teks, gambar, performa/aksi, musik, seni drama, pahatan, internet, dan segala bentuk peranti yang mengandung unsur keliterasian. Media pembelajaran multimedia dapat dijadikan pembangkit dan pembentuk pemahaman dan keterampilan. Pada dasarnya adalah berbagai media yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup (Yunus, 2015) :

1. media literasi tekstual, beragam teks yang ada
2. media literasi visual, misalnya karikatur, simbol tertentu, rambu lalu lintas, lukisan dan beragam media visual lainnya yang didalamnya terkandung pesan dan makna
3. media literasi musikal/seni, misalnya syair lagu, instrumentalia, musikalisasi, puisi, dan beragam musik lainnya
4. media literasi performa, misalnya teater, drama, performing art, pembacaan puisi, tari, dan sebagainya
5. media literasi digital, misalnya berbagai bentuk informasi di internet, film, power point, dan media digital lainnya.

Menyimak uraian di atas, bahwa kemampuan multiliterasi merupakan suatu keterampilan seseorang yang dapat membantu dalam memahami suatu pengetahuan. Kemampuan multiliterasi sangat bermanfaat terutama pada dunia pendidikan, siswa akan lebih mudah memahami materi yang

diberikan oleh guru. Dan guru juga harus menyesuaikan dengan pengetahuan baru tersebut. Kemunculan keterampilan multiliterasi diakibatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

### **Masyarakat Informasi**

Masyarakat yang sudah sadar akan segala bentuk informasi dan menggunakan informasi sebagai basis atau dasar dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, dikenal dengan masyarakat informasi. Menurut William J. Martin (1995), masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya.

Anggidetyas (2012) dalam tulisannya menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah sebuah konsep masyarakat yang mengalami berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, perjalanan dan sarana hiburan yang tersedia.

Dalam masyarakat informasi keberadaan teknologi informasi sangat penting sebagai sarana mentransformasikan setiap aspek budaya, politik, kehidupan sosial yang didasarkan pada produksi dan distribusi informasi. Menurut Salmubi (2015) unsur-unsur masyarakat informasi itu paling tidak berupa: 1) Infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar (bandwidth) yang harganya terjangkau oleh masyarakat, 2) Masyarakat pemakai dan penyedia informasi, 3) Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang teknologi informasi, 4) Industri-industri teknologi informasi yang sangat luas dan beragam, dan 5) Otoritas (regulator) yang mengatur tentang teknologi informasi dan bersifat sebagai katalisator yang efisien.

Respati (2014) dalam tulisannya menyatakan masyarakat informasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat yang dapat memaksimalkan informasi dan teknologi komunikasi baru (ICT). Mereka memanfaatkan teknologi baru tersebut dalam berbagai sendi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Masyarakat berinteraksi dalam komunitas virtual, termasuk di dalamnya menghimpun hingga berbagi informasi. Teknologi Informasi Komunikasi (ICT) memegang peranan sebagai teknologi kunci (*enabler technology*) menuju era masyarakat informasi.

Indeks Pembangunan teknologi informasi komunikasi (ICT) internasional (International Development Indeks) yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) bertujuan untuk mengukur: 1) perkembangan teknologi informasi komunikasi suatu negara relatif terhadap negara-negara lain; 2) kemajuan pengembangan teknologi informasi komunikasi (ICT) antara negara-negara berkembang dan negara maju; 3) kesenjangan digital dalam pengembangan teknologi informasi komunikasi (ICT) di berbagai negara sesuai dengan tingkatannya; dan 4) potensi pengembangan teknologi informasi komunikasi (ICT) beberapa negara sejauh mana suatu negara dapat menggunakan teknologi informasi komunikasi (ICT) untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang tersedia (Meiningsih, 2011 dalam respati, 2014).

### **Masyarakat Informasi Indonesia**

Seperti telah diuraikan di atas bahwa masyarakat informasi merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Akses internet sudah menjadi kebutuhan dalam mendapatkan informasi dalam berbagai bidang, penggunaan internet pun bukan hanya untuk orang yang sudah bekerja namun juga merambah ke ibu rumah tangga.

Menurut Anggidetyas (2012) tingginya kebutuhan akan Informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini, dengan di fasilitasi oleh kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kemudahan akses internet melalui jaringan wifi gratis, alat teknologi penunjang, kemudahan bertransaksi, dan kemampuan bertukar data digital secara jarak jauh melalui internet menjadi salah satu contoh ciri bahwa masyarakat Indonesia sedang memasuki tahap sebagai Masyarakat Informasi. Masyarakat Indonesia dewasa ini aktif mencari jawaban akan kebutuhannya, ini menandakan masyarakat Indonesia telah membuka pikirannya untuk berkembang agar dapat mengikuti arus Globalisasi yang akhir-akhir ini marak menyerpa Indonesia.

Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan perangkat teknologi komunikasi dalam upaya memenuhi kebutuhannya makin diperjelas dengan fenomena suka mengadopsi teknologi mutakhir, prestise kepemilikan perangkat teknologi informasi komunikasi terkini mengalahkan level kebutuhan. Perangkat yang digunakan tidak hanya sebatas penggunaan komputer, baik komputer pribadi atau kantor maupun sekolah,

tetapi juga perangkat komunikasi nirkabel lainnya seperti telepon seluler, personal data assistant, tab atau gadget lain yang terhubung dengan internet.

Perangkat komunikasi masyarakat informasi saat ini telah bertransformasi menjadi perangkat komunikasi yang tidak sekedar menawarkan fitur telekomunikasi tetapi juga akses data. Masyarakat informasi global menganggap perangkat komunikasi nirkabel menjadi kebutuhan yang turut mempengaruhi gaya hidup, terutama dalam mengakses dan mendistribusikan informasi.

Memperhatikan masyarakat Indonesia saat ini sudah terkena dampak kemajuan teknologi informasi, terlihat dengan kepemilikan telepon seluler hampir setiap orang mempunyai telepon seluler. Penggunaan telepon seluler pintar (smart phone) yang menawarkan fitur-fitur canggih yang memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan teman, kerabat menggunakan jaringan internet serta aplikasi-aplikasi media social yang sedang marak. Berkembangnya jaringan sosial virtual menjadi babak selanjutnya dalam era transisi menuju masyarakat informasi. Masyarakat Indonesia kemudian menjalin jaringan untuk berbagi informasi tanpa kendala jarak dan waktu.

Berdasarkan riset We Are Social dan Hootsuite 2017 yang diunggah pada Senin, 22 Mei 2017, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia tumbuh 51persen dalam kurun waktu satu tahun. 51% berasal dari jumlah pengguna internet 132 juta dari sekitar 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah handphone yang beredar melebihi dari jumlah penduduk, yakni 371,4 juta (142%). Jumlah ini meningkat sekitar 45 juta jiwa dari jumlah di tahun sebelumnya, atau sekitar 14%. Dari jumlah tersebut, 92 juta (35%) diantaranya merupakan handphone berbasis android yang bisa mengakses internet. Dari jumlah pengguna internet yang ada, 77% di antaranya menggunakan internet setiap hari, 12% menggunakan internet beberapa hari per minggu, 7% menggunakan internet beberapa kali per bulan, dan hanya 3% saja yang mengakses beberapa kali per tahun. Kemudian, pengguna Facebook di Indonesia saat ini sebesar 106 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 87% pengguna facebook menggunakan handphone (Kallawaly, 2017).

Menyimak fenomena dan data di atas yang dikemukakan oleh Kallaway, dengan demikian masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat informasi. Karena 35% pengguna handphone berbasis android yang mudah

mengakses internet. Dengan kemudahan mengakses internet tersebut, pengguna akan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada kenyataan saat ini mayoritas penggunaan internet masih digunakan untuk mengakses facebook. Walaupun demikian berarti masyarakat Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat Informasi.

Dengan akses facebook, juga berarti masyarakat Indonesia sudah mempunyai keterampilan dalam berbagai media atau sudah multiliterasi. Karena facebook selain menampilkan interaksi antar pengguna dengan memposting status pribadi, juga dapat digunakan untuk menyajikan berbagai ragam informasi seperti pengumuman penting, konsultasi antar anggota, mengunggah film-film dan masih banyak lagi dalam bentuk multimedia.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia:

1. sudah memanfaatkan dampak perkembangan teknologi informasi, dengan kenyataan setiap warga Indonesia memiliki kurang lebih 2 unit, bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi.
2. Akses terhadap internet sudah mencapai 51% berarti masyarakat Indonesia sadar akan dampak teknologi informasi dan komunikasi dengan mencari informasi menggunakan jaringan.
3. Sudah familiar dengan multiliterasi, karena informasi yang berbasis jaringan sudah bukan dalam bentuk teks, melainkan merupakan gabungan dari berbagai literasi seperti teks, gambar, video dan gambar animasi.
4. Masyarakat Indonesia dapat dimasukkan dalam masyarakat informasi, karena 51% masyarakat mencari informasi berdasarkan informasi digital.

## Referensi

- Abidin, Yunus. (2015). Pembelajaran multi literasi: sebuah jawaban atas tantangan pendidikan abad 21 dalam konteks ke indonesiaan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Anggidetyas. (2012). Masyarakat Indonesia Sebagai Masyarakat Informasi. <https://anggidetyas.wordpress.com/tag/masyarakat-indonesia-sebagai-masyarakat-informasi/> 10-8-2017
- APJII Revisi Hasil Survei Internet. (2016). <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3339890/apjii-revisi-hasil-survei-internet-2016> download 12-10-2017
- Blake, Caitrin. (2016). Defining Multiple Literacies: The Expression of Learning In Many Formats. Nebraska: Concordia University <https://online.cune.edu/defining-multiple-literacies/> unduh 22-10-2017
- <http://www.beritasatu.com/digital-life/224935-bangsa-indonesia-sudah-jadi-masyarakat-informasi.html> 10-8-17
- <http://www.komunikasipraktis.com/2017/04/pengertian-literasi-secara-bahasa-istilah.html> unduh 22 Oktober 2017
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/09/tingkat-buta-aksara-di-indonesia-turun-drastis-kini-tinggal-207-persen> Sabtu, 9 September 2017 05:32 WIB, unduh 22-10-2017
- Jalal, Fasli; Nina Sardjunani. ((2005).Peningkatan Keaksaraan Demi Harapan Yang Lebih Baik Untuk Indonesia. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001442/144270ind.pdf> unduk 22-10-2017
- Kallawaly, Samuel H. (2017).Data Pengguna Internet Indonesia Tahun 2017. <https://samuelkallawaly.wordpress.com/2017/06/02/data-pengguna-internet-indonesia-tahun-2017/> unduh 23-10-2017
- Martin, William J. (1995). Global Information Society. London: Aslib Gower.

- Multiliteracies (New London Group)<https://www.learning-theories.com/multiliteracies-new-london-group.html> unduh 22-10-2017
- Mursyid. (2017). Memahami Kompetensi Multiliterasi. <http://mursyid.gurusiana.id/article/memahami-kompetensi-multiliterasi-1259885> 22-10-2017
- Nurhadi. (2016). Literasi Membawa Bangsa Lebih Pandai dan Bijak <http://literasi.jabarprov.go.id/baca-artikel-473-literasi-membawa-bangsa-lebih-pandai-dan-bijak.html> unduh 22-10-2017
- Pengguna Internet Indonesia <https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan> media 10-8-17
- Pertumbuhan Pengguna Internet, Indonesia Nomor 1 di Dunia, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/22/pertumbuhan-pengguna-internet-indonesia-nomor-1-di-dunia> unduh 23-10-2017
- Primary English Teaching Association Australia. (2015). 21<sup>st</sup> Century Literacies: Literacy in 21<sup>st</sup> Century has Expanded. [http://www.petaa.edu.au/imis\\_prod/w/About/PETAA\\_Position\\_Papers/w/About/PETAA\\_position\\_papers.aspx?hkey=20cba852-0cd4-45e0-bae7-ec24e3f87115](http://www.petaa.edu.au/imis_prod/w/About/PETAA_Position_Papers/w/About/PETAA_position_papers.aspx?hkey=20cba852-0cd4-45e0-bae7-ec24e3f87115) download 14-8-2017
- Respati, Wira. (2014). Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi Indonesia, HUMANIORA Vol.5 No.1 April 2014: 39-51 <https://media.neliti.com/media/publications/167082-ID-transformasi-media-massa-menuju-era-masy.pdf> unduh 23-10-2017
- Salmubi. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Upaya Memuliakan Kepustakawanan Nasional Menuju Masyarakat Informasi Indonesia 2015. <http://pustakawan.perpusnas.go.id/jurnal/2014/> diunduh 10-8-2017
- Sharp, Laurie A. (2014). Literacy in the digital age. The Language and Literacy Spectrum vol. 24 p. 74-85, New York State: The International Reading Association



## **Pengaruh Iklan Melalui Media Televisi Bandar Udara terhadap peningkatan *Brand Awareness* Universitas Terbuka**

**Ace Sriati Rachman**

**Ami Pujiwati**

**Olivia Idrus**

**Universitas Terbuka**

### **PENDAHULUAN**

Secara umum pengembangan SDM dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendidikan dan pelatihan. Sebagai salah satu bentuk pengembangan SDM, pendidikan mempunyai peran dan posisi strategis. Pertama, pendidikan harus berlangsung terus menerus selama masih terdapat kebutuhan dunia kerja. Kedua, pendidikan dipercaya sebagai satu-satunya cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, dalam proses sistematis dan terkontrol secara ketat. Ketiga, umumnya pendidikan menjadi satu-satunya alat untuk memelihara, mengembangkan dan mengapresiasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki. Keempat, pendidikan berkorelasi positif terhadap kemajuan sebuah organisasi atau perusahaan, bahkan sebuah negara (Supartomo, 2004).

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan dengan didirikannya Universitas Terbuka (UT) pada tahun 1984. Pendirian UT yang menerapkan sistem belajar jarak jauh ditujukan untuk: a) memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka tinggal untuk memperoleh pendidikan tinggi; b) menampung lulusan SLTA yang tidak tertampung di PTN dan PTS; c) mengembangkan pelayanan pendidikan tinggi bagi mereka yang bekerja atau karena alasan lain tidak dapat melanjutkan belajar di perguruan tinggi tatap muka, serta d) mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain.

Jumlah mahasiswa yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi, secara proporsional akan memberikan kontribusi dalam mendukung kelangsungan dan penyelenggaraan proses pendidikan, yang pada akhirnya dapat

memberi dukungan pada peningkatan kualitas sivitas akademiknya baik mahasiswa, tenaga pengajar, tenaga administrasi dan dalam jangka panjang dapat memantapkan posisi strategis perguruan tinggi itu sendiri. (Djalal Fuadi, 2012). Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui UT dengan sistem pendidikan jarak jauh ini mendapat sambutan yang cukup hangat dari kalangan masyarakat dari berbagai tingkatan dan latar belakang (Ratnawati, 2004). Hal ini dibuktikan dengan jumlah mahasiswa UT per 4 Desember 2014 yang sudah mencapai 426.503 (<http://www.ut.ac.id/tentang-ut/ut-dalam-angka.html>). Sebagian besar mahasiswa UT adalah mahasiswa program Pendidikan Dasar (Pendas). Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen yang mensyaratkan guru berijazah Sarjana atau Diploma IV sangat berpengaruh terhadap jumlah mahasiswa Pendas di UT yang mencapai 72,32%. Sementara jumlah mahasiswa non Pendas hanya sebanyak 27,68%, yang didominasi oleh mahasiswa dari FISIP dan diikuti oleh FEKON dan FMIPA (<http://www.jpnn.com/read/2013/07/26/183682/2015-Belum-Sarjana,-Guru-Dijadikan-Tenaga-Administrasi->).

Di tengah-tengah persaingan yang terjadi saat ini, UT tetap harus mengantisipasi terjadinya penurunan mahasiswa yang diakibatkan oleh persaingan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan promosi dan kegiatan periklanan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Periklanan merupakan salah satu dari alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat. Periklanan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran (Kotler, 1997). Meskipun tidak secara langsung berakibat terhadap pembelian, iklan merupakan sarana untuk membantu pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan konsumen dalam usahanya untuk menghadapi pesaing. Kemampuan dari calon konsumen dalam mengenali maupun mengingat suatu produk didefinisikan sebagai *brand awareness*. Dengan terciptanya *brand awareness* oleh calon konsumen akibat pemasangan iklan, maka diharapkan akan mendorong terjadinya perubahan perilaku konsumen menjadi seperti yang diinginkan oleh produsen (Intan Puspitasari, 2009). Sehingga *brand awareness* menjadi salah satu faktor penting yang dibutuhkan para pelaku usaha untuk memperkuat brand produknya. Sebab, tak bisa kita pungkiri bila semakin banyak konsumen yang mengingat brand

produk Anda, maka semakin besar pula intensitas pembelian yang akan mereka lakukan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UT untuk meningkatkan jumlah mahasiswa, khususnya mahasiswa non pendas serta mengantisipasi penurunan jumlah mahasiswa Pendas, adalah dengan melakukan promosi melalui iklan di berbagai media, baik cetak maupun non cetak (elektronik). Media-media yang digunakan tersebut antara lain melalui pemanfaatan spanduk, leaflet, booklet, iklan advertorial di surat kabar, spot iklan di radio, sosialisasi dan promosi di SMA, talk show, partisipasi dalam pameran pendidikan serta iklan di televisi, baik di TV komersial maupun di TV Kereta Api dan Bandara. Upaya ini dilakukan selain untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa UT, juga untuk memelihara ingatan masyarakat akan adanya UT.

Salah satu bentuk promosi yang dilakukan UT pada media elektronik adalah pemasangan iklan di TV Kereta Api. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa angkutan udara. Pemilihan media TV bandara sebagai media periklanan mempunyai alasan karena paradigma masyarakat akan pemilihan alat transportasi telah berubah. Sebelum banyak bermunculan maskapai baru dengan tarif yang relatif terjangkau, masyarakat cenderung memilih alat transportasi darat. Namun, setelah banyak maskapai baru bermunculan dan menawarkan berbagai harga yang cukup menggiurkan masyarakat, maka masyarakat pun mulai beralih ke alat transportasi udara. Sehubungan dengan hal tersebut maka studi ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas iklan UT pada TV Bandara terhadap *brand awareness*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan menjelaskan efektivitas iklan UT di TV Bandara dalam menumbuhkan *brand awareness* UT pada masyarakat.

### **Iklan dalam Kajian Komunikasi**

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari iklan, antara lain Kotler yang mengartikan iklan adalah semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar. Menurut Koniq, iklan adalah informasi yang *up to date* kepada konsumen mengenai komoditi-komoditi dan dorongan-dorongan kebutuhan tertentu yang bertujuan untuk menjaga tingkat produksi (Ridwan, 2012). Selanjutnya Riyanto mengartikan iklan

sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat (Ridwan, 2012). Iklan juga diartikan oleh Duriyanto (Intan, 2009) sebagai “semua bentuk aktifitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu”. Sedangkan menurut Rhenald Kasali, periklanan adalah suatu komunikasi massa dan harus dibayar untuk menarik kesadaran menanamkan informasi, mengembangkan, sikap, atau mengharapkan adanya suatu tindakan menguntungkan (Auditomo, 2009).

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip dari iklan adalah (Ridwan, 2012):

- a. Mengandung pesan tertentu. Dimana pesan yang disampaikan oleh sebuah iklan dapat berbentuk perpaduan antara pesan verbal maupun non verbal.
- b. Dilakukan oleh komunikator (sponsor). Komunikator dalam iklan dapat berasal dari kelompok masyarakat, perseorangan, lembaga atau organisasi, bahkan negara.
- c. Dilakukan dengan cara *non personal*. *Non Pesonal* berarti tidak dalam bentuk tatap muka, melainkan melalui media (atau disebut media periklanan).
- d. Ditujukan untuk khalayak tertentu. Dalam dunia periklanan, khalayak sasaran cenderung bersifat khusus. Pesan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada semua orang, melainkan pangsa pasar tertentu. Sehingga pesan yang diberikan harus dirancang khusus yang sesuai dengan target khalayak yang dituju.
- e. Dalam penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan cara membayar. Namun, dalam kegiatan periklanan, istilah membayar harus dimaknai secara luas. Karena kata membayar tidak saja dilakukan dengan alat tukar uang, melainkan juga dengan cara barter berupa ruang, waktu dan kesempatan.
- f. Penyampaian pesan tersebut, diharapkan memberikan dampak tertentu. Melalui pesan yang efektif dalam iklan, diharapkan pesan akan mampu memberikan dampak tertentu pada khalayak yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh komunikator.

Periklanan dikenal sebagai pelaksana beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya. Fungsi-fungsi komunikasi tersebut adalah (Intan, 2009 dan Ridwan, 2012):

- a. Memberi informasi (*informing*), yakni membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik konsumen tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Dengan iklan maka akan mempercepat berubahnya suatu kondisi dari keadaan yang semula tidak bisa mengambil keputusan terhadap produk menjadi dapat mengambil keputusan.
- b. Membujuk (*persuading*). Hal ini akan membangkitkan keinginan dari khalayak sesuai pesan yang diiklankan. Sehingga iklan yang efektif akan mampu membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan.
- c. Mengingatkan (*reminding*), dimana iklan berfungsi untuk menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Hal ini berarti iklan mampu meneguhkan keputusan yang telah diambil oleh khalayak.
- d. Memberi nilai tambah (*adding value*), dimana akan memberi nilai tambah pada konsumen dengan mempengaruhi persepsi konsumen.

Maka secara umum, perusahaan mengiklankan produknya dengan tujuan untuk (Durianto dalam Ridwan, 2012):

- a. Menciptakan kesadaran pada suatu merek dibenak konsumen (*create awareness*). Dengan *brand awareness* yang tinggi maka diharapkan akan mudah untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi pula.
- b. Mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai atribut dan manfaat suatu produk.
- c. Mengembangkan atau mengubah citra atau personalitas sebuah merek. Karena suatu merek terkadang mengalami dilusi sehingga perlu diperbaiki citranya.
- d. Mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan serta emosi. Tujuannya agar ada hubungan emosi antara konsumen dengan merek tersebut.
- e. Menciptakan norma-norma kelompok.
- f. Mengendapkan perilaku, dimaka perilaku konsumen dapat dibentuk melalui iklan.
- g. Mengarahkan konsumen untuk membeli produknya dan mempertahankan *market power* perusahaan.

- h. Menarik calon konsumen menjadi konsumen yang loyal dalam jangka waktu tertentu.
- i. Mengembangkan sikap positif calon konsumen yang diharapkan dapat menjadi pembeli potensial di masa yang akan datang.

Untuk melakukan pendekatan kepada konsumen dan agar pesan mudah diterima, maka perlu digunakan daya tarik (*appeals*). Daya tarik yang digunakan dalam pesan iklan harus memiliki 3 karakteristik, yaitu (Intan, 2009):

- a. *Meaningful*, yaitu menunjukkan manfaat yang membuat konsumen lebih menyukai atau lebih tertarik pada produk yang diiklankan.
  - b. *Distinctive*, yaitu memiliki daya tarik yang khas/berbeda dimana iklan harus menyatakan apa yang membuat produk mereka lebih baik dari produk-produk pesaing.
- Believable*, yakni dapat dipercaya atau tidak ada keraguan konsumen atas produk yang ditawarkan.

### Kesadaran Merek (*Brand Awareness*)

*Brand Awareness* dapat didefinisikan sebagai kemampuan pembeli potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merk merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Dalam hal ini tentunya bisa meliputi nama, gambar/ logo, serta slogan tertentu yang digunakan para pelaku pasar untuk mempromosikan produk-produknya (ajapresentasi.com/2009/04/brand-awareness-dan-top-of-mind).

Menurut Aaker, *brand awareness* sendiri didefinisikan menjadi 4 tingkatan, yakni sebagai berikut: (<http://bisnisukm.com/brand-awareness.html>)

1. *Unaware of brand* (tidak menyadari merek)  
Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek.
2. *Brand recognition* (pengenalan), merupakan tingkatan yang paling rendah, dimana para konsumen baru mengenal sebuah merek dan masih membutuhkan alat bantu untuk bisa mengingat merek tersebut.
3. *Brand recall* (mengingat kembali), kesadaran merek langsung muncul di benak para konsumen setelah merek tertentu disebutkan. Berbeda dengan *recognition* yang membutuhkan alat bantu, *brand*

*recall* hanya membutuhkan pengulangan/ penyebutan ulang untuk mengingat merek produk.

4. *Top of mind* (puncak), adalah tingkatan tertinggi dimana merek tertentu telah mendominasi benak para konsumen, sehingga dalam level ini mereka tidak membutuhkan mengingat apapun untuk bisa mengenali merek produk tertentu.

Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh konsumen aware terhadap sebuah brand antara lain: (<http://dhanyramadha.wordpress.com/2012/10/14/brand-equity-brand-awareness-perceived-quality-dan-brand-loyalty>)

- a. *Recall* yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya merek apa saja yang diingat.
- b. *Recognition* yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut termasuk dalam kategori tertentu.
- c. *Purchase* yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek ke dalam alternatif pilihan ketika akan membeli produk/layanan.
- d. *Consumption* yaitu seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu merek ketika sedang menggunakan produk/layanan pesaing.

Mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya berikut:

(<http://boentialoe.blogspot.com/2013/09/pengertian-kesadaran-merek-brand.html>)

- a. Suatu merek harus dapat menyampaikan pesan yang mudah diingat oleh konsumen.
- b. Pesan yang disampaikan harus berbeda dibandingkan merek lainnya. Selain itu, pesan yang disampaikan harus memiliki hubungan dengan merek dan kategori produknya.
- c. Perusahaan disarankan memakai *jingle* lagu dan slogan yang menarik agar merek lebih mudah diingat oleh konsumen.
- d. Simbol yang digunakan perusahaan sebaiknya memiliki hubungan dengan mereknya.
- e. Perusahaan dapat menggunakan merek untuk melakukan perluasan produk, sehingga merek tersebut akan semakin diingat oleh konsumen.
- f. Perusahaan dapat memperkuat kesadaran merek melalui suatu isyarat yang sesuai dengan kategori produk, merek, atau keduanya.

- g. Membentuk ingatan dalam pikiran konsumen akan lebih sulit dibandingkan dengan memperkenalkan suatu produk baru, sehingga perusahaan harus selalu melakukan pengulangan untuk meningkatkan ingatan konsumen terhadap merek.

### Media Televisi Bandar Udara

Dengan pemilihan media yang tepat, maka iklan akan memberikan kontribusi yang maksimal dalam mengenalkan produk yang ditawarkan. Menurut Kotler (dalam Fuadi, 2012), ada beberapa keunggulan dan kelemahan dalam pemilihan televisi sebagai media dalam periklanan, yaitu:

- Keunggulan: *High reach*, dapat menunjukkan sesuatu, demonstratif, *high impact*, dan bergengsi.
- Kelemahan: Pesan berlalu sangat cepat, biaya tinggi, *cluttered*, pemborosan dalam jangkauan geografis.

Selanjutnya menurut Russel (dalam Fuadi, 2012), televisi yang merupakan kombinasi antara penglihatan, bunyi (suara), gerak dan warna adalah medium nomor satu untuk para pengiklan, walaupun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Hal ini karena televisi memiliki karakteristik yang mendukung sebagai berikut (Russel dalam Fuadi, 2012):

- a. Televisi merupakan medium yang sangat kreatif dan luwes, pesan produk apapun dapat diterapkan dalam karakteristik televisi.
- b. Televisi jaringan merupakan sarana utama untuk menjangkau audiens masa.
- c. Televisi menawarkan prestise kepada para pengiklan yang tidak cukup dimiliki oleh sebagian besar media lain.

Namun demikian, televisi juga memiliki karakteristik yang tidak mendukung sebagai berikut (Russel dalam Fuadi, 2012):

- a. Pesan televisi cepat berlalu dan mudah dilupakan, maka perlu dilakukan secara berulang-ulang, dimana bila diperlukan pengulangan maka akan menggunakan biaya yang besar.
- b. Audiens televisi terpisah-pisah dengan banyaknya pilihan seperti TV kabel, stasiun independen, dan VCR yang saling bersaing untuk memperoleh waktu bagi audiens.



- c. Biaya iklan yang relatif mahal, sehingga mengakibatkan pesan-pesan iklan menjadi lebih pendek, sehingga iklan bisa menjadi tidak jelas.

Airpoteve adalah siaran TV komunitas yang khusus ditayangkan di kawasan bandar udara di Indonesia, dalam hal ini di bandara Soekarno Hatta (Soetta) dan dikelola oleh PT. Indocipta Polanusa. Jenis iklan yang ditayangkan di Airpoteve berupa TV commercial yang berdurasi 30 detik, scrolling banner dengan durasi 15 detik serta TV program dengan durasi antara 5-10 menit. Dengan pengelolaan media TV yang tersebar di lokasi-lokasi strategis seperti publik area, *check-in* area, *corridor*, *boarding lounge* dan area kedatangan, maka dipandang perlu untuk melakukan periklanan di media ini. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah adanya kenaikan yang cukup signifikan dalam dunia transportasi udara, baik dari jumlah pergerakan pesawat maupun kenaikan jumlah penumpang per tahun. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sebagai pengguna bandara ini, maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan efektifitas pemasangan iklan di bandara ([www.airpoteve.com](http://www.airpoteve.com)).

Berdasarkan website resmi airpoteve ([www.airpoteve.com](http://www.airpoteve.com)), ada beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh airpoteve dalam periklanan melalui televisi, yaitu:

- a. Program Airpoteve adalah siaran in-house yang terprogram dengan channel terkunci, sehingga tidak dapat diganti ke channel lain.
- b. Lokasi serta jumlah TV yang tersebar di seluruh area bandara, memastikan tayangan iklan akan terlihat oleh pengguna jasa bandara.
- c. Pengguna transportasi udara didominasi oleh para *decision maker*, baik di tingkat pemerintahan, pelaku usaha serta investor yang menjadi target yang sangat potensial.
- d. Jumlah penumpang pesawat terus mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun, menjadikan bandara sebagai tempat promosi yang sangat tepat.
- e. Penentuan jenis program dan jumlah tayangan yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemasang iklan.

## Penelitian-Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang periklanan maupun media yang digunakan dalam pemasangan iklan yang telah dilakukan, antara lain:

1. Djalal Fuadi (2012) berjudul Efektifitas Penggunaan Media Dalam Meraih Calon Mahasiswa Baru: Studi Kasus Pada Lima Perguruan Tinggi Swasta Di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan 1) rata-rata jumlah media yang berhasil mempengaruhi kelima PTS berbeda satu dengan yang lain, 2) variasi dan banyak model publikasi mempengaruhi jumlah calon mahasiswa pendaftar, 3) jenis media yang memiliki efektifitas tinggi adalah; mahasiswaPTS itu sendiri, Forum mahasiswa Daerah, spanduk, anjongsana ke sekolah-sekolah, dan iklan *outdoor*.
2. Puspitasi (2009) berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Iklan Dalam Menumbuhkan Brand Awareness. Berdasarkan hasil analisis, maka untuk dapat menghasilkan sebuah iklan yang memiliki efektifitas yang tinggi dalam meningkatkan brand awareness dapat dilakukan dengan pendekatan tiga buah variabel, yaitu dengan memperhatikan endorser yang digunakan dalam iklan, memperhatikan pesan yang akan disampaikan dalam iklan bersifat informatif atau mengajak konsumen serta dengan memperhatikan media yang digunakan untuk beriklan.
3. Prakoso (2013) berjudul Analisis Sikap Pemirsa Terhadap Iklan Internet Service Provider Smartfren Di Televisi. Hasil analisis menunjukkan rancangan struktur pesan dan format iklan Smartfren, secara efektif berpengaruh kepada pemirsa untuk bersikap positif terhadap Smartfren.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Soekarno Hatta (Soetta) dengan alasan bahwa mulai tahun 2013 sampai sekarang UT telah bekerja sama dengan perusahaan yang menangani TV Bandara. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian adalah bulan April sampai Oktober 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penumpang angkutan udara yang berangkat dari bandara Soetta. Sementara sampel penelitian adalah calon penumpang angkutan udara yang berada di terminal-terminal dimana terdapat titik pemutaran TV bandara. Titik pemutaran TV Bandara yang telah ada sekarang sebanyak 149 di seluruh terminal Bandara Soetta.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Ukuran sampel sebagaimana dalam metode statistik menghasilkan dasar untuk mengestimasi kesalahan sampling. Penentuan jumlah sampel minimum untuk *Structural Equation Modelling*(SEM) menurut Hair, dkk (1998) adalah tergantung jumlah indikator dikalikan lima. Selanjutnya menurut Ferdinand (2006), jumlah sampel yang representatif tergantung pada jumlah indikator dikalikan 5 hingga 10. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 170 responden dan proses penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode penarikan secara acak (*Random Sampling*).

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu pengamatan langsung, kuisisioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, wawancara dan studi pustaka. Pengamatan langsung dilakukan dengan melihat langsung di lapangan yaitu di Bandara Soetta.

Kuesioner akan diberikan kepada para calon penumpang angkutan udara yang berada di terminal-terminal dimana terdapat TV bandara. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengisi kuesioner maka distribusi kuesioner dilakukan kepada 200 responden.

Peubah-peubah yang diukur dalam penelitian ini terdiri dari satu peubah laten eksogen dan satu peubah laten endogen. Peubah laten eksogen tersebut adalah brand awareness, sedangkan peubah laten endogen adalah efektivitas iklan.

Jenis skala pengukuran yang digunakan baik variabel eksogen dan variabel endogen adalah skala ordinal. Skala pengukuran instrument berupa kuesioner menggunakan skala *Likert*, yaitu pertanyaan tertutup yang mengukur sikap dari keadaan yang negatif ke jenjang yang positif. Digunakan untuk mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, dengan 5 alternatif nomor untuk mengukur sikap responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini dibuat dengan menggunakan skala 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai seperti pada halaman berikut:

1

2

3

4

5

Sangat tidak setuju

sangat setuju

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian sosial. Cara penilaian terhadap hasil jawaban kuesioner dengan skala likert dilakukan dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum (skor \times f_i)}{n}$$

Setelah memperoleh rata-rata skor dari masing-masing pertanyaan, kemudian dihitung skor rata-rata akhir dengan rumus:

$$\bar{X}_{Total} = \frac{\sum \bar{X}}{\sum Pernyataan}$$

Keterangan:

$\bar{X}$  = Skor rata-rata pernyataan

$f_i$  = frekuensi yang memiliki pernyataan ke – i

n = jumlah responden

$\bar{X}_{Total}$  = skor rata-rata akhir

### Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data penelitian yang terkumpul dari observasi, kuesioner, wawancara, dan studi literatur yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan model persamaan struktural (Structural Equation Modelling – SEM) dengan menggunakan program PLS (*Partial Least Structural*) dan bantuan SPSS (*Statistical Program for Social Sciences*) 17.00. Untuk keperluan penolakan atau penerimaan hipotesis, digunakan taraf signifikansi  $P < 0,05$ . SPSS digunakan untuk menghitung validitas dan realibilitas dari instrument penelitian yang digunakan.

Analisis deskriptif adalah analisis yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menabulasi hasil kuisisioner secara manual, bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan

dari faktor-faktor *Brand Awareness*. Analisis deskriptif menggambarkan proporsi jawaban responden terhadap berbagai pilihan jawaban yang mendeskripsikan tentang faktor-faktor brand awareness dan efektivitas iklan melalui butir-butir pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner.

Selain analisa deskriptif, penelitian ini juga menggunakan analisa model *Structural Equation Model* (SEM) dengan PLS. SEM digunakan karena pada penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel secara langsung maupun hubungan antar variabel secara tidak langsung dengan menggunakan variabel *intervening*. Variabel intervening adalah variabel perantara, yaitu kepuasan kerja dan kemampuan individu.

Metode SEM menggunakan dua macam komponen, yaitu:

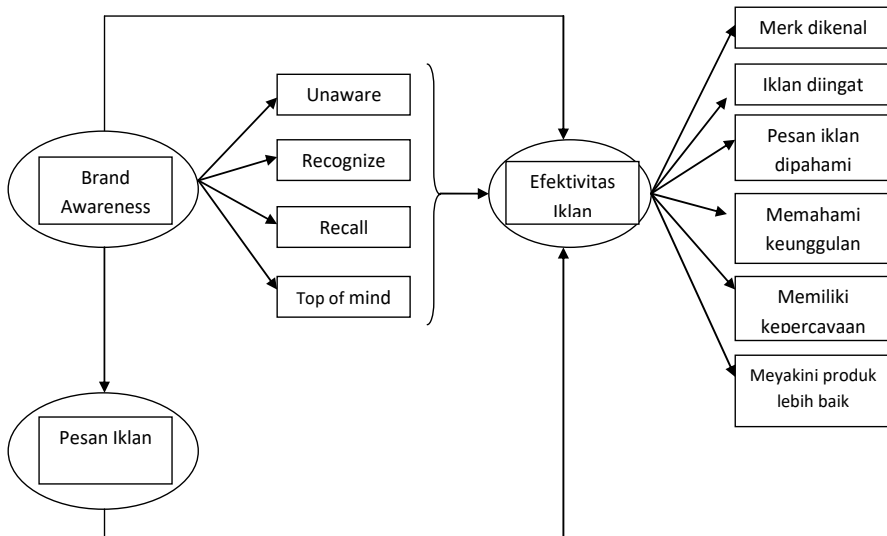
1. Variabel Laten

Variabel laten adalah variabel kunci yang menjadi perhatian. Variabel laten tidak dapat diobservasi, sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Variabel laten dibagi menjadi dua macam variabel yaitu variabel endogen ( $\xi$ ) dan variabel eksogen ( $\eta$ ). Variabel endogen. Variabel eksogen adalah suatu variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain (atau disebut variabel independen didalam model regresi). Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel lain.

2. Variabel teramati atau indikator.

Merupakan variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris. Notasi matematik untuk variabel teramati yang merupakan ukuran dari variabel eksogen ( $\xi$ ) adalah X, sedangkan yang merupakan efek dari variabel laten endogen adalah Y. pada penelitian ini indikator sebagai refleksi dari variabel laten. Indikator yang digunakan untuk menjelaskan hubungan refleksi dengan variabel laten.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Rangkuti (2002) dan Schults & Tannenbaum dalam Puspitasari (2009)

Tabel 1. Variabel Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Pengukuran
Pesan iklan	a. Iklan sangat menarik (IM1) b. Iklan mampu menarik minat (MM2) c. Iklan mampu membangkitkan	<b>Skala Likers</b>  <b>1-5</b>

	<p>keinginan untuk lebih mengetahui institusi (PT3)</p> <p>d. Iklan dapat mempengaruhi keputusan memilih perguruan tinggi (MK4)</p> <p>e. Iklan dapat mempengaruhi tindakan untuk menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih (MT5)</p>	
Brandawareness	<p>a. Pesan yang disampaikan tidak asing (PTA1)</p> <p>b. Pesan mampu memperkenalkan mengenai keberadaan UT (MP2)</p> <p>c. Pesan mampu membuat selalu ingat tentang UT (M Ingat3)</p> <p>d. Pesan yang disampaikan membuat ingin mengetahui tentang keunggulan PJJ (T keunggulan4)</p> <p>e. Pesan yang disampaikan membuat ingin mengetahui UT sebagai pilihan utama dalam memilih perguruan tinggi (PU5)</p>	<p><b>Skala Likers</b></p> <p><b>1-5</b></p>
Efektivitas	<p>a. Setelah menyaksikan iklan menjadi kenal tentang PTJJ (Kenal1)</p> <p>b. Setelah melihat iklan, merasa iklan pantas untuk diingat (PI2)</p> <p>c. Setelah melihat iklan, dapat memahami dengan jelas isi pesan yang disampaikan (M Isi3)</p>	<p><b>Skala Likers</b></p> <p><b>1-5</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Setelah menyaksikan iklan, memahami keunggulan-keunggulan UT (P Keunggulan4)</li> <li>e. Setelah menyaksikan iklan, memiliki kepercayaan terhadap PTJJ (Percaya5)</li> <li>f. Setelah menyaksikan iklan, memiliki kesan PTJJ baik dan dapat dipercaya (Kesan6)</li> <li>g. Setelah menyaksikan iklan, terdorong untuk menyebarkan informasi tentang UT (Sebar Info7)</li> </ul>	
--	---	--

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Pengujian terhadap kuesioner dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian dilakukan terhadap 30 orang responden calon penumpang pesawat domestik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Uji validitas bertujuan untuk menilai kemampuan suatu instrumen (kuesioner) dapat mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat memperoleh data serta variabel yang diteliti secara tepat.

Hasil uji validitas pada seluruh pernyataan adalah lebih kecil dari 0.05 dengan sampel yang diuji cobakan sebanyak 30. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan adalah signifikan dan dapat dinyatakan valid. Berarti responden mengerti maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kuisisioner.

### Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Uji realibilitas dilakukan dengan teknik  $\alpha$  cronbach. Dalam teknik ini instrument diuji cobakan pada sekelompok responden dan dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22.00 for windows.

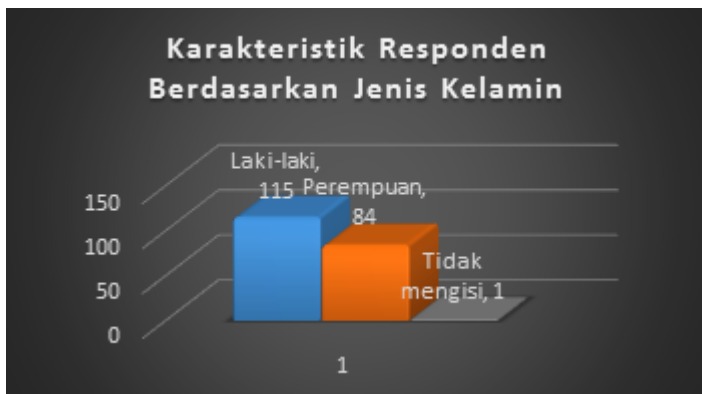


Metode Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1 – 4, 1 – 5). Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0.05, artinya instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment atau lebih besar dari 0.60.

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh Cronbach's Alpha sebesar 0.764. Nilai tersebut berarti bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sangat reliabel.

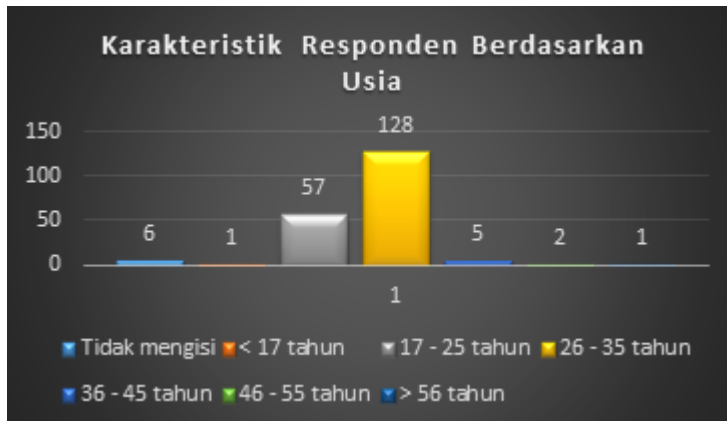
#### **Karakteristik Responden**

Berdasarkan hasil pengolahan data, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan responden didominasi oleh laki-laki dengan jumlah prosentase sebesar 57.5% dan sisa adalah perempuan sebesar 42%.



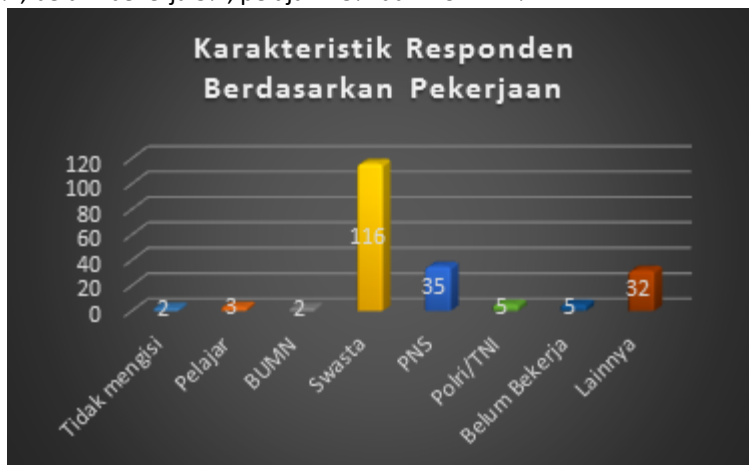
Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan mayoritas didominasi oleh usia yang berada antara 26 – 35 tahun sebesar 64%. Sementara responden yang berusia antara 17 – 25 tahun sebesar 28.5%, diikuti oleh usia antara 36 – 45 tahun sebesar 2.5%, 46 – 55 tahun sebesar 1% dan usia antara <17 tahun dan >56 tahun sebesar 0.5%.



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Terkait dengan pekerjaan, hasil pengolahan data menunjukkan sebesar 58% responden merupakan karyawan swasta. Selanjutnya yang berprofesi sebagai pegawai negeri (PNS) sebesar 17.5%, lainnya 32%, Polri/TNI sebesar 2.5%, belum bekerja 5%, pelajar 1.5% dan BUMN 1%.



Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Sementara itu, hasil pengolahan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan menunjukkan sebesar 73.5% berpendidikan

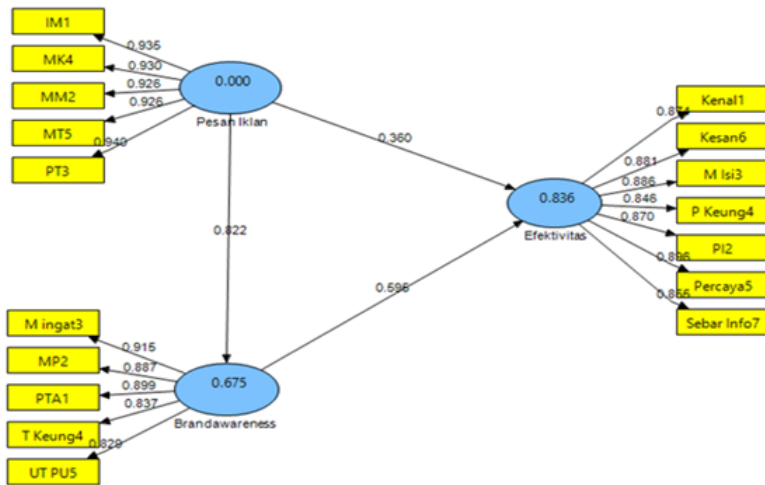
diploma (D3), sarjana 20.5%, magister (S2) 2.5% , doktor (S3) 1%, dan tidak mengisi sebesar 3%.



Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

### Hasil Analisis Partial Least Square (PLS): Pengaruh Pesan Iklan dan Brand Awareness terhadap Efektivitas Penayangan Iklan

Metode analisis yang dilakukan untuk mengetahui bentuk dan besar pengaruh variabel laten dependen (endogen) yaitu pesan iklan dan brandawareness terhadap variabel laten independen (eksogen) yaitu efektivitas penayangan iklan diolah dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) SmartPLS 2.0. Hasil analisis model penelitian untuk penelitian ini disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Model Pengaruh Pesan Iklan Dan Brandawareness Terhadap Efektifitas Penayangan Iklan Di TV Bandara Soeta (sumber: hasil data primer yang diolah *smartPLS*, 2015)

Gambar 6 menunjukkan bentuk hubungan variabel laten dengan indikator yaitu hubungan reflektif. Variabel pesan iklan direfleksikan oleh iklan sangat menarik, iklan mampu menarik minat, iklan mampu membangkitkan keinginan untuk lebih mengetahui institusi, iklan dapat mempengaruhi keputusan memilih perguruan tinggi, dan iklan dapat mempengaruhi tindakan untuk menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Variabel brandawareness direfleksikan oleh pesan yang disampaikan tidak asing, pesan mampu memperkenalkan mengenai keberadaan UT, pesan mampu membuat selalu ingat tentang UT, pesan yang disampaikan membuat ingin mengetahui tentang keunggulan PJJ, dan pesan yang disampaikan membuat ingin mengetahui UT sebagai pilihan utama dalam memilih perguruan tinggi. Selanjutnya variable efektivitas penayangan iklan direfleksikan oleh setelah menyaksikan iklan menjadi kenal tentang PTJJ, setelah melihat iklan, merasa iklan pantas untuk diingat, setelah melihat iklan, dapat memahami dengan jelas isi pesan yang disampaikan, setelah menyaksikan iklan, memahami keunggulan-keunggulan UT, setelah menyaksikan iklan, memiliki kepercayaan terhadap PTJJ, setelah menyaksikan iklan, memiliki kesan PTJJ

baik dan dapat dipercaya, dan setelah menyaksikan iklan, terdorong untuk menyebarkan informasi tentang UT.

### Evaluasi Outer Model–Reflektif pada Variabel Pesan Iklan dan BrandAwareness terhadap Efektivitas Penayangan Iklan

Menurut Ghozaly (2008) bahwa untuk evaluasi outer model-refleksi dilakukan berdasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, *Average Variance Extracted (AVE)* dan *composite reliability*.

Tabel 2. Kriteria dan Standarisasi dalam Evaluasi Outer Model – Refleksi

Kriteria	Standar	Keterangan
<i>Converge validity</i>	Nilai <i>loading</i> > 0,50	Menilai kekuatan indikator dalam merefleksikan konstruk laten
(Reliabilitas indikator)	Chin (1998) menyatakan jika di bawah 0.50 maka indikator harus di drop	
<i>Discriminant validity</i>	Nilai <i>cross loading</i> korelasi indikator ke variabel latennya lebih besar dari variabel laten-lain	Mengukur ketepatan model refleksi
<i>Composite reliability</i> ( $\rho_c$ )	$\rho_c > 0,6$	kestabilan dan konsistensi internal indikator yang baik

Sumber: Ghazali, 2005

### Convergent Validity (Reliabilitas Indikator)

Reliabilitas indikator dicerminkan dari nilai loading faktor yang merefleksikan kekuatan interelasi antara variabel laten pesan iklan, brandawareness dan efektivitas penayangan iklan terhadap masing-masing variabel indikatornya. Pada Gambar 5 menunjukkan pesan iklan yang disampaikan (PT3) merefleksikan interelasi terbesar dalam menggambarkan pesan iklan dengan nilai loading factor sebesar 0.940. Pesan yang disampaikan mampu memperkenalkan tentang keberadaan UT merefleksikan interelasi terbesar dalam menggambarkan brandawareness dengan nilai loading factor sebesar 0.915. Sementara efektivitas penayangan iklan digambarkan dengan memiliki kepercayaan terhadap

institusi pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan nilai *loading factor* sebesar 0.896. Tabel 3 menyajikan nilai *loading factor* untuk setiap variabel, yaitu pesan iklan, *brand awareness*, dan efektivitas penayangan iklan.

Tabel 3. Nilai *Loading Factor* pada Variabel Pesan Iklan, Brand awareness, dan Efektivitas Penayangan Iklan

	Pesan Iklan	Brandawareness	Efektivitas
IM1	0.935		
MM2	0.926		
PT3	0.940		
MK4	0.930		
MT5	0.926		
PTA1		0.899	
MP2		0.887	
M Target3		0.915	
Keunggulan4		0.837	
PU5		0.829	
Kenal1			0.874
PI2			0.870
M Isi3			0.886
P Keunggulan4			0.846
Percaya5			0.896
Kesan6			0.881
Sebar Info7			0.865

Sumber : hasil data primer yang diolah SmartPLS, 2014

### Discriminant Validity

Gambar 6 menunjukkan nilai korelasi variabel pesan iklan, *brandawareness*, dan efektivitas penayangan iklan dengan masing-masing indikatornya. Jika indikator-indikator pesan iklan memang menggambarkan refleksi dari pesan iklan, maka nilai korelasi indikator-indikator ini terhadap karakteristik individu haruslah lebih besar dibandingkan korelasi indikator-indikator tersebut terhadap variabel laten lainnya. Begitu pun untuk variabel dan indikator *brandawareness* dan efektivitas penayangan iklan. Hal tersebut membuktikan model reflektif untuk variabel pesan iklan,

*brandawareness* dan efektivitas penayangan iklan pada penelitian ini valid.

### **Average Variance Extracted (AVE)**

Validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar konsisten mengukur apa yang seharusnya diukur, dalam hal ini bagaimana indikator-indikator (baik pesan iklan, *brandawareness*, dan efektivitas penayangan iklan) konsisten mengukur variabel latennya masing-masing. Hal ini dapat digambarkan oleh besaran nilai Average Variance Extracted (AVE). Dilihat dari nilai AVE untuk masing-masing variabel konsisten menggambarkan variabel latennya. Hal ini dibuktikan dengan nilai AVE untuk ketiga variabel berada di atas 0.5.

Tabel 4. Nilai AVE pesan iklan, *brandawareness*, dan efektivitas penayangan iklan

No	Variabel	Nilai AVE
1	Pesan iklan	0.7616
2	Brandawareness	0.7643
3	Efektivitas penayangan iklan	0.8680

Sumber: Hasil data primer yang diolah SmartPLS, 2015)

### **Composite Reliability**

Nilai *composite reliability* dapat dilihat pada nilai *outer model loading* masing-masing variabel laten. Reliabilitas komposit, untuk masing-masing variabel memiliki nilai  $pc > 0,6$ . Nilai yang dihasilkan menunjukkan kestabilan dan konsistensi internal indikator yang baik.

Tabel 5. Nilai *Composite Reliability* Pesan Iklan, Brand awareness, dan Efektivitas Penayangan Iklan

No	Variabel	Nilai <i>Composite Reliability</i>
1	Pesan iklan	0.9705
2	Brandawareness	0.9418
3	Efektivitas penayangan iklan	0.9572

Sumber : Hasil data primer yang diolah SmartPLS, 2015)

### Evaluasi Model struktural atau Inner Model

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat analisis bootstrapping pada path coefficients, yaitu dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Hasil analisis path coefficients dapat dilihat pada tabel 10 menunjukkan nilai ttabel yang lebih besar dari 1.96 (pada selang kepercayaan 95%) untuk keseluruhan variabel laten. Hal ini berarti keseluruhan hipotesis yang dipaparkan dalam penelitian ini diterima.

Tabel 6. Nilai Path Coefficients

No	Hubungan Antar Variabel	Nilai <i>Path Cooficien</i>
1	Brandawareness →Efektivitas	5.6835
2	Pesan Iklan → Brandawareness	19.2876
3	Pesan Iklan → Efektivitas	3.5017

Sumber: hasil data primer diolah dengan SmartPLS 2015

### Hipotesis 1: *Brandawareness* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penayangan iklan

Hasil analisis data menunjukkan *brandawareness* berpengaruh secara positif terhadap efektivitas penayangan iklan, dimana nilai koefisien parameter masing-masing sebesar 5.6835. Hal ini berarti semakin sering iklan disampaikan maka efektif penayangan iklan di bandara Soeta semakin efektif.



Pengujian hipotesis satu diterima karena pada hasil analisis diperoleh nilai thitung 5.6835 lebih besar dibanding ttabel = 1.96. Hal ini menunjukkan *brandawareness* berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas penayangan iklan. Meskipun hasil penayangan iklan UT belum diikuti secara signifikan oleh penambahan jumlah mahasiswa, namun diharapkan dengan penayangan secara terus menerus masyarakat akan mengingat satu brand perguruan tinggi yaitu Universitas Terbuka.

### **Hipotesis 2: Pesan iklan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *brandawareness***

Hasil analisis data menunjukkan pesan iklan berpengaruh secara positif terhadap *brandawareness*, dimana nilai koefisien parameter bernilai 19.2876. Hal ini berarti semakin baik atau jelas pesan iklan disampaikan maka semakin terjaga *brandawareness* iklan tersebut.

Pengujian hipotesis satu diterima karena pada hasil analisis diperoleh nilai thitung 19.2876 lebih besar dibanding ttabel = 1.96. Hal ini menunjukkan pesan iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *brandawareness*.

### **Hipotesis 3: Pesan Iklan Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Efektivitas Penayangan Iklan**

Hasil studi menunjukkan pesan iklan berpengaruh secara positif terhadap efektivitas penayangan iklan. Nilai koefisien parameter untuk penelitian sebesar 3.5017. Hal ini berarti semakin baik/jelas pesan iklan yang disampaikan maka semakin efektif iklan tersebut ditayangkan.

Pengujian hipotesis diterima karena pada hasil analisis diperoleh nilai thitung 3.5017 lebih besar dibanding ttabel = 1.96. Hal ini menunjukkan pesan iklan berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas penayangan iklan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Brand awareness* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penayangan iklan. Hipotesis ini diterima yang berarti semakin sering iklan disampaikan maka penayangan iklan di bandara Soeta semakin efektif.

2. Pesan iklan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *brand awareness*. Hipotesis ini diterima yang berarti semakin baik atau jelas pesan iklan disampaikan maka semakin terjaga *brand awareness* iklan tersebut.
3. Pesan iklan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penayangan iklan. Hipotesis ketiga pun diterima yang berarti semakin baik/jelas pesan iklan yang disampaikan maka semakin efektif iklan tersebut ditayangkan.

## Referensi

- Adiutomo, Mahendro (2009). Peranan Strategi Kreatif dalam Mewujudkan Keberhasilan Promosi Iklan. *Tugas Akhir*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Anonim. (2009). Brand Awareness dan Top A Mind. Diunduh dari: [ajapresentasi.com/2009/04/brand-awareness-dan-top-of-mind/](http://ajapresentasi.com/2009/04/brand-awareness-dan-top-of-mind/), tanggal 2 Februari 2015
- Anonim. (2012). Brand Awareness. Diunduh dari: <http://bisnisukm.com/brand-awareness.html>, tanggal 8 Februari 2015
- Anonim. (2012). Brand Equity, Brand Awareness, Perceived Quality dan Brand Loyalty. Diunduh dari: <http://dhanyramadha.wordpress.com/2012/10/14/brand-equity-brand-awareness-perceived-quality-dan-brand-loyalty/> tanggal 10 Februari 2015
- Anonim. (2013). Pengertian Kesadaran Merek (Brand Awareness). Diunduh dari: <http://boentialoe.blogspot.com/2013/09/pengertian-kesadaran-merek-brand.html>, tanggal 10 Februari 2015.
- Ferdinand, Augusty. (2002). Structural Equational Modelling Dalam Penelitian Manajemen. Badan Penerbit UNDIP Semarang.
- Fuadi, Djalal. (2012). Efektifitas Penggunaan Media dalam Meraih Calon Mahasiswa Baru: Studi Kasus pada Lima Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 22. No.2. Hal 144-162.
- Hair, J.F., Jr., et.al. (1998). Multivariate Data Analysis 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall Int'l.
- Jpnn.com. (2015). Belum Sarjana Guru dijadikan Tenaga Adminstrasi. Diunduh dari: <http://www.jpnn.com/read/2013/07/26/183682/2015-Belum-Sarjana-Guru-Dijadikan-Tenaga-Administrasi->, tanggal 10 Februari 2015.

- Ridwan, Mochammad. (2012). Pengaruh Iklan PT. Djarum melalui Videotron terhadap Brand Awareness (Survey pada Pengguna Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prakoso, Wahyu Gigih. (2013). Analisis Sikap Pemirsa Terhadap Iklan *Internet Service Provider* Smartfren di Televisi. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 3. No.02. Hal 35-43.
- Puspitasari, Intan. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Iklan dalam Menumbuhkan *Brand Awareness*. *Tesis*. Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.
- Rangkuti, F. (2002). *The Power of Brand*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## **Analisis Pemahaman Kepo (*Knowing Every Particular Object*) Di Kalangan Mahasiswa**

**Pranajaya**

**Program Studi Ilmu Perpustakaan  
Fakultas Teknologi Informasi  
Universitas YARSI**

### **PENDAHULUAN**

Rasa ingin tahu merupakan fitrah dari Allah SWT karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terpisah dari lingkungannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang salah satu pengertiannya adalah membaca sudah menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus terus belajar mencari tahu. Rasa ingin tahu yang dimiliki manusia telah membawa manusia mampu menjelajah rahasia alam (Sulistyo-Basuki, 2006, hlm.16).

Perkembangan teknologi informasi yang begitu massif telah menyebabkan terjadinya ledakan informasi. Akibatnya, banyak informasi yang selalu ingin diketahui oleh manusia. Namun tidak semua informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi merupakan informasi yang valid. Kendati demikian, keingintahuan yang kuat tentang suatu konten informasi tersebut ternyata begitu digandrungi oleh banyak orang.

Di kalangan mahasiswa, rasa selalu ingin tahu pada umumnya dikarenakan takut ketinggalan informasi. Fenomena ini sering diistilahkan dengan sebutan KEPO atau kepanjangan dari *Knowing Every Particular Object*. Di kalangan mahasiswa, fenomena Kepo seperti mewabah yang seringkali menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan adakalanya bisa menjadi masalah sosial karena istilah Kepo diartikan secara negatif. Seseorang yang Kepo sering diartikan sebagai orang yang ingin tahu atau sok tahu banget, atau selalu ingin tahu urusan orang lain. Dengan kata lain, Kepo mengarah pada sifat ingin tahu dengan segala yang ada disekitarnya, khususnya, urusan orang secara berlebihan (KEPO, <https://id.crowdvoice.com>).

Kata kepo juga berasal dari kata Kaypoh. Bahasa Hokkien yang banyak dipakai di Singapura dan sekitarnya yang artinya selalu ingin tahu, mencampuri urusan orang lain, dan nggak bisa diam. Kata ini juga punya konotasi yang negatif (KEPO, <http://www.urbandictionary.com>).

Munculnya pemahaman semacam ini dalam masyarakat telah mendorong saya untuk meneliti pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan fenomena Kepo. Studi ini difokuskan pada para mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI di Jakarta.

### Kepo dan Jejaring Sosial

Esensi dari media sosial adalah memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman kita yang jauh, atau malah menemukan teman-teman baru. Dalam keterangan lain, Kepo yang merupakan akronim dari *Knowing Every Particular Object* adalah sebutan untuk orang yang serba ingin tahu detail dari sesuatu, apapun yang lewat di hadapannya selama itu terlihat oleh matanya walaupun hanya sekelebat. Dalam beberapa kasus orang kepo adalah orang yang serba ingin tahu, bisa jadi seperti semacam kecanduan untuk tahu segala hal yang sepele dan itu bisa dia unggulkan sebagai kekuatan orang tersebut. Kepo memiliki beberapa dampak positif dan beberapa dampak negative. Dampak positif Kepo antara lain: lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, menambah pengetahuan, menghasilkan uang, dan menemukan orang-orang baru. Sementara itu, dampak negatif dari Kepo meliputi: menjadi sombong akan pengetahuan yang didapatkan, terlalu mencampuri urusan orang lain, dan penyalahgunaan pengetahuan yang didapat untuk membodohi orang lain.

Menurut Weingus (2014), ada lima manfaat dari rasa ingin tahu seseorang, yaitu:

1. Dapat mempererat hubungan, rasa ingin tahu tentang seseorang dan dunia di sekitar kita akan membuat kehidupan sosial kita bertambah kaya. Ketika menunjukkan “interest” kita terhadap apa yang disampaikan seseorang kepada kita, lalu kita dapat mendiskusikannya dan seseorang tersebut akhirnya akan merasa “enjoy” menghabiskan waktu dengan kita.
2. Bisa membantu melindungi pemikiran atau otak kita, menunda atau menangguhkan mental kita tetap aktif akan memastikan

pemikiran atau otak kita tetap baik. 'Staying mentally active is definitely good for your brain'.

3. Dapat membantu mengatasi kecemasan, rasa ingin tahu juga bisa menghilangkan rasa cemas. Rasa ingin tahu kita dan perasaan yang meluap tentang seseorang yang baru memungkinkan akan menghapus rasa cemas. '...curiosity and excitement about getting to know an attractive new person might push your anxieties into the background'.
4. Berhubungan dengan rasa bahagia.
5. Membantu kita dalam mempelajari banyak hal. 'It can help you learn pretty much anything...it's much easier to learn not-so-interesting things when our curiosity is piqued'

Sementara itu, rasa ingin tahu seseorang juga dianggap sangat penting. Dalam ranah pendidikan, rasa ingin tahu (*curiosity*) dipandang sebagai suatu hal yang positif sebab bisa memotivasi seseorang untuk belajar (Gentry, 2014). Beberapa alasan tentang pentingnya rasa ingin tahu adalah:

1. Bisa membuat pikiran atau otak kita menjadi aktif, seseorang yang selalu ingin tahu akan selalu bertanya. Pikirannya selalu aktif dan akan semakin bertambah kuat melalui latihan-latihan pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan. 'Curious people always ask questions and search for answers. Their minds are always active'.
2. Bisa membuat pikiran menjadi lebih tajam karena selalu menemukan ide-ide baru akibat dari rasa selalu ingin tahu. 'When you are curious about something, your mind expects and anticipates new ideas related to the subject'.
3. Bisa membuka kemungkinan-kemungkinan dan dunia baru. 'By being curious you will be able to see new worlds and possibilities that are normally not visible'.
4. Bisa membuat hidup penuh dengan kegembiraan jauh dari kebosanan. 'It brings excitement into your life the lives of curious people are far from boring'. (The Importance, <https://www.andersonuniversity.edu>).

Menurut studi yang dilakukan oleh Matthias J. Gruber, Bernard D. Gelman dan Charan Ranganath di University of California di Davis, Kepo ternyata dapat membantu lebih mudah mengingat sesuatu, yakni

- a. Mengapa harus Kepo? Karena sesuatu akan mudah diingat jika obyeknya menarik. Untuk membuat sesuatu terlihat menarik, butuh hasrat keingintahuan yang menjadikannya menarik. Jika tidak ada rasa keingintahuan atau kepo, tentu kita tidak ingin mempelajarinya bukan? “Rasa ingin tahu yang besar menjadi faktor utama seseorang menyimpannya dalam memori” begitu ungkap Gruber, Gelman dan Ranganath. Lebih baik lagi ketika kepo dapat kamu lakukan sebelum tidur, karena ketika kamu bangun ingatanmu akan bertambah 2 kali. Contoh, kamu suka sekali dengan drama korea dan menonton serinya sampai habis, saat tertidur memorimu akan mengingat 2 kali dann saat terbangun pasti dirimu terngiang-ngiang serial drama Korea yang kamu tonton semalam bukan?
- b. Saat penasaran itu ada, berilah *reward* segera untuk memunculkan rasa senang. Bukankah sulit untuk memunculkan rasa ingin tahu? Jika iya untuk mempertahankannya kamu perlu memberi reward terhadap dirimu sendiri, dengan begitu otak memunculkan enzyme dopaminenya. Nantinya Neutrostransmitter akan memunculkan perasaan yang membuat kita baik atau senang. Saat inilah yang baik untuk kita belajar dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan hal tersebut sangat membantu untuk mengingat banyak hal tentang hal yang kita pelajari.
- c. Selanjutnya setelah dirimu memiliki rasa ingin tahu dan senang untuk mencari tahunya, otomatis dirimu akan banyak bertanya tentang apa yang kamu pelajari, mengapa demikian? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dirimu akan menjawab penasaran dengan mencari jawabannya sendiri. Dalam mencari jawaban ada proses unik karena kalian akan mencoba untuk mengingat kembali. Saat itulah proses belajar yang efektif. Dengan ketiga langkah ini, kita dapat memotivasi diri sendiri dan memberi imbalan sendiri dengan menjawab rasa keingintahuan. (Kepo,<http://student.cnnindonesia.com/pelajar>).

### Jejaring sosial

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kita menuju era komunikasi yang semakin mudah, semenjak ditemukannya internet, munculah berbagai jejaring sosial bagi orang-orang untuk mempermudah



komunikasi jarak jauh yang murah. Mulai dari Friendster, Facebook, Twitter sampai yang sedang populer saat ini, Path. Tapi dalam penggunaan jejaring sosial juga muncul fenomena – fenomena unik yang kejadiannya malah membuat kita menemukan “istilah baru” yang populer dijadikan percakapan sehari-hari. Sebut saja seperti kata galau, stalking, kepo, psywar, dll. Dan dari beberapa istilah itu salah satunya adalah fenomena kepo (*knowing every particular object*).

### Metode Penelitian dan Ruang Lingkup Studi

Studi ini bertujuan mendeskripsikan analisis tentang perilaku para mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI di Jakarta, dalam memahami konsep kepo. Permasalahan utama yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana tingkat pemahaman para mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI di Jakarta terhadap fenomena kepo, rasa selalu ingin tahu atau penasaran yang belakangan ini sangat marak melanda semua orang tidak terkecuali para mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei (Riduwan, 2004, hlm.49) dengan melibatkan 50 mahasiswa program Studi Ilmu Perpustakaan angkatan 2016 sebagai anggota sampel. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner yang menggunakan skala pengukuran Likert (tabel 1), mulai dari tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

Tabel 1. Empat Skala Pengukuran

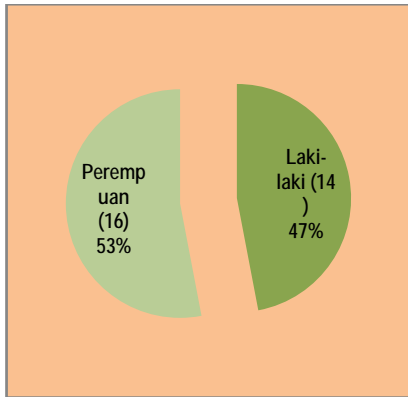
Sangat Setuju	=	SS	4
Setuju	=	S	3
Kurang Setuju	=	KS	2
Tidak Setuju	=	TS	1

### Hasil Penelitian

Dari 50 buah kuesioner yang dibagikan kepada responden, hanya 30 kuesioner yang terisi dan dapat dianalisis. Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

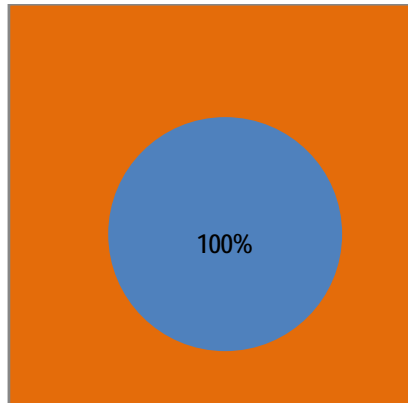
## 1. Karakteristik Responden

Grafik 1: Jenis Kelamin



Grafik nomor 1 memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu 16 orang (53%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki hanya 14 (47%).

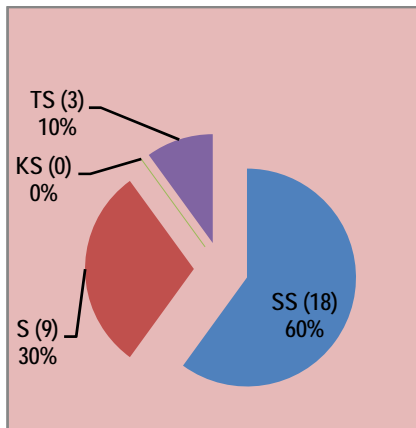
Grafik 2: Asal Angkatan 2016 (30)



Dari grafik 2 tergambar bahwa asal angkatan mahasiswa seluruhnya adalah angkatan 2016 atau 30 orang (100%).

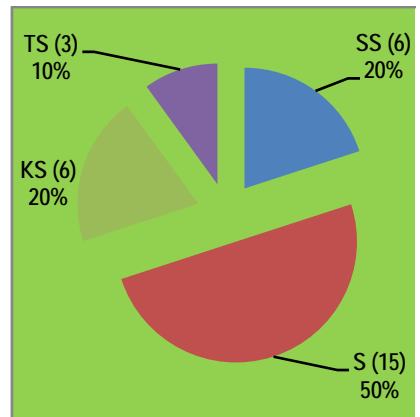
### Deskripsi Hasil Studi

Grafik 3: P-1: Saya pernah mendengar istilah Kepo



Grafik nomor 3 memberikan gambaran bahwa hampir seluruh responden 27 (90%) sudah tahu atau mengenal media sosial. Sebuah penelitian mencatat bahwa secara global Indonesia termasuk sebagai pengguna media sosial tertinggi sampai-sampai dijuluki sebagai negara *Twitter* dan negeri *Facebook*. 'This has made Indonesia high on the global list of social media users, being labelled by the media as 'Twitter Nation' and 'Facebook Country' (Nugroho and Syarief, 2012). Oleh karena itu

Grafik 4: P-2: Saya menggunakan media sosial *Facebook*

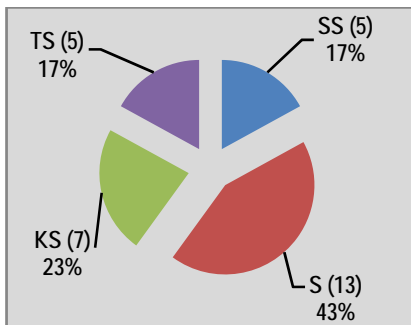


Dari grafik 4 terlihat bahwa 21 orang (70%) menyatakan menggunakan media sosial *Facebook*. Sisanya 9 (30%) tidak menggunakan. Data yang dikemukakan oleh Smith dalam Abdulahi; Samadi; Gharlegi (2014), bahwa pengguna 'Facebook has nearly one billion users worldwide with more than 90% of teens'. Sementara itu sebuah penelitian yang didukung oleh UNICEF sebagai bagian dari

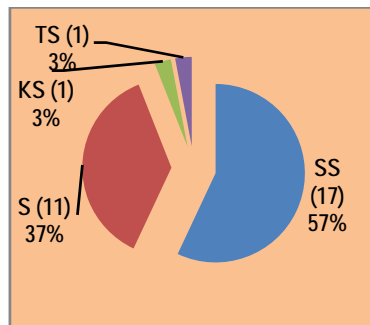
tidaklah heran akibat dari pengaruh perkembangan tersebut menimbulkan dampak terhadap bahasa gaul yang sangat tinggi termasuk lahirnya istilah kepo di kalangan pelajar.

proyek multi-negara pada program *Digital Citizenship Safety*, dan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menunjukkan bahwa kebanyakan yang menggunakan internet adalah dari kelompok usia 10 sampai 19 tahun, populasi besar dari 43,5 juta anak-anak dan remaja (Studi, <https://www.unicef.org/indonesia>). Sementara itu jumlah pengguna *facebook* sebagian besar adalah kalangan remaja dilihat dari statistik pengguna *facebook* di Indonesia usia 13-17 dan 18-24 yang paling banyak menggunakan *facebook* (Kadir, 2014).

Grafik 5: P-3: Saya menggunakan mediasosial *Twitter*



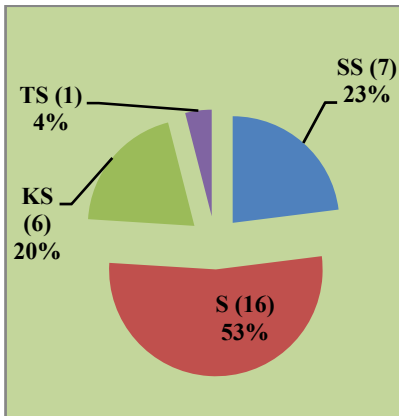
Grafik 6: P-4: Saya menggunakan media sosial Instagram



Grafik nomor 5 di atas memberikan gambaran bahwa lebih dari separuh yaitu 60% responden adalah pengguna media sosial *Twitter*. Selebihnya 12 (40%) adalah sebaliknya. Menurut Kemenkominfo dalam Anasari dan Handoyo (2015), Indonesia menempati urutan ke lima pengguna *Twitter* terbesar di dunia.

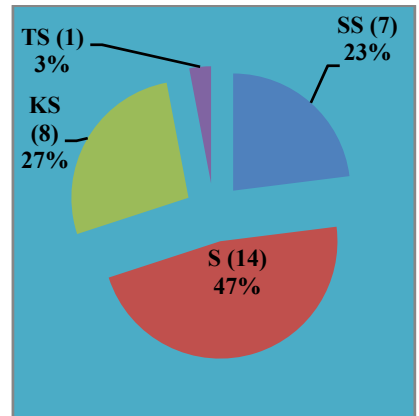
Dari grafik 6 tergambar bahwa 28 orang (94%) menggunakan *Instagram*, hanya 2 orang (6%) yang tidak menggunakan media sosial *Instagram*. Walaupun media sosial ini berdasarkan hasil sebuah penelitiandianggap sebagai media sosial yang paling buruk bagi kesehatan mental dan jiwa. Begitu kesimpulan survei yang dilakukan terhadap 1.500 remaja dan orang dewasa muda di Inggris namun nyatanya peminatnya tetap tinggi (*Instagram*, <http://nationalgeographic.co.id>).

Grafik 7: P-5: Saya suka membuka profil seseorang di salah satu medis sosial



Grafik nomor 7 di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden yaitu 23 (76%)

Grafik 8: P-6: Saya tidak bisa lepas dari telepon seluler

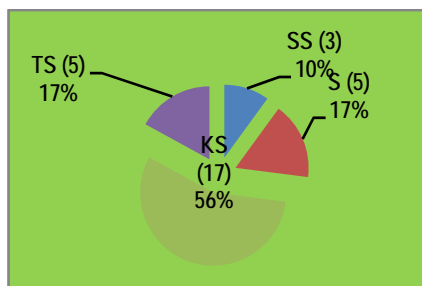


Dari grafik 8 tergambar bahwa 21 responden (70%) menyatakan tidak bisa lepas dari telepon seluler

menyatakan suka membuka profil seseorang di salah satu media dan alias kepo. Sisanya 7 (24%) adalah sebaliknya.

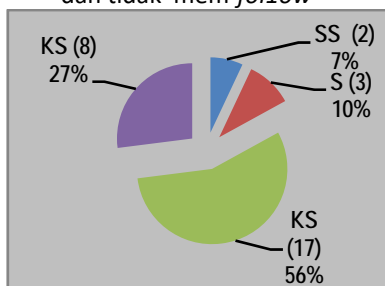
(ponsel). Sedangkan 9 (30%) menyatakan sebaliknya. Kendati telepon seluler ditenggarai memiliki pengaruh negatif apalagi terhadap para pelajar atau siswa yang notabene merupakan remaja yang belum matang, tetapi penggemarnya cukup besar. 'Using social media becomes a risk to adolescents more often than most adults realize'. (O'Keeffe and Clarke-Pearso, 2011)

Grafik 9: P-7: Saya selalu meng-update status



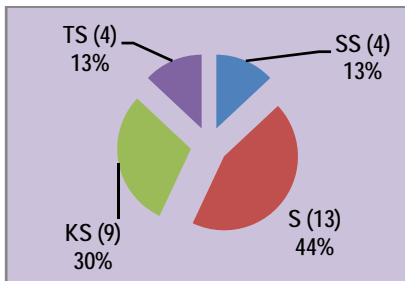
Grafik 9 memberikan gambaran bahwa mayoritas responden 22 (73%) tidak selalu meng-upload status. Sementara itu sisanya yaitu 7 (27%) selalu meng-upload status. Menurut Klap dalam Ayun (2015) identitas meliputi segala hal pada seseorang yang dapat menyatakan secara sah dan dapat dipercaya tentang dirinya sendiri – statusnya, nama, kepribadian, dan masa lalunya. Kegiatan *men-gupdate* status merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan identitas.

Grafik 10: P-8: Saya merasa terganggu jika tidak melihat foto atau video di media sosial dan tidak mem-follow



Dari grafik 10 terlihat bahwa sebagian responden yaitu 25 (83%) tidak merasa terganggu jika tidak melihat foto atau video di media sosial dan tidak mem-follow. Hanya 5 (27%) yang merasa terganggu. Jadi, dengan kata lain mau di-follow atau tidak maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Para ahli menyarankan untuk berhenti membandingkan hidup Anda dengan orang lain, apalagi jika Anda hanya melihat kehidupan

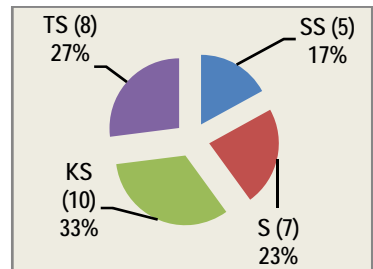
Grafik 11: P-9: Saya tidak mau ketinggalan info atau ingin selalu disebut mengetahui informasi terbaru dan meng-*upload*-nya di media sosial



Grafik nomor 9 di atas memberikan gambaran bahwa 17 responden (57%) menyatakan bahwa mereka tidak mau ketinggalan info atau selalu ingin disebut mengetahui informasi terbaru dan meng-*upload*-nya di media sosial

orang lain melalui media sosial. Gunakan media sosial hanya untuk hiburan dan mencari informasi semata, dan janganlah terus-menerus berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial. Komunikasi manusia sebaiknya tetap dilakukan dengan bertatap muka (Awais, <http://iradiofm.com>).

Grafik 12: P-10: Saya selalu menuliskan *lol* (*laugh out loud* = tertawa terbahak-bahak) untuk menanggapi lelucon orang lain



Dari grafik 10 dapat dilihat bahwa hanya 12 responden (40%) yang menyatakan setuju bahwa mereka selalu menuliskan *lol* (*laugh out loud* = tertawa terbahak-bahak) untuk menanggapi lelucon orang lain. 18 (60%) menyatakan tidak selalu menuliskan *lol*.

## Kesimpulan

Kepo adalah merupakan salah satu istilah yang lahir akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang belakangan ini sudah menggejala terutama di kalangan remaja termasuk para mahasiswa.

Secara umum asalkan tidak berlebihan dan bersifat positif maka jika ditinjau dari sudut psikologi, rasa penasaran, ingin selalu tahu atau Kepo ini bukan hal yang mengganggu. Ketika seseorang sudah terobsesi terhadap sesuatu, dan hal ini menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari, seperti misalnya jadi malas belajar dan beraktivitas lainnya maka Kepo harus ditinggalkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% responden sudah pernah dengar istilah Kepo. Paling tinggi media sosial yang digunakan responden adalah *Instagram* (94%) di antara media sosial lainnya yaitu *Facebook* (70%) dan *Twitter* (60%). Mayoritas responden (76%) tidak selalu membuka profil seseorang di media sosial. Sebagian besar dari mereka (70%) tidak bisa meninggalkan atau lepas dari telepon seluler (ponsel). Selanjutnya lebih dari separuh responden yaitu 73 % juga tidak selalu meng-*update* status. Dan 83 % dari seluruh responden tidak merasa terganggu jika tidak melihat foto atau video di media sosial. Namun demikian 83% dari responden merasa tidak mau ketinggalan info atau ingin selalu disebut mengetahui informasi. Ketika ada lelucon di media sosial sebagian besar responden yaitu 60% menyatakan tidak pernah menanggapi dengan menambahkan akronim *lol* (*laugh out loud* = tertawa terbahak-bahak).



## Referensi

- Anasri, Novi dan Handoyo, Pambudi. (2015). Media Sosial sebagai Panggung Drama (Studi Deskriptif Presentasi Diri Pengguna Twitter di Kalangan Mahasiswa Unesa). *Paradigma* Volume 03 Nomor 3.
- Arikunto. (2002). *Penelitian Suatu Pendekatan Khusus*. Bina Aksara, Jakarta.
- Awas depresi akibat media sosial*. Diakses 15 Oktober 2017 dari <http://iradiofm.com>.
- Ayun, Primada Qurrota. (2015). Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas. *Channel*, Oktober, Vol. 3, No. 2, hal. 1-16
- Genry, James W [et.al.]. (2014). *Managing The Curiosity Gap Does Matter: What Do We Need To Do* ...<https://journals.tdl.org/absel/index.php/absel/article/view/751> diakses 14 Oktober 2017
- The Importance of Being...Curious*. Diakses pada 14 Oktober 2017 dari <https://www.andersonuniversity.edu/sites/default/files/student-success/importance-of-being-curious.pdf>.
- Instagram Jadi Media Sosial Paling Buruk bagi Kesehatan Mental*. Diakses 15 Oktober 2017 dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/07>,
- Ismayati, Nita. (2017). *Hasil Wawancara di Universitas YARSI Jakart pada 7 Agustus 2017*.
- Kadir, Latifa. (2014). Motif Remaja terhadap penggunaan Situs jejaring Facebook (Siswa SMKNegeri 7 Samarinda). *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2 (4): 53-63.
- KEPO*. Diakses 25 April 2017 dari <https://id.crowdvoice.com>
- Kepo*. Diakses 25 April 2017 dari <http://www.urbandictionary.com/define.php?term>

- KEPO. Diakses 25 April 2017 dari <https://crimsonstrawberry.wordpress.com/2013/07/14/kepo/>
- Kepo Dapat Menstimulus Ingatan*. Diakses 25 April 2017 dari <http://student.cnnindonesia.com/pelajar/20160324132114-317-11945/kepo-dapat-menstimulus-ingatan/>.
- Nugroho, Yanuar and Sofie Shinta. (2012). *Beyond Click-Activism? New Media and Political Processes in Contemporary Indonesia*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Berlin.
- O'Keeffe, Gwenn Schurgin and Clarke-Pearso, Kathleen. (2011). The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. *Pediatrics*. April, VOLUME 127 / ISSUE 4
- Riduwan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta, Bandung
- Sulistyo-Basuki. (2006). *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra-Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.Depok.
- Weingus, Leigh. (2014). *5 Benefits of Being A Curious Person*. Diakses 14 Oktober 2017 dari [https://www.huffingtonpost.com\\_](https://www.huffingtonpost.com_)

## Sikap Kritis Mahasiswa terhadap Isi Berita di Media Sosial

Syihaabul Hudaa

STIE Ahmad Dahlan, Jakarta

### PENDAHULUAN

Media sosial merupakan penyumbang informasi terbesar dalam era modern. *Facebook, Twitter, Blog, Line, Snapchat, Skype, Line, Whatsapp, BBM, dan Wikipedia* merupakan media sosial yang paling banyak dibaca dan digunakan oleh mahasiswa. Rohampton (2017) setidaknya masyarakat memiliki lima akun media sosial yang digunakan dalam berkomunikasi. Perkembangan informasi di media sosial dapat dikatakan lebih cepat dibandingkan dengan media massa. Media sosial menyajikan berita berupa informasi yang masih perlu dicermati dengan kritis. Di media sosial, penyaji berita lebih mengedepankan pada aspek judul yang menarik, agar pembaca merasa tertarik dengan berita yang disajikan. Akan tetapi, hal ini yang sering kali membuat pembaca awam merasa percaya dengan kebenaran suatu berita.

Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa merupakan calon pemimpin masa depan. Akan tetapi, sering kali mahasiswa mahasiswa terlalu cepat mengambil simpulan dari judul berita di media sosial. Hal ini berdampak pada tindakan mahasiswa yang bergerak ke arah negatif. Mereka yang tidak berpikir kritis, menganggap suatu judul di media sosial sebagai fakta. Akibatnya, mereka kemudian menyampaikan berita tersebut kepada orang lain, dan orang lain sebagai penerima berita, akan menyampaikan berita tersebut kepada orang lainnya. Hal tersebut terus terjadi berulang, hingga akhirnya berita di media sosial tersebut akan menyebar di masyarakat.

Dachroni (2009) mahasiswa memiliki tiga tren dalam melakukan aktivitas pergerakan di kampus. **Pertama**, tren gerakan intelektualitas; **kedua**, tren jamaah atau pengkaderan; **ketiga**, tren kewirausahaan. Tren intelektualitas merupakan suatu tren yang baik dimiliki oleh mahasiswa sebagai seorang akademisi. Intelektualitas akan mengembangkan pola berpikir mahasiswa yang logis dan kritis dalam menyikapi suatu berita. Tren

pengkaderan kerap terjadi dalam lingkungan akademisi. Tren ini menurut peneliti bisa membahayakan akademisi muda. Mereka cenderung masih awam, dan hanya bersifat menerima, karena adanya tindakan represif dari seniorinya. Tren yang terakhir adalah tren kewirausahaan, yang dapat dikatakan tren yang negatif. Mahasiswa tidak dipungkiri membutuhkan uang dalam kegiatan sehari-hari, sehingga mereka menjadikan suatu gerakan yang mendapatkan uang, sebagai suatu kebiasaan.

Budaya Indonesia yang cenderung cepat puas dengan keadaan dan tidak peduli dengan perkembangan karena sibuk sendirian, tidaklah patut menjadi paradigma gerakan mahasiswa. Mahasiswa harus berpikir kritis dalam menyikapi suatu berita yang beredar di media sosial. Sebagai bentuk berpikir kritis, mahasiswa harus bisa membedakan antara suatu berita fakta dengan berita *hoax*. Peranan media massa dapat menjadi bahan mengomparasikan suatu berita di media sosial agar dapat diteliti kebenarannya.

Kehadiran media sosial (*Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Path, Instagram, Blog, Skype, Snapchat, dan Messaging Apps seperti: Whatsapp, Line, Blackberry Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, dan lain sebagainya*) adalah torehan sejarah yang telah membawa perubahan dalam proses komunikasi manusia (Elvi, 2016). Media sosial inilah yang sering dimanfaatkan sebagai sarana informasi dalam era modern. Untuk mahasiswa, media tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak asing. Survei yang dilakukan peneliti, dalam kesehariannya mahasiswa menggunakan beberapa aplikasi di atas, seperti *Facebook, Twitter, Path, Instagram, Whatsapp, Line, Snapchat, dan Line*. Dalam disertasinya Elvi (2015) mengatakan bahwa media sosial yang paling umum digunakan adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengakses media sosial sebagai bahan bacaan sehari-harinya.

Peranan media sosial dapat dikatakan bermanfaat atau sebaliknya. Semua tergantung pada sikap mahasiswa dalam menyikapi suatu berita. Jika mereka membaca suatu berita dan menganggapnya sebagai suatu kebenaran, tanpa mencari data dari media lain, artinya mereka belum masuk ke dalam pola berpikir kritis. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sikap mahasiswa dalam menyikapi suatu berita di media sosial. Selain itu, dari berita yang sudah mereka baca, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait berita tersebut. Peneliti akan menanyakan bagaimana asumsi mahasiswa terhadap kelogisan isi beritanya. Melalui pertanyaan

yang diajukan terkait berita yang sudah baca, peneliti akan menilai bagaimana sikap mahasiswa dalam menyikapi suatu berita.

### **Media Sosial**

Media sosial merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan teknologi. Martono (2012) teknologi dapat dimanfaatkan sebagai bentuk ilmu pengetahuan bagaimana membuat sesuatu dan bagaimana mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, dari peranan teknologi yang menciptakan media sosial, kita dapat memanfaatkannya sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk memperoleh informasi.

Media sosial bersifat daring (*online*) yang memanfaatkan internet sebagai penghubungnya. Dalam KBBI V daring (2015) media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial, terbilang lebih cepat daripada media massa. Media sosial merupakan wujud kemajuan zaman dalam bidang komunikasi, yang menitikberatkan pada aspek mudahnya mengakses suatu informasi.

Dalam praktiknya, media sosial banyak digunakan oleh suatu komunitas daring untuk menghasilkan konten tertentu atau berbagi informasi berupa opini, pemahaman, pengalaman dan perspektif antara satu sama lain (Cohen dalam Patrut dan Patrut, 2013). Davidson (2015) dalam artikelnya mengatakan bahwa media sosial merupakan aktivitas daring yang paling banyak digunakan oleh publik dengan waktu mengakses minimal 40 menit dalam sehari. Media sosial juga memungkinkan seseorang untuk memperoleh jawaban secara langsung atas pertanyaannya, dan dapat dijadikan sebagai suatu media untuk kepentingan tertentu (Mangold and Faulds, 2009).

Stelzner (2016) dalam perkembangannya, media sosial terus mengalami perkembangan yang dinamis. Perkembangan itu meliputi konten di dalam media sosial itu sendiri. Selain itu, perkembangan media sosial dianggap mampu untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan dan memiliki akun media sosial. Media sosial dalam era modern merupakan suatu bentuk transformasi zaman yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat. Penyampaian informasi melalui media sosial lebih cepat daripada media massa, dan dapat dilakukan melalui telepon genggam sebagai aksesnya. Beberapa media sosial yang sering digunakan masyarakat antara lain sebagai berikut.

**Blog.** Blog merupakan layanan yang bekerja sama dengan *Google*. Fasilitas yang mampu didapatkan oleh penggunaanya adalah penerbitan artikel yang mampu diakses oleh siapa saja, dan kapan saja. Selain itu, adanya fasilitas *drag and drop* menjadikan penggunaanya mampu menampilkan tampilan yang berbeda dan menarik untuk pembacanya (Sanjaya, 2008). *Blog* merupakan suatu jenis media sosial yang banyak diakses dan digunakan oleh mahasiswa dalam membuat karya tulis yang kemudian dipublikasikan di-*blog* pribadinya.

**Facebook.** Facebook merupakan media sosial yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Selain menjadi media sosial yang digunakan sebagai sarana komunikasi, *Facebook* kerap dijadikan tempat untuk berkenalan dengan orang lain. Fasilitas yang ditawarkan *Facebook* dapat dikatakan lengkap. Selain bisa membarui status, *Facebook* juga mampu berinteraksi menggunakan foto dan video yang dapat dilihat oleh orang lain. Perkembangan zaman mengoptimalkan kinerja *Facebook* sebagai penyebar informasi yang paling banyak dibaca oleh masyarakat modern. Untuk itu, Facebook dapat menjadi suatu media sosial positif atau negatif.

**Twitter.** Twitter merupakan media sosial yang banyak digunakan *netizen* dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam perkembangannya, *Twitter* sering kali menjadi tempat seseorang untuk berdiskusi. Fasilitas yang ditawarkan *Twitter* memungkinkan seseorang berkomunikasi dan mengomentari pendapat seseorang yang ditulis di media sosial seperti *Twitter*. Fenomena *Twitter* kian mencuat ke masyarakat semenjak banyaknya akademisi, artis, politisi, bahkan Presiden pun menggunakan *Twitter*. Simbol *Twitter* yaitu burung dengan konsep 'kicau' yang dapat dimaknai berbicara, berkomunikasi, menjadikan media sosial ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.

**Whatsapp.** *Whatsapp* sebagai suatu bentuk media yang saat ini mengalahkan pengguna BBM, *Whatsapp* menampilkan fasilitas yang lengkap untuk masyarakat modern. Fasilitas yang dimiliki *Whatsapp* meliputi: pesan, pesan suara, telepon, video, video *call*, pengiriman berkas, dan mampu mengefektifkan jarak yang jauh. Pesan yang disampaikan melalui aplikasi *Whatsapp* memerlukan koneksi internet dalam penggunaannya. *Whatsapp* dapat digunakan untuk memberikan informasi dengan cepat, misalnya mengirim pesan, atau artikel yang panjang. Selain

itu, aplikasi ini sering kali digunakan oleh mahasiswa dalam berkomunikasi dengan kelompok lainnya.

### **Kritis dan Logis**

Sebagai seorang akademisi, mahasiswa diwajibkan mampu berpikir kritis dan logis. Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki mahasiswa tidaklah sama. Kemampuan ini perlu dikembangkan dengan cara pembelajaran yang aktif, membaca, dan menganalisis suatu tulisan yang diberikan oleh pengajar. Artinya, sebagai suatu bentuk kemampuan berpikir, sifat kritis terhadap suatu hal dapat dipelajari. Ennis (1991) mengatakan bahwa seseorang yang berpikir kritis memiliki ciri-ciri: (1) mencari pernyataan yang jelas dari setiap pernyataan; (2) mencari alasan; (3) berusaha mencari informasi dengan baik; (4) mencari sumber yang jelas; (5) memperhatikan situasi dan kondisi; (6) berpola pikir menerima dan menganalisis suatu informasi. Dengan demikian, seseorang yang berpikir kritis minimal memiliki beberapa ciri seperti yang dikemukakan oleh Ennis.

Logis menurut KBBI V (2015) diartikan sebagai suatu hal yang dapat diterima oleh akal. Berpikir logis merupakan suatu proses menuju kesimpulan menggunakan penalaran secara konsisten. Misalnya saja dalam suatu berita yang beredar di media sosial, penulis perlu memperhatikan penggunaan judul. Judul dalam media sosial sering kali dibuat dengan memperhatikan suatu hal yang menarik, tanpa berpikir aspek kelogisan dalam suatu kalimat. Pengabaian aspek kelogisan ini berdampak pada penarikan kesimpulan yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, berita tersebut tidak akan diakui sebagai berita fakta.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik survei dengan diterapkan pada kelas yang diampu oleh peneliti. Peneliti menggunakan pendekatan humanistik tanpa memaksa mahasiswa untuk mengikuti perkataan peneliti. Melalui pendekatan humanistik ini, siswa dapat menjadi dirinya sendiri dan bersikap sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh peneliti menjadi objektif karena tidak adanya tekanan dari peneliti.

Waktu yang dilakukan oleh peneliti selama 4 bulan dan mengambil sampel mahasiswa Biologi A dan B sebanyak 64 mahasiswa. Penelitian ini mengumpulkan sumber dari media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Line*, *Blog*, *Whatsapp*, dan *Line*. Media sosial ini sering kali dijadikan sarana oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita fitnah, atau menulis tidak sesuai dengan isinya. Untuk itu, mahasiswa perlu mencermati dan berpikir kritis dalam mencermati berita yang sudah mereka baca.

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan dilakukan sebanyak 4 kali. Hal ini dilakukan dalam upaya melihat pola berpikir mahasiswa. Selain itu, pemberian bahan bacaan yang dilakukan 1 bulan sekali, bertujuan memberikan penyegaran dan tidak membuat mereka bosan. Sebagai contoh pertama, peneliti berikan berita dari *Facebook* yang kerap dibagikan melalui media sosial Facebook, dapat dijumpai di alamat asal:

1. [www.beritaahokterbaru2017.blogspot.co.id/2017/02/bantah-isu-zina-habib-rizieq-syihab.html](http://www.beritaahokterbaru2017.blogspot.co.id/2017/02/bantah-isu-zina-habib-rizieq-syihab.html)

Judul berita tersebut adalah: “Bantah Isu Zina, Habib Rizieq Syihab: Saya Sudah Kenyang dengan Fitnah.” Berita ini diakses pada tanggal 12 Februari 2017. Tanggapan mahasiswa biologi ketika membaca judul berita ini beragam. Sebagai bentuk ulasan berupa data yang dikumpulkan oleh peneliti, sebagai berikut.

Diagram 1. Sikap Sebatas Membaca Judul



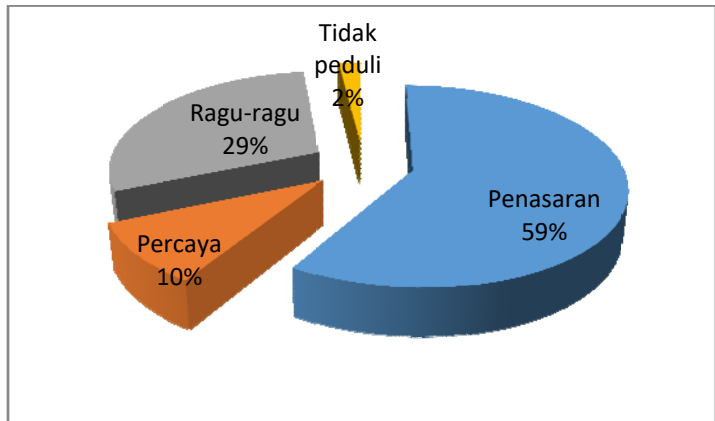
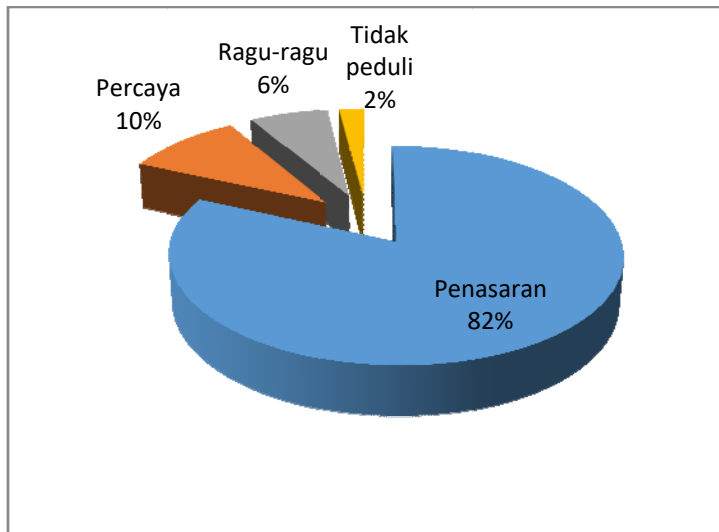


Diagram 2. Sikap Setelah Membaca Isi Berita



Setelah mereka sekadar membaca judul, sebanyak 36 siswa segera mencari sumber berita melalui internet menggunakan *Google*. Mereka yang mempercayai kebenaran berita ini, dapat dikatakan sebagai mereka yang

tidak berpikir kritis. Mereka yang ragu-ragu akan isi berita ini, dapat dikatakan mahasiswa yang masih berpotensi dikembangkan pola berpikir kritisnya dalam memperoleh informasi yang benar. Mahasiswa yang berpikir apatis atau tidak peduli, dapat diklasifikasikan sebagai mahasiswa yang cenderung malas berpikir, bahkan mereka tidak memiliki minat untuk membaca kebenaran berita tersebut.

Selanjutnya, peneliti memberikan berita lengkapnya kepada mahasiswa untuk dibaca dan melihat respon mereka berdasarkan isi beritanya. Hasil yang didapatkan pun mengalami perbedaan ketika mereka sekadar membaca judul. Survei yang didapatkan oleh peneliti, ada peningkatan pada mereka yang ragu-ragu, menjadi penasaran dan mencari sumber yang relevan untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Akan tetapi, mereka yang berpikir percaya dan apatis tetap pada pendiriannya dan merasa bahwa tersebut tidak perlu dikaji kebenarannya.

Berita tersebut dianggap fakta oleh mahasiswa yang tidak berpikir kritis. Ketika berita ini disajikan di media sosial, berbagai macam pandangan disampaikan, mulai dari anggapan fakta hingga dianggap *hoax*. Stigma ini muncul karena redaksi yang disampaikan menjurus kepada salah satu tokoh masyarakat dengan konotasi negatif. Untuk itu, suatu redaksi berita akan memengaruhi perspektif pembacanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pada berita pertama sebanyak 50 mahasiswa memiliki cara berpikir kritis yang berusaha mencari penelitian yang relevan dengan berita tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Sebanyak 6 orang mahasiswa yang mempercayai kebenaran berita tersebut, disimpulkan sebagai mahasiswa yang membaca dengan langsung mempercayai kebenaran suatu berita. Adanya perubahan dari mereka yang ragu-ragu, karena sebatas membaca judul, membuktikan perilaku berpikir mereka yang masih bisa dikembangkan menjadi pembaca dengan pola pikir yang kritis dengan mengedepankan aspek kelogisan dalam berita. Untuk pembaca yang apatis, mereka dapat dikatakan tidak akan mengalami perubahan dari berita yang pertama, ada beberapa faktor yang disimpulkan oleh peneliti. Pertama, berita tersebut dipandang tidak menarik, kedua berita tersebut terlalu sering beredar di media sosial dan menjadi suatu hal yang monoton.

2. [www.satuindo.com/2017/05/video-adzan-diteriaki-huuuu-saat-aksi.html?m=1](http://www.satuindo.com/2017/05/video-adzan-diteriaki-huuuu-saat-aksi.html?m=1)

Salah satu berita yang bisa membuat lunturnya kebinekaan, adalah berita ini. Peneliti menemukan berita ini di halaman Facebook “SEKILAS INFO INDONESIA”. Judul berita “Video: Adzan Diteriaki ‘Huuuu’, Saat Aksi 1000 Lilin, Ahok Muslim Bagaimana Pendapatmu?” Berita ini diakses pada tanggal 25 Mei 2017. Dari berita ini, beberapa respon dari responden mulai berubah. Berita yang diberikan oleh peneliti, disajikan judulnya terlebih dahulu. Penyajian judul bertujuan untuk melihat respon awal mahasiswa terhadap suatu judul. Setelah itu, barulah peneliti menyajikan berita selengkapnya. Selanjutnya sila diperhatikan tabel kedua yang sudah dibuat oleh peneliti.

Diagram 3. Sikap Sebatas Membaca Judul

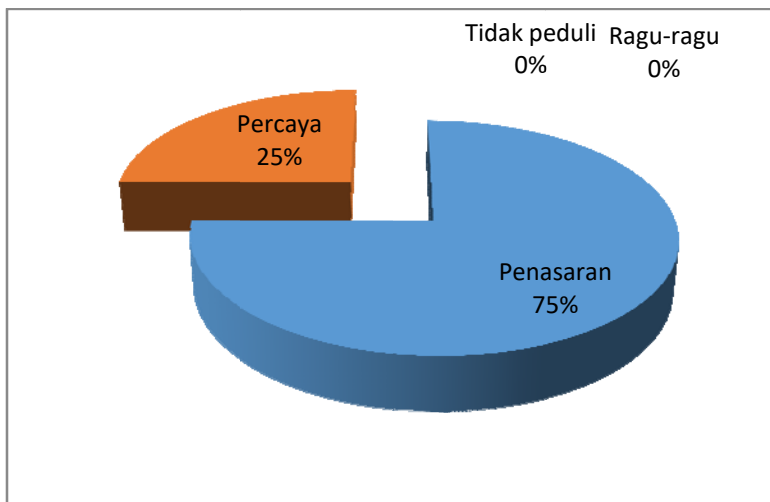
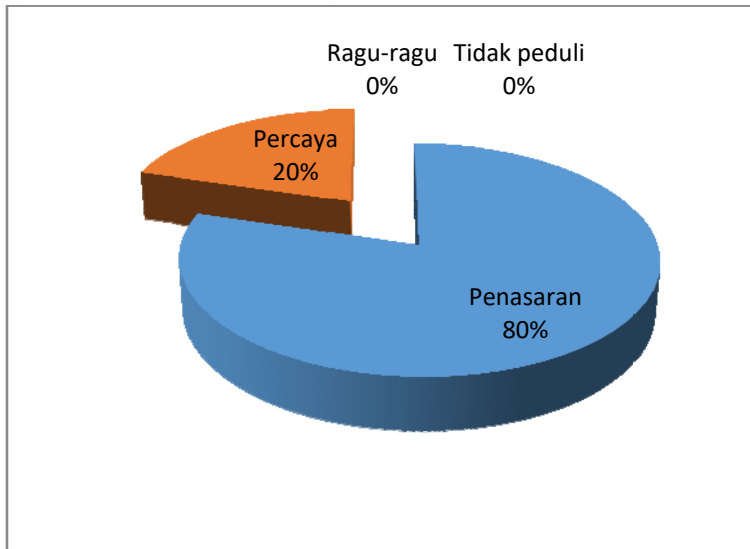


Diagram 4. Sikap Setelah Membaca Isi Berita



Berita ini mendapatkan respon yang berbeda dari berita sebelumnya. Judul berita ini mampu membuat ketertarikan mahasiswa untuk membaca dan menganalisisnya lebih lanjut. Ketika mahasiswa membaca judulnya, sebanyak 16 mahasiswa langsung mempercayai berita tersebut sebagai kebenaran. Sisanya adalah 48 mahasiswa yang masih ingin meneliti berita ini lebih lanjut. Untuk mahasiswa yang ragu-ragu dan tidak peduli, tidak ditemukan dalam judul ini. Artinya mahasiswa yang merasa ingin tahu akan mengkaji kebenaran berita ini, dan mengaitkan dengan sumber berita lain untuk memeriksa kebenarannya.

Mahasiswa yang mempercayai berita ini sebagai kebenaran, dapat dikatakan sebagai kelompok yang mudah mempercayai suatu berita sebatas judul, tanpa membaca isinya. Kepada mereka yang mempercayai, peneliti kemudian memberikan saran untuk lebih kritis dalam menyikapi suatu berita. Jika mereka menjadikan suatu judul sebagai acuan utama tanpa membaca isinya, maka tahapan berpikir mereka belum sampai kepada tahap berpikir kritis dan logis. Karena seorang akademisi tidak bisa menjadikan suatu judul sebagai acuan kebenaran.

Setelah mereka membaca judul, peneliti melihat respon mereka, kemudian peneliti menyajikan isi berita sepenuhnya. Sama halnya dengan

saat mereka membaca sebatas judul, kali ini setelah mereka membaca isi berita, tidak ada yang ragu-ragu dan tidak peduli. Dari 64 responden, 51 mahasiswa masih penasaran dengan kebenaran isi berita, dan mereka membuka sumber lain untuk mengkaji kebenarannya. Mereka yang melakukan hal tersebut, dapat dikatakan mahasiswa yang berpikir kritis dan logis. Mereka tidak mempercayai suatu berita secara langsung. Situs berita yang menyajikan berita tersebut dapat dikatakan situs yang belum terpercaya. Maka, kategori mahasiswa ini merupakan mahasiswa yang mampu berpikir kritis dan logis dalam menyikapi suatu berita. Kelompok inilah yang nantinya tidak mudah dipecahbelah oleh suatu berita yang belum terbukti kebenarannya.

Akan tetapi, sebanyak 13 mahasiswa mempercayai berita ini sebagai berita kebenaran. Mereka yang meyakini berita tersebut sebagai kebenaran, dapat disimpulkan sebagai mereka yang tidak berpikir kritis dan logis, dan mengedepankan sifat egosentris mereka. Mahasiswa yang memiliki karakter ini, akan lebih mudah terprovokasi oleh suatu berita di media massa. Generasi milenial dalam era modern, harus mampu mengikuti perkembangan zaman, agar mereka tidak mudah terkena isu yang bisa merusak kebinekaan.

3.

[https://health.detik.com/read/2017/06/07/112717/3522736/763/makan-cokelat-setelah-makan-mi-goreng-bisa-bikin-meninggal?\\_ga=2.257889551.563035208.1504055859-1599228303.1481166890](https://health.detik.com/read/2017/06/07/112717/3522736/763/makan-cokelat-setelah-makan-mi-goreng-bisa-bikin-meninggal?_ga=2.257889551.563035208.1504055859-1599228303.1481166890)

Berita ini diambil dari kolom *detik.com* dengan memilih berita kesehatan. Berita ini diakses pada tanggal 17 Juni 2017. Peneliti memilih judul yang berkorelasi dengan jurusan mereka, dengan tujuan mahasiswa yang memiliki sikap kritis, akan melakukan penelitian secara langsung, benar atau tidaknya berita yang disajikan. Judul berita ini adalah “Makan Cokelat Setelah Makan Mi Goreng Bisa Bikin Meninggal”. Kemudian peneliti melihat repon yang berbeda dari dua judul yang sudah diberikan di atas, berikut paparan setelah membaca judul dan membaca isi beritanya.

Diagram 5. Sikap Sebatas Membaca Judul

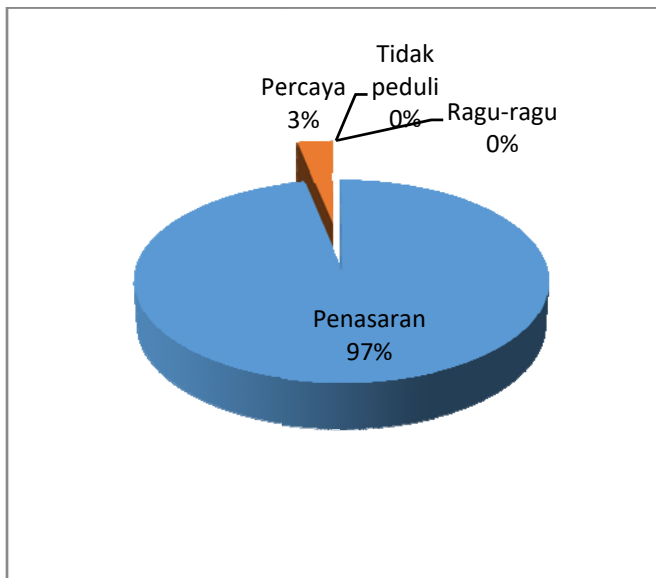
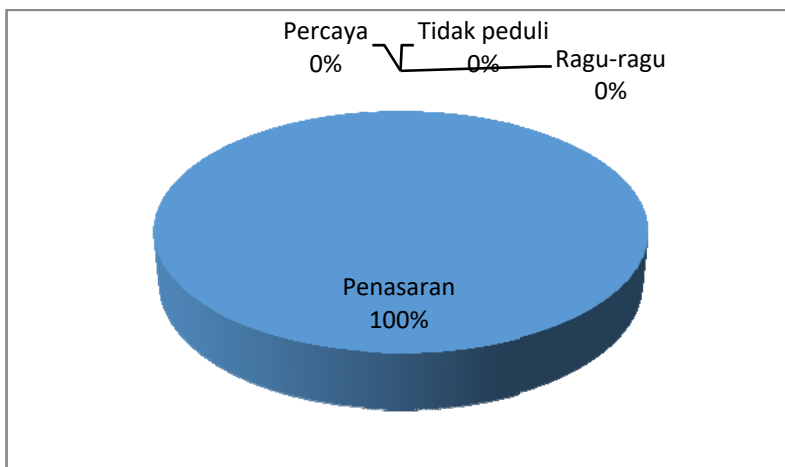


Diagram 6. Sikap Setelah Membaca Isi Berita



Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa Biologi semester II di UIN Jakarta, bereaksi terhadap suatu informasi yang berhubungan dengan jurusan mereka. Peneliti memberikan judul terlebih dahulu, kemudian sebanyak 62 mahasiswa merasa penasaran akan berita tersebut. Mereka mencari sumber berita yang relevan untuk mengkaji kebenarannya. Akan tetapi, sebanyak 2 orang meyakini melalui judul tersebut, berita tersebut dikatakan benar. Alasan mereka adalah adanya senyawa kimia yang pernah mereka pelajari saat masih SMA. Pemikiran ini, menurut peneliti merupakan suatu pemikiran dasar yang belum melalui tahap eksperimen. Akan tetapi, mahasiswa jurusan Biologi dapat dikatakan tertarik dengan informasi yang berkaitan dengan bidang mereka.

Selanjutnya peneliti menyajikan berita secara lengkapnya. Mereka membaca dan satu persatu menyatakan tertarik dengan berita ini. Hasilnya di luar dugaan peneliti, yaitu sebanyak 64 mahasiswa merasa penasaran dan mencari sumber berita lain. Setelah mereka membaca dari beberapa sumber, mereka menyatakan melalui perwakilannya, bahwa berita tersebut adalah berita *hoax* yang dibuat tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Selama masa penelitian, peneliti mengamati perilaku mahasiswa yang cenderung berpikir kritis. Mereka yang berpikir kritis, tidak segera menyimpulkan informasi, melainkan mereka berusaha mencari kebenaran melalui penelitian dan juga sumber lainnya yang mereka anggap valid. Setelah itu, mereka merujuk kepada buku sebagai referensi utama dalam ilmu pengetahuan.

Melalui berita ketiga yang disajikan oleh peneliti, disimpulkan bahwa mahasiswa biologi merupakan mahasiswa yang berpikir kritis dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan sebagai dasar pemikirannya. Mahasiswa yang masih muda, masih berpikir dengan mengedepankan egosentrisnya, tetapi mereka tertarik dengan segala aspek yang merupakan bidang keahliannya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan sikap mahasiswa yang sekadar ikut-ikutan temannya, melainkan mereka berpikir dalam menemukan kebenaran berupa pengetahuan.

4. <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/16/disindir-anies-jakarta-masih-banjir-ahok-janji-saya-tak-sampai-satu-hari>

Berita yang terakhir disajikan oleh peneliti adalah berita yang berkaitan dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berita ini merupakan salah satu berita yang banyak dibagikan di media sosial seperti *Whatsapp*. Berita ini diakses oleh peneliti pada tanggal 18 Februari 2017. Judul berita ini “Disindir Anies Jakarta Masih Banjir, Ahok: Janji Saya Tak Sampai Satu Hari”. Berita ini sengaja dipilih berbeda dengan jalur pendidikan mereka, untuk mengetahui ketertarikan mereka terhadap segala informasi. Setelah penelitian sebelumnya mereka disuguhkan berita yang berkorelasi dengan bidang keilmuan mereka, sekarang mereka akan membaca berita di luar bidang keilmuan mereka. Sebagai seorang akademisi, tentunya mereka harus bijak menyikapi segala berita. Berikut respon mahasiswa Biologi terhadap berita tersebut.

Diagram 7. Sikap Sebatas Membaca Judul



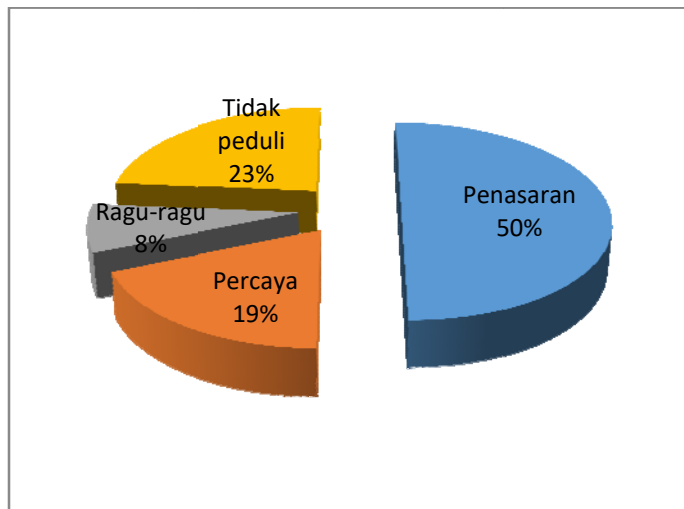
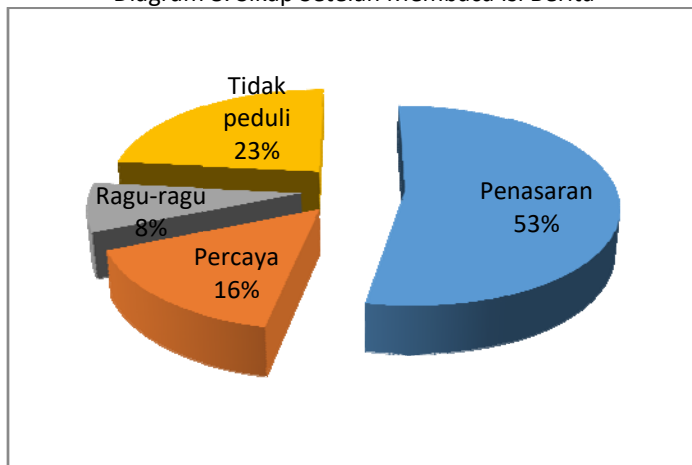


Diagram 8. Sikap Setelah Membaca Isi Berita



Melalui berita yang keempat yang diberikan oleh peneliti, mahasiswa sebatas membaca judul, terdapat 32 mahasiswa yang masih penasaran dan mencari sumber lain yang relevan dengan judul ini. Sebanyak 12 mahasiswa, sudah mempercayai berita ini sebagai kebenaran. Sebanyak 5 mahasiswa ragu-ragu, tetapi tidak berminat untuk mengkaji lebih dalam. Yang terakhir, sebanyak 15 mahasiswa tidak peduli dengan berita ini. Dapat disimpulkan

pada judul keempat yang diberikan oleh peneliti, masih ada mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam kebenaran berita tersebut sebanyak 32 orang. Sebanyak 15 mahasiswa, tidak peduli dengan berita ini. Dengan demikian, suatu judul dan korelasi dengan bidang keilmuan mereka, mempengaruhi ketertarikan mereka untuk mengkaji lebih lanjut.

Setelah mereka membaca judul, peneliti menyajikan isi beritanya. Tanggapan mereka yang percaya dengan berita tersebut mengalami perubahan. Mereka yang penasaran dan mencari sumber yang relevan sebanyak 34 mahasiswa. Mereka yang percaya sebanyak 10, untuk yang ragu-ragu dan tidak peduli hasilnya masih sama dengan saat mereka membaca judul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu judul berita mempengaruhi minat mahasiswa biologi dalam membaca. Mahasiswa akan tertarik dengan judul yang memiliki korelasi dengan bidang mereka.

### **Upaya Membangun Sikap Kritis Mahasiswa**

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus memiliki sikap kritis dalam menyikapi informasi yang ada di media sosial. Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mereka mulai memahami bahwa setiap berita yang beredar di media sosial perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Kajian yang dilakukan berupa mencari media lain yang relevan untuk melihat kebenarannya. Selain membaca media lain, mereka dapat membaca hasil penelitian yang sudah dipublikasikan.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah penginformasian dampak dari berita *hoax* yang beredar di media sosial. Dampak yang harus diketahui oleh mereka, adalah dampak negatif dari berita tersebut dalam jangka panjang. Setelah mereka mengetahui dampak eskalasi berita *hoax*, mereka akan menyadari pentingnya esensi suatu berita. Sudah sepantasnya esensi berita yang objektif, faktual, dan terpercaya dinikmati oleh masyarakat luas.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Biologi semester II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mampu berpikir kritis dan logis. Hal ini didapatkan setelah meneliti selama 4 bulan dengan memberikan 4 berita yang berbeda. Pada berita pertama, ketika mereka membaca judul, sebanyak 36 mahasiswa berpikir kritis dalam menyikapi berita, dan 4 orang tidak peduli dengan berita yang pertama.

Setelah membaca isinya, terdapat peningkatan yang signifikan menjadi 50 mahasiswa, dan untuk yang tidak peduli tidak mengalami perubahan.

Pada berita yang kedua, ketika membaca judul berita, sebanyak 48 siswa mencari sumber lain. Setelah membaca isi berita, sebanyak 51 mahasiswa mencari sumber berita lain sebagai bentuk kajian yang relevan untuk menemukan kebenaran dari berita tersebut. Hal yang menarik dari berita yang kedua, tidak adanya mahasiswa yang tidak peduli seperti pada berita pertama. Berita kedua mampu menarik minat mahasiswa untuk membaca, walaupun tingkat berpikir kritisnya berbeda.

Berita yang ketiga, judul yang disajikan berkaitan dengan jurusan mereka. Hasilnya 62 mahasiswa mencari sumber lain, dan dikatakan sebagai mahasiswa yang kritis dan logis dalam berpikir, karena tidak langsung mempercayai suatu judul. Sebanyak 2 orang percaya, berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan saat SMA. Akan tetapi, setelah mereka membaca isi beritanya, sebanyak 64 mahasiswa tertarik dan penasaran untuk mengkaji lebih dalam. Mereka mencari sumber lain sebagai bentuk kajian yang relevan dalam menemukan ilmu pengetahuan. Dalam judul ini, tidak ada mahasiswa yang ragu dan malas mencari berita, terlebih bersikap apatis menyikapi berita ini.

Berita terakhir yang disajikan, mendapatkan respon yang berbeda dari berita sebelumnya. Sebanyak 32 mahasiswa masih berusaha mengkaji dengan mencari sumber lain. Akan tetapi, terdapat 12 mahasiswa percaya, 5 ragu-ragu, dan 15 tidak peduli. Setelah membaca isi, terdapat 34 mahasiswa yang berpikir kritis dengan mencari sumber lain, 10 percaya, 5 ragu-ragu, dan 15 tidak peduli. Dengan demikian, pada berita terakhir yang diberikan peneliti tidak mampu membuat sepenuhnya siswa tertarik mengkaji isinya. Tentu saja hal ini berbeda dengan berita yang sebelumnya disajikan oleh peneliti.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Biologi memiliki potensi berpikir kritis dan logis, sesuai dengan minat mereka terhadap suatu berita. Sebagai bentuk generasi modern, mahasiswa Biologi memilih tidak peduli terhadap suatu informasi yang menurut mereka tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan. Peneliti menyimpulkan bahwa mereka secara keseluruhan mampu berpikir kritis dan logis dalam menyikapi berita di media sosial. Jika hasil penelitian sebagian besar mengarah pada sikap percaya dan ragu-ragu, maka dapat disimpulkan

bahwa mereka tidak mampu berpikir kritis dan logis dalam menyikapi berita di media sosial.

## Referensi

- Davidson, L. (2015). *Is your daily social media usage higher than average?* - *Telegraph*. [Online]. 2017, August 26. The Telegraph. Available from: <http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/11610959/Is-your-daily-social-media-usage-higher-than-average.html>.
- Ennis, R.H. (1991). *Goals for a Critical Thinking*. Illinois Critical Thinking Project: University Illinois.
- Indiahono, Dachroni. (2009). *Telaah Kebijakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Jogjakarta: Gaya Media.
- KBBI V. (2015, Februari 20). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Mangold, W.G. & Faulds, D.J. (2009). Social Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix. *Business Horizons*, 52 (4), 357–365.
- Martono, Nanang. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Patrut, M. & Patrut, B. (2013). *Social Media in Higher Education: Teaching in Web 2.0*. 1st Edition. Hershey, PA, USA, IGI Global.
- Rohampton, J. (03/01/2017). *5 Social Media Trends That Will Dominate 2017*. [Online]. 2017. Forbes. Available from: <https://www.forbes.com/sites/jimmyrohampton/2017/01/03/5-social-media-trends-that-will-dominate-2017/#1c2aa96b6ffe>.
- Sanjaya, Ridwan. (2008). *Pemanfaatan Blog untuk Bisnis, Hobby, dan Pendidikan*. Jakarta: Elex Media Koputindo.
- Susanti, Elvi. (2016). Glosarium Kosakata Bahasa Indonesia Dalam Ragam Media Sosial. *Dialektika*, 3(2), 229-250.
- \_\_\_\_\_. (2015). Analisis Wacana Kritis: Hegemoni Media Sosial Twitter Mengenai Isu-Isu Nasional di Indonesia dan Implikasinya pada Mata

Kuliah Analisis Wacana Isi Perguruan Tinggi. Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia.

Stelzner, M.A. (2016). *Social Media marketing Industry Report: How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses*. [Online]. Retrieved August, 26, 2017. Available from: <http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2016/>.

[www.beritaahokterbaru2017.blogspot.co.id/2017/02/bantah-isu-zina-habib-rizieq-syihab.html](http://www.beritaahokterbaru2017.blogspot.co.id/2017/02/bantah-isu-zina-habib-rizieq-syihab.html). Diakses 12 Februari 2017.

[www.satuindo.com/2017/05/video-adzan-diteriaki-huuuu-saat-aksi.html?m=1](http://www.satuindo.com/2017/05/video-adzan-diteriaki-huuuu-saat-aksi.html?m=1). Diakses 25 Mei 2017.

[https://health.detik.com/read/2017/06/07/112717/3522736/763/makan-cokelat-setelah-makan-mi-goreng-bisa-bikin-meninggal?\\_ga=2.257889551.563035208.1504055859-1599228303.1481166890](https://health.detik.com/read/2017/06/07/112717/3522736/763/makan-cokelat-setelah-makan-mi-goreng-bisa-bikin-meninggal?_ga=2.257889551.563035208.1504055859-1599228303.1481166890)Diakses 17 Juni 2017.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/16/disindir-anies-jakarta-masih-banjir-ahok-janji-saya-tak-sampai-satu-hari>. Diakses 18 Februari 2017.

## **BAGIAN III**

### **ETIKA DAN HUKUM**





## **Fungsi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

**Ika Atikah**

**Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

### **PENDAHULUAN**

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh – contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu.<sup>1</sup>

Etika dan moral meliputi aspek – aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi. Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantngan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar – benar bekerja secara profesional di bidangnya.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi

---

<sup>1</sup> Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing – masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu – rambu dalam arti luas, yaitu rambu – rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.<sup>2</sup>

### Tinjauan Pustaka

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama *law-enforcement*. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum di dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang – bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk – petunjuk sampai berapa jauhkah efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942.<sup>3</sup> Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertikaian, keadaan di mana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 5

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 183-184

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan *shame-culture* yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang – orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer :<sup>4</sup>

*...professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society."*

Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah – masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>5</sup> Pada dasarnya, sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>6</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka, yang dinamakan penelitian normatif

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 193

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2007, hlm. 2

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 27 -28

atau penelitian kepustakaan.<sup>7</sup> Dengan demikian, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### Etika Profesi Hukum

Etika sudah menjadi kata yang demikian sering disebut dalam kehidupan manusia. Di acara-acara temu ilmiah hingga pertemuan-pertemuan yang bersifat santai, kata "etika" mudah sekali dijadikan obyek pembahasan.<sup>9</sup> Ketika dalam suatu forum diperbincangkan tentang ucapan, sikap dan perilaku menyimpang, bisa dipastikan kata "etika" akan menjadi bagian dari obyek penting yang bisa menimbulkan perdebatan seperti ketika diskursus tentang perumusan kode etik. Konsep etika sudah menjadi perbendaharaan umum dan sering diucapkan dimana-mana dan dalam berbagai konteks oleh banyak kalangan. Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia beradab.

Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar yang pertama berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat. Dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai diri sepenuhnya. Manusia

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13-14

<sup>8</sup> Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3

<sup>9</sup> MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1

ingin meraih apa yang disebut nilai (*value*), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan, *eudaimonia*.<sup>10</sup>

Menurut Hook, etika berkait dengan soal pilihan (*moral*) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis. Bagi Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif-imperatif moral.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi ia memerlukan kekhususan dan harus dirinci. Oleh karena itu, dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya. Walau memerlukan kekhususan dan harus dirinci, Koehn mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis merinci sampai sekecil-kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tetapi harus memberi pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional.<sup>12</sup>

Perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*, Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah raga,

---

<sup>10</sup> MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 13

<sup>11</sup> Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

<sup>12</sup> Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.

Komaruddin dalam Ensiklopedi Manajemen menjelaskan bahwa profesi (*Profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi misalnya pekerjaan advokat, jaksa, notaris, dokter, arsitek, hakim dan pekerjaan yang bersifat lainnya. *Professional Job* ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu jabatan seperti guru, hakim, jaksa, dokter, pengacara, notaris adalah beberapa pekerjaan profesional.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi(kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan

penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

### **Hubungan Hukum dan Keadilan**

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai – nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.

Meskipun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir, apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, di mana itu keadilan dan kapan seseorang memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan – pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi – diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya

---

<sup>13</sup> <http://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia.pdf> diakses pada tanggal 28 September 2017

telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*). Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.<sup>14</sup>

Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi neo-imperium (penjajah baru) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena itu, hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dari hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan – alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan (*loosing trust*). Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial.

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*condition sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang – undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang – Undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang – undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.<sup>15</sup>

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang – undang, yang jelas undang – undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang – undang itu sendiri dirasakan tidak adil.<sup>16</sup> Ketika rasa

---

<sup>14</sup> Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 177-178

<sup>15</sup> Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 178-179

<sup>16</sup> Gustav Radbruch, mengingatkan bahwa dalam produk perundang – undangan (Gezets) kadang kala terdapat Gezetsliches Unrecht, yakni ketidakadilan di dalam undang – undang,



keadilan ini benar – benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu juga sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang – undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (*justice producer*). hal ini disebabkan produsen peraturan perundang – undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang – undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi.

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang – undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah – olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan – keputusan

---

sementara tidak sedikit ditemukan *unbergezesliches Recht*. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul “*Gezetsliches Unrecht und ubergezetsliches Recht*”, dimuat dalam *Suddeutsche Juristen-Zeitung*, penerbitan bulan Agustus 1946, nomor 5, kurang lebih tiga tahun sebelum filsuf hukum kenamaan, berkebangsaan Jerman ini meninggal dunia di negerinya pada tanggal 23 Nopember 1949 (Laica Marzuki, M.SIRI Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, 1995, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 95

akal agar berjalan di atas nilai – nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.<sup>17</sup>

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila di ganggu akan mengakibatkan kegoncangan. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan. Rasa keadilan telah dibawa manusia sejak kecil dan manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa telah dianugerahi kecakapan untuk merasakan apa yang dinamakan adil.

Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral.<sup>18</sup> Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau semar – semar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.<sup>19</sup> Kekuatan moralpun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkta dan martabat manusia.

Dalam kaitan ini Hart menyatakan *“these facts suggest the view that law is the best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of it essence.”* Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas, melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep – konsep moral agar hukum itu sendiri tidak tiranik, jahat secara normal dan merenggangkan diri manusia dengan harkat martabatnya.

### Kedudukan Etika Profesi Hukum

Kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan (*statements of expected behavior*). Pokok di dalam proses perubahan perikelakuan melalui kaidah – kaidah hukum adalah konsepsi – konsepsi tentang kaidah, peranan (*role*), dan sarana – sarana maupun cara – cara untuk mengusahakan adanya konformitas (*conformity-inducing measures*). Peranan memiliki arti sebagai suatu sistem kaidah – kaidah yang

---

<sup>17</sup> M. Rasjidi dan H. Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, 1988, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 17

<sup>18</sup> Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 123

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hlm. 45

berisikan patokan – patokan perikelakuan, pada kedudukan – kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Peranan sendiri memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum dapat sesuai atau berlawanan dengannya.

Hans Kelsen pernah mengemukakan “.....the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individual only, but to the behavior of two individuals at least, the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction.”<sup>20</sup>

Suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar – pelanggarnya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan – pilihan para pemegang peranan, melalui aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas yang antara lain berwujud sanksi. Proses tadi berjalan dengan cara :<sup>21</sup>

- a. Penetapan kaidah – kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan;
- b. Perumusan tugas – tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan – tindakan positif atau negatif, sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah – kaidah hukum, sehingga “*The Secondary norm stipulates the behavior which the legal sanction endeavours to bring about stipulating the sanction.*”

Uraian Kelsen tersebut, hanya terbatas pada hubungan antara kaidah – kaidah hukum tersebut. Baik pembentuk hukum, penegak hukum maupun para pencari keadilan, kesemuanya adalah pemegang peranan yang mempunyai struktur pilihan yang ditentukan oleh lingkungannya masing – masing. Oleh karena itu, penegak hukum pun harus menaati segala norma dan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan keprofesiannya.

Di Indonesia, secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi otonomi keberadaan profesi tertentu dengan etika profesi

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

dan kode etiknnya. Beberapa di antaranya, yakni pengakuan terhadap otonomi profesi tersebut, sudah dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan, misalnya undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, undang-undang tentang Advokat, Undang-undang tentang Notaris, undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pengemban profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Oleh karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait. Mereka harus mempercayai bahwa pengemban profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya.

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi

demikian tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.<sup>22</sup>

Advokat di dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy: *ourage in the most important attribute of a lawyer. It is more important than important competence or vision. It can never be the limited, dated or ourwom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the chamber of the mind.*" (Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang Advokat . Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan).<sup>23</sup>

## Penutup

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Keberadaan hukum dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas. Pelaksanaan penegakan hukum juga tidak terlepas dari faktor-faktor sosial-kultural dimana hukum berlaku. Fungsi dan kedudukan etika profesi hukum dalam penegakan hukum, tentu memiliki kelemahan yang mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia yang terletak pada sistem hukum dan pemegang peran profesi hukum di Indonesia sehingga keberadaan pengembangan profesi hukum belum mampu mewujudkan cita – cita hukum.

---

<sup>22</sup> <http://www.esaunggul.ac.id/article/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh/?argwqgnhmyuoccvq?friqeiqqezfbjiqg> diakses pada tanggal 27 September 2017

<sup>23</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, hlm. 1

## Referensi

- Aburaera, Sukarno, dkk. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta, Indonesia: KENCANA.
- Ahmadi, Fahmi M & Jaenal Arifin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Hakim, MF Rahman. (2010). *Etika dan Pergulatan Manusia*. Surabaya, Indonesia : Visipers.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. (2007). *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Fauzie & Partners.
- Hasibuan, Fauzie Y. (2012). *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta, Indonesia. <http://www.esaunggul.ac.id/article/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh/?argwqqnhmyuoccvq?friqeiqqezfbjjqg>
- Marwiyah, Siti. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Madura, Indonesia : UTM Press.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung, Indonesia : Citra Aditya.
- Rahman, Supirman & Nurul Qamar. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Makassar, Indonesia : Refleksi.
- Rasjidi. (1987). *Filsafat Hukum*. Bandung, Indonesia: Remadja Karya.
- Rasjidi, M. dan H. Cawidu. (1988). *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta, Indonesia : Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, Indonesia : Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Indonesia : Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia : Alfabeta.

- Sunggono, Bambang. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia : Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung, Indonesia : Citra Aditya.
- Rasjidi. (1987). *Filsafat Hukum*. Bandung, Indonesia: Remadja Karya.
- Rasjidi,M. dan H. Cawidu. (1988). *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta, Indonesia : Bulan Bintang.





# **Etika Komunikasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh**

**Sri Sedyaningsih**

**Ilmu Komunikasi  
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka**

## **PENDAHULUAN**

Banyak definisi yang diberikan kepada pembelajaran secara online. Namun pada intinya adalah proses pembelajaran dalam bentuk kelas yang menggunakan media, baik itu elektronik maupun cetak. Dalam proses interaksi pembelajaran jarak jauh mengacu pada interaksi antara guru dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa dan mahasiswa dengan materi ajar utama. Pada pembelajaran online banyak proses pembelajarannya melalui internet atau media lain yang sifat interaksinya *synchronous* dan *asynchronous*. *Synchronous* adalah bentuk interaksi yang secara langsung mendapatkan umpan balik walaupun tidak melalui tatap muka, misalnya melalui skype, webinar atau video conference. Sedangkan *asynchronous* ada perbedaan waktu dalam berinteraksi, misalnya melalui email. Semua pada dasarnya adalah pembelajaran yang menggubnakan internet atau aplikasi web sebagai media untuk pengalaman belajar (E-Learning Advisory,2002), dilain pihak ada yang mengatakan bahwa pembelajaran online adalah pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi.

Artikel ini didasarkan pada hasil penelitian mengenai etika komunikasi melalui media komputer pada tahun 2014 dan sudah dipresentasikan di International Council for Distance Education (ICDE) di Moscow Rusia pada bulan Oktober 2014. Dari hasil penelitian itulah artikel ini ditulis ulang dengan menggunakan beberapa kajian teori yang berbeda yang lebih menekankan pada etika komunikasinya. Kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi secara langsung sangat mempengaruhi proses pembelajaran jarak jauh, sebagaimana yang diterapkan oleh Universitas Terbuka, sebagai perguruan tinggi negeri dan pionir dalam pendidikan jarak jauh di Indonesia. Kemajuan teknologi selalu memberikan dua pilihan yang berbeda tergantung kapan dan bagaimana kita memanfaatkannya. Dengan

300 ribu mahasiswa yang tersebar diseluruh Indonesia dan 2000 diantaranya ada di 32 negara maka teknologi adalah senjata yang tidak pernah lepas dalam memberikan pembelajaran bagi mahasiswanya. Salah satu layanan bantuan belajar yang diberikan oleh Universitas Terbuka adalah tutorial online (tuton). Komunikasi berbasis teknologi membuat antara sumber dan penerima atau tutor dan mahasiswanya tidak bertemu secara phisisk, dan ini berarti meminimalkan konteks dimana interaksi terjadi. Konteks ada namun sangat berbeda dengan konteks dalam tatap muka. Dalam tatap muka konteks yang ada antara tutor dan mahasiswa relative bisa terlihat, namun pada interaksi online konteks tidak nampak secara nyata, walau ia dapat dijelaskan secara verbal. Hasil penelitian Sedianingsih (2014) menunjukkan bahwa dari aktivitas tutorial online mahasiswa Universitas Terbuka selama 2 bulan (8 kali inisiasi, diskusi dan 3 tugas) komunikasi yang terjadi bukan komunikasi interpersonal tetapi komunikasi non interpersonal, karena interaksi yang terjadi sumber dan penerima tanpa saling mengenal. Dalam interaksi kebutuhan dasar manusia yaitu dicintai dan diterima, tidak terlihat nyata kecuali kebutuhan yang ketiga yaitu dikontrol dan ini didominasi oleh Tutor.

### **Komunikasi Pembelajaran**

Komunikasi pembelajaran atau instruksional adalah komunikasi yang terjadi dalam dunia pembelajaran. Berasal dari kata instruksi yang artinya suatu tindakan untuk memberikan instruksi, atau dalam dunia pendidikan dikatakan sebagai pengalihan informasi/pengetahuan yang disertai dengan arahan dan bimbingan atau terstruktur. Proses belajar mengajar yang melibatkan guru-murid, dosen-mahasiswa atau fasilitator-peserta, adalah suatu bentuk proses pembelajaran yaitu suatu rangkaian peristiwa yang mempengaruhi peserta didik atau pembelajar sedemikian rupa sehingga perubahan perilaku yang disebut hasil belajar terfasilitasi. (Suparman dalam Sedianingsih, 2014).

Dalam dunia komunikasi secara umum kita mengenal teori komunikasi yang sangat mendasar dari Shannon dan Weaver yaitu adanya sumber, pesan, media dan penerima. Keempat elemen tersebut terkesan sangat sederhana namun pada prakteknya tidaklah sesederhanan 4 komponen itu saja, karena dibalik komponen tersebut ada kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan dalam membuat suatu komunikasi menjadi efektif. Contoh paling sederhana, tatkala kita memerintahkan siswa untuk mengerjakan

pekerjaan rumah dan dikumpulkan pada hari Senin, pada kenyataannya pesan atau perintah tersebut hanya dilakukan oleh 75% siswa, yang lain tidak mengerjakan dengan berbagai alasan. Hal ini bisa dikarenakan banyaknya factor pendukung dalam berkomunikasi yang mempengaruhi efektifitas pesan tersebut. Proses komunikasi selalu berada dalam suatu budaya atau situasi tertentu yang disebut kontekstual. Banyak symbol-simbol atau tanda sehingga komunikasi menjadi sangat dinamis. Makna dalam komunikasi tidak lahir dari komunikasi itu sendiri tetapi dimaknai oleh berbagai hal, seperti pengalaman masa lalu, kondisi saat ini dan budaya atau kebiasaan yang menyertai orang yang berkomunikasi. Makna dibentuk oleh budaya yang menyerap secara perlahan terhadap seseorang baik itu secara personal atau komunikasi interpersonal, melalui media massa baik itu cetak ataupun elektronik dan kini melalui media sosial.

Komunikasi tidak pernah lepas dari komunikatornya, komunikator dapat digunakan sebagai acuan dalam proses komunikasi (Anne & Watson, 2007). Shanon dan Weaver tidak mempertimbangkan terjadinya umpan balik dalam suatu proses komunikasi, mereka hanya melihat komunikasi itu hanya sumber menyampaikan pesan, dan pesan diterima oleh komunikan. Oleh karena pada tahun 1957 Osgood dan Schram memodifikasi konsep komunikasi tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan realita dimana dikatakan bahwa komunikasi adalah proses transaksi interpretasi. Yang dimaksudkan adalah bahwa proses komunikasi akan efektif apabila komunikator dan komunikan mempunyai persamaan (Griffin, 2003). Jadi dari bahasan diatas dapat dimaknai bahwa komunikasi instruksional terjadi karena adanya perencanaan hingga penyampaiannya, tidak datang secara tiba-tiba, dalam dunia pembelajaran adalah proses penyampaian pesan ajar atau materi ajar dari guru, dosen, fasilitator atau tutor kepada peserta didiknya. Ada sedikit perbedaan antara komunikasi pada umumnya dengan komunikasi instruksional. Pada proses komunikasi ada 4 elemen yang wajib ada yaitu sumber, pesan, media dan penerima, namun idealnya suatu proses komunikasi harus ada umpan balik sehingga terjadi interaksi. Pada komunikasi instruksional ada komponen-komponen yang harus ada disekitarnya, yaitu lingkungan pembelajaran, peserta didik, guru, perilaku verbal dan non verbal guru, persepsi peserta didik terhadap guru dan hasil atau outcome dari proses belajarnya. Prinsipnya sebenarnya sama, hanya saja penggunaan istilah yang sedikit berbeda. Mengambil dari apa yang ditulis Valencic dan Richmon (2004), dalam komunikasi instruksional harus

ada keenam komponen tersebut, kita padu padankan dengan apa yang diungkapkan Osgood dan Schramm.

1. Lingkungan instruksional, adalah tempat diman komunikasi berlangsung. Pada teori komunikasi kita kenal dengan apa yang disebut konteks, komunikasi tidak pernah terlepas dari konteks dimana komunikasi itu terjadi. Demikian halnya dengan lingkungan instruksional, lingkungan atau suasana belajar harus ditumbuhkan atau diciptakan agar peserta didik nyaman dalam proses belajar mengajarnya.
2. Peserta didik, dalam proses komunikasi selalu ada yang namanya penerima atau komunikan, nah peserta didik inilah yang disebut sebagai komunikan. Kalau dikatakan bahwa komunikasi adalah proses transaksional, maka ada transaksi antara guru dan murid, antara komunikator dan komunikannya.
3. Guru, fasilitator, tutor, adalah sumber yang menyampaikan pesan dalam hal ini sebagai komunikator. Harus ada persamaan interpretasi dalam mewujudkan komunikasi instruksional yang efektif
4. Perilaku verbal dan non verbal. Dua hal yang mirip namun dapat memberikan makna yang sangat berbeda. Dalam proses komunikasi verbal adalah kata-kata atau tulisan yang diungkapkan melalui sebuah pesan. Sedangkan non verbal ada semua kondisi, gerakan atau bahkan suara yang menyertai proses pengiriman pesannya. Kondisi non verbal harus dapat dipahami oleh mereka yang terlibat dalam proses interaksi.
5. Persepsi, pada proses komunikasi instruksional dikatakan bahwa persepsi terhadap seorang komunikator dalam hal ini guru sangat menentukan efektif tidaknya proses komunikasi, dalam hal ini dimaknai bahwa seorang komunikator harus memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga dipercaya oleh peserta didiknya.
6. Hasil atau outcome, adalah apa yang diharapkan dari proses belajar mengajar, bisa kognitif atau pengetahuan, afektif hal yang berkaitan dengan sikap, rasa serta motoric yaitu perilaku. Hal ini dianalisis sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari keenam komponen tadi apabila diterapkan sesuai dengan kaidah pembelajaran dan komunikasi maka akan menghasilkan proses pembelajaran. Bagaimana penerapannya pada komunikasi pembelajaran jarak jauh? Moore dan Kearsley (2012) menyatakan bahwa proses transformasi pengetahuan atau informasi dari komunikator ke peserta didik disebut presentasi, dalam komunikasi jarak jauh hal ini dikatakan interaksi yang dilakukan melalui media, proses sama hanya saja media yang digunakan berbeda.

Pembelajaran jarak jauh, sebagaimana kita ketahui pada prinsipnya adalah proses pembelajaran dengan menggunakan media sebagai penyampai pesannya, sehingga pasti terjadi jarak antara guru, dosen, fasilitator atau tutor dengan para peserta didiknya, oleh karenanya interaksi yang dilakukan sifatnya komunikasi bermedia atau *intermediated communication*. Komunikasi tatap muka dengan komunikasi bermedia sangat berbeda, hal ini dikarenakan tidak hadirnya secara utuh tanda-tanda non-verbal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rice (1984) bahwa komunikasi bermedia tidak bisa sepenuhnya menyertakan emosi atau hubungan personal dsalam interaksinya, dan ini yang disebut dengan komunikasi *hyper-personal*.

### **Hyper-Personal Communication**

Komunikasi hyper-personal adalah bagian dari komunikasi interpersonal yang dilakukan secara virtual, artinya melalui dunia maya dan komunikator atau sumber mempunyai kebebasan untuk menghasilkan, memperbaiki pesan yang ingin disampaikan. Oleh Usita (2010) dikatakan sebagai karakteristik komunikasi online yang bisa tidak jelas siapa, tidak langsung interaksinya. Karena ketidakjelasan yang sering terjadi, dan munculnya rasa saling tidak mengenal membuat komunikasi yang terjadi sifatnya tidak personal. Dengan rasa tidak mengenal itulah maka nilai-nilai atau norma budaya tidak selalu menyertai dalam proses interaksi. Dalam proses pembelajaran biasanya komunikasi terjadi secara top-down atau dari atas ke bawah, dari guru ke murid, dari tutor ke peserta didik, sifat peserta hanya menerima, ini yang disebut dengan karakter dasar hubungan murid dan guru (Paulo Freire, 1972). Ada juga metode yang sifatnya horizontal, dimana interaksi guru dan murid sifatnya lebih sejajar, hal ini bisa ditandai dengan adanya diskusi dan tukar pendapat antara guru dan siswa, situasi interaksi tidak didominasi oleh guru atau tutor. Apapun metode yang digunakan

komunikasi atau interaksi yang sifatnya hyper-personal akan terjadi bila dilakukan secara jarak jauh. apakah komunikasi hyper-personal menyertakan etika dalam interaksinya? Dalam komunikasi yang sifatnya hyper-personal, ada empat hal yang harus diwaspadai yaitu sifatnya bisa langsung atau tidak langsung sehingga kurang umpan balik, lemah dalam proses dramanya, minim menyertakan tanda-tanda social dan terakhir kemungkinan pengirim yang tak dikenal atau anonym..(Kiesler, 1984). Dengan sifat hyper-personal yang meminimalkan tanda-tanda social, dapatkan etika komunikasi terpenuhi melalui komunikasi bermedia?

### Isu etika dalam pembelajaran

Interaksi secara tatap muka akan mendapatkan umpan balik secara langsung, dapat melihat apakah seseorang berperilaku sesuai nilai atau norma atau berperilaku sesuai etika. Sedangkan melalui media ada jarak yang menyebabkan etika dan perilaku tidak terlihat secara nyata, yang oleh Savin (1992) dikatakan sebagai *psychological distance*. Menurut Fass dalam Brown (2008), sembilan kategori yang mempengaruhi proses pembelajaran secara online, dapat dilihat dari pembelajarannya, yaitu:

1. Bantuan yang kurang tepat
2. Penyalahgunaan sumber
3. Tutorial yang tidak maksimal
4. Interpretasi data yang kurang tepat
5. Penggunaan sumber akademi yang kurang tepat
6. Kurang menghormati kerja yang lain
7. Kurangnya perlindungan terhadap hasil penelitian atau makalah atau hasil kerja
8. Kurangnya etika dalam berkomunikasi melalui computer
9. Kurangnya pemahaman terhadap copy-right atau plagiarism

### Peran Guru/Tutor/Fasilitator

Peran guru atau komunikator dalam konsep komunikasi, sangat besar. Bagaimana guru membuat suatu perencanaan dalam proses pembelajaran dan juga melaksanakannya sesuai dengan rencana, sudah bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” yang mengandung makna bahwa guru adalah teladan dari para peserta didiknya, dan mengibaratkan bahwa apa yang dilakukan guru dengan baik belum tentu murid mencontohnya,

apabila guru melakukan hal yang tidak baik, maka apa jadinya peserta didiknya. Bagaimana guru membawa nilai atau moral kedalam interaksi melalui dunia maya. Harus disadari bahwa hal yang mendasar dalam berinteraksi melalui dunia maya adalah moral yang bagus, dengan cara memberikan contoh melalui hal-hal yang dijadikan bahan interaksi dengan peserta didiknya, contoh mentaati aturan yang dibuat, disiplin dalam waktu, menghargai pendapat peserta didik, selalu memberikan umpan balik bagi pendapat yang diberikan apapun pendapatnya. Cara guru/tutor/fasilitator memberikan umpan balik bisa membuat peserta didik termotivasi atau sebaliknya. Interaksi antara guru dan murid atau tutor dan peserta didik selalu melalui komunikasi interpersonal. Kalau melalui media maka dikatakan sebagai interpersonal mediated communication atau komunikasi interpersonal bermedia. Karena interpersonal maka harus mengandung prinsip-prinsip komunikasi interpersonal yaitu , kita tidak pernah dapat tidak berkomunikasi, semua orang dimanapun dan kapanpun tidak pernah bisa terlepas dengan pihak lain, interaksi selalu terjadi disadari ataupun tidak, kedua komunikasi interpersonal tidak pernah bisa dihapuskan, prinsip ini harus selalu kita ingat karena apapun yang sudah kita ucapkan tidak pernah bisa ditarik kembali. Ucapan kita sudah tertanam pada diri seseorang, seribu maaf bisa diberikan namun kata itu atau ucapan kita tidak pernah bisa hilang, ketiga komunikasi interpersonal melibatkan etika, kenapa ada etika disini, karena setiap kita berinteraksi dengan pihak lain maka kita harus mengetahui dan memahami kebiasaan orang tersebut, ini adalah salah satu cara agar komunikasi lebih efektif. Menerapkan etika yang berlaku disuatu tempat jauh akan lebih memudahkan dalam proses komunikasi. Ingat bahwa komunikasi adalah kontekstual. Keempat orang membangun makna melalui komunikasi interpersonal, kenapa dikatakan membangun makna, karena makna terbentuk karena interaksi dan makna muncul bukan dari kata-kata atau verbal namun suatu rangkaian antara kata, perilaku dan situasi yang dinamakan kontekstual. kelima komunikasi interpersonal membangun dan memelihara hubungan, keenam komunikasi bukan penyelesaian masalah sendiri, ini meneruskan sifat komunikasi yang kontekstual tadi, lebih ditekankan kalau komunikasi tidak pernah sama dari satu tempat dengan tempat lainnya karena komunikasi tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan masalah karena sifatnya yang kontekstual dan ketujuh komunikasi yang efektif dapat dipelajari, keahlian berkomunikasi bukan talenta, tetapi bisa dipelajari (Wood, 2016). Bagaimana bila prinsip-prinsip

komunikasi tersebut diterapkan pada komunikasi interpersonal bermedia? Pada dasarnya sama hanya saja kita sebagai pengguna media harus memahami dengan baik bagaimana karakteristik media, dan mampu membayangkan atau berimajinasi bagaimana kondisi dan konteks dari seseorang yang sedang berinteraksi dengan kita. Permasalahan utama pada komunikasi bermedia ini adalah pemahaman terhadap pihak lain yang sangat kurang karena sifatnya yang dekontekstual, artinya tidak berada pada konteks yang sama. Contoh yang paling sederhana adalah tatkala kita menerima suatu pesan, maka pesan tersebut akan dimaknai disaat dia menerimanya, dan kemungkinan reaksi akan berbeda bila pesan itu diterima dalam situasi yang berbeda pula. Menurut Jones, 2007 orang yang pintar dalam pembelajaran online harus dimulai dengan tujuan yang baik, mampu membaca dengan baik, mau mengerti pihak lain dan menghindari diskusi mengenai pihak lain yang sifatnya negative serta mampu memisahkan mana masalah yang bisa dibicarakan di publik dan yang sifatnya personal dan menghargai privasi orang lain. Bila itu semua dipenuhi maka berita-berita *hoax* tidak lagi kita temukan. Ingat yang dikatakan Putnam (2010) bahwa mari kita coba untuk berbicara jujur di media social maka orang selalu akan hormat dan percaya pada kita

Selain itu gaya Bahasa dan tutur kata sangat berpengaruh dalam proses interaksi, dalam komunikasi pesan non-verbal mempunyai pengaruh lebih besar daripada pesan verbalnya. Dan tutur kata adalah salah satu elemen non-verbal berupa paralinguistik yang memiliki makna berarti pada proses interaksi. Bagaimana peran bahasa?

### **Bahasa sebagai simbol kekuasaan**

Bicara soal bahasa sebagai symbol kekuasaan, tidak terlepas dari tokoh utamanya yaitu Pierre Boudieu. Dalam bukunya yang berjudul *language and symbolic power*, tertulis bahwa dengan kata-kata kita bisa membangun sekaligus merusak, kata-kata sebagai alat untuk mengintimidasi, tanda untuk menunjukkan sopan santun. Dengan kata lain kita sadar bahwa Bahasa adalah menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan sosial, dengan segala tipu muslihat dan kesalahannya, dan menjadi bagian dari kehidupan social kita untuk berinteraksi (Thompson, 1991). Mungkin istilah bahasa sebagai simbol kekuasaan lebih banyak ditekankan atau diimplementasikan pada dunia politik, namun kalau dilihat dari makna bahasa sebagai kekuasaan dapat juga dilihat dalam keseharian kita. Sebagai



contoh tat kala kita melihat interaksi antara bawahan dan atasan, maka tanpa harus mengenal atau bertanya kita sudah bisa melihat bagaimana gaya bahasa yang digunakan, misalnya ajakan “yuk kita makan” ....itu adalah Bahasa dan gaya bahasa untuk interaksi horizontal atau dari atas ke bawah. Tidak demikian bila kita mengajak atasan makan, maka kalimat yang digunakan berbeda “Bu/Pak mari kita makan” .....bahasa atau gaya bahasa yang digunakan sudah menunjukkan hirarki sosial dalam kehidupan.

### Kesimpulan

Pola komunikasi bermedia memang tidak bisa disamakan dengan tatap muka, sifatnya non-personal walaupun antara dua orang, karena ada media yang digunakan atau memisahkan, sehingga tanda-tanda social atau yang disebut konteks tidak penuh menyertainya. Olah kata atau tutur kata yang dituangkan dalam pesan bermedia harus dibuat agar dimaknai sama oleh penerimanya, dan hal ini memerlukan suatu daya imajinasi yang cukup tinggi. Kata-kata yang tertuang dalam instruksional harus mengandung unsur yang sifatnya *social script*, artinya kata-kata yang digunakan harus memiliki makna yang sama bagi semua pihak, *social script* istilah yang digunakan oleh Broom (2005) untuk membedakan makna konotatif dan denotative dalam dunia pembelajaran. Dalam etika pembelajaran kita dapat melihat dari dua perspektif yaitu situasional dan dialog, kedua perepektif yang diungkapkan oleh Berkman dan Shumway (2003) harus diimplementasikan, karena pertama etik yang sifatnya situasional adalah proses pembelajaran yang melihat situasi sebagai dasar berinteraksi, sedangkan dialog adalah bentuk komunikasi yang tidak hanya instruksi tetapi mengajak lawan bicara dalam hal ini peserta didik sebagai mitra. Hal ini diperkuat dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi apapun.

Oleh karenanya dalam proses belajar mengajar kita harus tetap memberikan rasa hormat terhadap lawan bicara kita siapapun dia, menempatkan diri sebagaimana mestinya dan selalu berimajinasi mengenai kondisi atau situasi pembelajaran yang ada disebrang sana. Artinya kita tidak bisa menyamakan orang lain dengan diri kita, yang harus dilakukan adalah membuat proses pembelajaran se-natural mungkin dan sama bagi semua. Hal-hal yang sifatnya relatif harus dihindarkan, karena relatif memiliki makna yang sangat tergantung dari situasi dan kondisi. Etika komunikasi selalu didasarkan pada pengetahuan, aturan dan norma yang

ada disekitarnya. Dan akhirnya tatkala etika komunikasi selalu dijunjung tinggi maka kepercayaan dan apresiasi yang kita dapatkan.

## Referensi

- Barlund, DC. (1970). *A Transactional Models of Communication*, in KK Sereno and CD Mortensen (eds) *Foundation of Communications Theory*, New York, Harper Row
- Bourdieu. (1991). *Language and Symbolic Power*, edited John Thompson, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1991
- Rainer, Bromme, Hesse Friedrich W., & Spada Hans. (2005). *Barriers and Biases in Computer-Mediated Knowledge Communication, Computer-Supported Collaborative Learning*. Volume 5, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
- Boyd and Ellison. (2007). Social Network sites: Definition, History and Scholarship. *Journal of Computer Mediated Communication*, 13(1), 210-230
- Brown, Ted (2008). *Ethics in Learning, Workshop for Net Business Ethics*. February 2008, Honolulu
- Demiray, Ugur & Sharma, Ramesh. (2009). *Ethical Practices and Implications in Distance Learning*. Information Science Reference: New York
- Dominic, Joseph R. (2011). *The Dynamics of Mass Communication, Media in Transition*. McGraw-Hill International Edition
- Freire, Paulo. (1996). *Pedagogy of the oppressed*. London and New York; Penguin Books
- Griffin, E. (2003). *A First Look at Communication*. 5<sup>th</sup> edn. New York: McGraw Hill
- Hill Anne, Watson James, Rivers Danny and Joyce Mark. (2007). *Key Themes in Interpersonal Communication: Culture, Identities and Performance*. McGraw Hill: Open University Press
- McWilliam, E & Dawson. (2008). Pedagogical practice after the information age. *Journal of future Studies*, 12 (3), 1-14

- New Zealand Council for Educational Research. (2004). *Critical Success Factors and Effective Pedagogy for e-learning in Tertiary Education*. Wellington, New Zealand
- O'Keefe,D.J. (2002). *Persuasion*. 2<sup>nd</sup> ed, Thousand Oaks, CA: Sage
- Gilly, Salmon. *E-Moderating, Success without Serried Ranks*. Diunduh maret 2015 dari <http://oubs.open.ac.uk/gilly>
- Scheufele,D.A & Lewenstain,B.V. (2005). The Public and Non-Technology. *Journal of Nanoparticle Research*, 7, 659-667
- Schramm,W. (1954). *The Process and Effects of Mass Communication*. Champaign Ill: University of Illinois Press
- The Ultimate Communication Course Five Day London Based Training, <http://www.ableaustralia.org.au/communication-etiquette.asp>)
- Usita Lem. Hyperpersonal Communication. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2011 dari<http://identityspecialist.net/2010>
- Westin, A.F. (2003). Social and Political Dementions of Privacy. *Journal of Social Issues*,59 (431-453)
- Wood,T.Aulia. (2016). *Interpersonal Communication, Everyday Encounters*. 8th edition, Boston: Cengage Learning

## **ETIKA BISNIS TRANSPORTASI ONLINE DALAM ERA GLOBALISASI**

**Purwaningdyah Murti Wahyuni**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka**

### **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi di beberapa sektor kehidupan. Salah satu sektor yang turut berubah adalah sektor penyedia jasa transportasi. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis aplikasi *online* pada kota-kota besar di Indonesia. Layanan transportasi berbasis aplikasi *online* menjadi penunjang aktivitas masyarakat di Indonesia. Bagi warga di kota besar seperti Jakarta, intensitas penggunaan transportasi berbasis aplikasi *online* telah menghadirkan pengalaman yang berbeda, baik pengalaman yang baik atau buruk. Pengalaman yang terbentuk tersebut tidak lepas dari faktor-faktor diluar kehendak para pihak. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan transportasi berbasis *online* seperti Gojek, Uber dan Grab, sejauh tepat dalam cara penyelenggaraan jasa dan tempat diselenggarakannya jasa transportasi. Bagi daerah dengan kendala penyediaan fasilitas kendaraan umum, keberadaan transportasi *online* akan membantu konsumen yaitu penumpang. Selain bagi masyarakat sekitar, para pendatang atau wisatawan yang kebetulan sedang berkunjung ke daerah-daerah tersebut, daripada merental mobil lebih baik menggunakan taksi atau ojek *online*. Sarana transportasi memiliki peran vital dalam upaya peningkatan keterjangkauan (*accessibility*) suatu wilayah. Transportasi berbasis aplikasi *online* dapat menjadi jawaban untuk mempercepat perkembangan suatu daerah melalui peningkatan keterjangkauan daerah tersebut.

Saat ini, masyarakat Indonesia tengah kecewa pada masalah transportasi yang padat dan tidak teratur. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara berbanding lurus dengan masyarakat yang kemudian enggan untuk beraktivitas diluar rumah. Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau

membeli barang tertentu. Akibatnya, masyarakat mencari solusi praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi *online*.

Memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat terutama di kota besar sedang menggandrungi transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi *smartphone*/gawai. Selain dapat menghemat waktu, transportasi *online* juga bisa mengurai tingkat kemacetan, terutama di kota-kota besar. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis transportasi *online*. Media *online* menjadi sarana masyarakat dalam menjalankan bisnis transportasi masa kini. Tak heran pebisnis Indonesia banyak yang membuka jasa transportasi menggunakan media *online*. Oleh karena itu pebisnis ini harus betul-betul menguasai aturan main yang aman, baik itu etika bisnisnya maupun rambu-rambu hukumnya.

Menurut bahasa Yunani, kata etika berawal dari kata *ethos* yang memiliki arti sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, watak. Sedangkan, Magnis Suseno berpendapat bahwa etika bukan merupakan suatu ajaran melainkan suatu ilmu. Kata kedua adalah bisnis, yang diartikan sebagai suatu usaha. Jika kedua kata tersebut dipadukan menjadi “etika bisnis”, maka dapat didefinisikan sebagai suatu tata cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan berbisnis, dimana dalam tata cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik dari individu, institusi, kebijakan, serta perilaku berbisnis.

Untuk menyusun etika bisnis yang bagus, maka perlu diperhatikan pengendalian diri, pertanggungjawaban sosial, menjadikan persaingan secara sehat, penerapan konsep yang berkelanjutan, dapat mempertahankan keyakinannya, konsisten dengan sebuah aturan yang sudah disepakati bersama, penumbuhan kesadaran serta rasa memiliki dengan apa yang sudah disepakati, menciptakan suatu sikap untuk saling percaya pada antar golongan pengusaha, serta perlu diadakannya sebagian dari etika bisnis untuk dimasukkan dalam hukum yang dapat berupa suatu perundang-undangan.

Pada dasarnya sebuah etika bisnis ini digalakkan karena memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam dunia bisnis. Adapun tujuan etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga dimaksudkan

untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan.

Etika bisnis ini tingkatannya lebih luas jika dibanding dengan ketentuan yang sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, bahkan jika dibandingkan dengan standar minimal dari ketentuan hukum maka etika bisnis menjadi standar atau ukuran yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan, dalam kegiatan berbisnis tidak jarang kita jumpai adanya bagian abu-abu dan tidak diatur berdasarkan ketentuan hukum.

### **Aspek dan Sudut Pandang Etika Bisnis**

Menurut Bertens (2000) terdapat tiga aspek dan sudut pandang pokok dari bisnis, yaitu:

1. Sudut pandang ekonomi, bisnis adalah kegiatan ekonomis, maksudnya adalah adanya interaksi produsen/perusahaan dengan pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak.
2. Sudut pandang etika, dalam bisnis berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Maksudnya adalah, semua yang kita lakukan harus menghormati kepentingan dan hak orang lain.
3. Sudut pandang hukum, bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam praktik hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Sardi (2004 : 32-33) membedakan etika menjadi dua yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi, yaitu etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.

Dari beberapa pengertian tentang etika maka dapat disimpulkan bahwa etika mengandung unsur-unsur tentang ; asas, norma dan nilai- nilai moral; nilai moral tersebut direfleksikan dalam sikap dan perilaku serta pegangan individu atau kelompok/masyarakat. Dengan demikian jika disimpulkan, maka etika berarti norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pegangan individu atau suatu kelompok masyarakat yang menjadi dasar dari sikap dan perilaku. Dalam perkembangannya perbuatan yang melanggar norma-norma etika kemudian sering disebut juga perbuatan yang tidak etis.

Dengan demikian etika bisnis adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pegangan individu atau suatu kelompok masyarakat yang menjadi dasar dari sikap dan perilaku tentang cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan di bidang ekonomi itu.

### **Prinsip-prinsip Etika Bisnis**

Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan acuan terkait cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Sonny Keraf (1998), terdapat lima prinsip yang dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu (Agoes & Ardana, 2009:127-128):

#### **a. Prinsip Otonomi**

Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain.

#### **b. Prinsip Kejujuran**

Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati.

#### **c. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membedakan dari berbagai aspek baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya.

#### **d. Prinsip saling Menguntungkan**



Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip *win-win solution*, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan.

e. Prinsip Integritas Moral

Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya.

Menurut Adiwarman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting ada nilai – nilai etika bisnis yang seharusnya tidak boleh dilanggar, yaitu :

a. Kejujuran

Banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapat keuntungan. Ini jelas keliru. Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Bahkan, termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis.

b. Keadilan

Perlakukan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil untung yang merugikan konsumen.

c. Rendah Hati

Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya, dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk/jasa. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna, pada kenyataannya justru sering kali terbukti buruk.

d. Simpatik

Kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien atau konsumen anda, tetapi juga di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis anda, seperti karyawan, sekretaris dan lain-lain.

e. Kecerdasan

Diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan pula seorang pebisnis mampu mewaspadai dan menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnisnya.

Hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan Etika Bisnis adalah

- a. Menuangkan ke dalam hukum positif  
Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.
- b. Mampu menyatakan yang benar itu benar  
Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.
- c. Pengembangan tanggung jawab sosial (Social Responsibility)  
Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat.
- d. Memelihara kesepakatan  
Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap hal-hal yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis.

Faktor penyebab perusahaan atau produsen melakukan pelanggaran adalah:

- a. Menurunnya formalisme etis (moral yang berfokus pada maksud yang berkaitan dengan perilaku dan hak tertentu).
- b. Kurangnya kesadaran moral utilitarian (moral yang berkaitan dengan memaksimalkan hal terbaik bagi orang sebanyak mungkin)
- c. Undang – undang atau peraturan yang mengatur perdagangan, bisnis dan ekonomi masih kurang
- d. Lemahnya kedudukan lembaga yang melindungi hak – hak konsumen
- e. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta informasi mengenai bahan, material berbahaya

- f. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis (tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan semata, bukan kegiatan sosial)
- g. Rendahnya tanggung jawab sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility)
- h. Kurangnya pemahaman tentang prinsip etika bisnis

Mengingat hukum diturunkan dari etika, maka dapat dipastikan bahwa semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika. Sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar dapat diformulasikan dalam unsur perilaku yang objektif, tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Etika lebih melihat pada motif, kehati-hatian, dan kepatutan yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan pilihan tindakan, apalagi bagi pejabat publik. Keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagai pedoman perilaku dan instrumen kontrol sosial. Bahkan dalam perkembangannya etika semakin dibutuhkan untuk meringankan kerja hukum, yaitu untuk mencegah dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum.

Dari perspektif ini, penegakan etika, khususnya untuk kegiatan usaha perlu ada kejelasan. Karena tanpa adanya pelembagaan penegakan etika bisnis, hubungan dan tindakan perusahaan akan semakin kompleks tidak mungkin dapat dikontrol dari sisi etika.

Keberadaan lembaga penegak etika hanya akan efektif apabila putusannya dipatuhi. Karena itu, putusan lembaga penegak etika harus bersifat final dan mengikat. Putusan lembaga penegak etika bukan merupakan putusan tata usaha negara yang dapat diajukan upaya hukum. Putusan lembaga penegak etika juga berbeda dengan putusan pengadilan karena hanya dapat menjatuhkan sanksi maksimal pencabutan izin usaha.

Dari sisi hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis, seringkali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di kemudian hari. Kita ketahui bahwa budaya tiap bangsa dalam menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis.

Suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau

dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu pelaku bisnis harus memahami syarat-syarat sahnya suatu kontrak yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat di antara para pihak; kecakapan tertentu; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan dalam dunia bisnis adalah membuat beraneka ragam perjanjian (kontrak). Wahana yang lazim dipakai untuk berusaha adalah Firma, CV, maupun PT, pada dasarnya merupakan hasil dari adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Para pihak yang akan melakukan perjanjian juga harus memahami bahwa ada 3 asas perjanjian yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan “asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya”. Didalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari, ternyata dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik bekerjasama dengan pihak lokal atau melakukannya dengan pihak asing. Ada pula yang melakukan untuk pribadi, dan ada pula yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Bisnis menurut Abdurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Fuady (2002: 2) adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Orientasi atau motif dari suatu kegiatan bisnis ini menurut Friedman (Fuady, 2002 :2) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang ekonomi dalam rangka peningkatan taraf hidup melalui pendapatan keuntungan dari kegiatan ekonomi itu.

Di Indonesia, istilah “Hukum Bisnis” sejatinya tidak memiliki definisi yang lengkap. Namun apabila dilihat dengan istilah lain yakni “Hukum Dagang”, maka H. M. N. Purwosucipto memberikan definisi yakni hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Secara lebih komprehensif, Hukum Dagang dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur semua kegiatan di bidang perdagangan.

Aktivitas bisnis berada dalam wilayah hukum, dan sebagian orang berasumsi bahwa hukum hanya merupakan seperangkat aturan yang diterapkan dalam aktivitas bisnis. Mereka berasumsi, hanyalah hukum yang merupakan pedoman yang relevan bukan etika. Beberapa pandangan para

ahli tentang hubungan etika dan hukum. Ada yang berpendapat bahwa hukum dan etika merupakan dua wilayah yang berbeda. Hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat, dimana etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Hukum secara jelas didefinisikan seperangkat aturan yang mengikat yang diterapkan kepada setiap orang, sedangkan etika merupakan opini yang bersifat pribadi yang mengarahkan kehidupan kita sendiri. Sebagai bentuk dari kontrol sosial, hukum memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan etika. Hukum menyediakan aturan yang tepat dan terinci dibandingkan etika dan aparat penegak hukum tidak hanya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan kekuasaan dari pemerintah tetapi juga menginterpretasikan ketika kalimatnya tidak jelas.

Di negara dimana sistem hukumnya telah sangat maju, hukum merupakan aturan yang relatif lengkap untuk kegiatan bisnis. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan etika (*unethical*) adalah tidak sah (*illegal*). Sebaliknya di negara dimana sistem hukumnya belum begitu maju, etika merupakan sumber utama sebagai pedoman, bukan hukum. Etika diperlukan tidak hanya karena berbagai situasi yang tidak dicakup oleh hukum tetapi juga sebagai pedoman untuk menciptakan hukum yang baru. Dengan demikian hubungan antara etika dan hukum sesuai dengan motto sebagai berikut : “Jika sesuatu adalah legal, maka secara moral adalah legal” (*If it's legal, then it's morally okay*).

Penerapan dari etika bisnis pada transportasi *online* dapat memberikan sudut pandang baru bagi seluruh pihak yang terlibat. Sudut pandang tersebut adalah menilai sebuah etika, moral, bahkan hukum bukan sebagai sebuah batasan, melainkan sebagai aturan yang berusaha memberikan pengaturan akan ketertiban dalam penyelenggaraan bisnis transportasi *online*. Orientasi yang seharusnya ditanamkan adalah menjadikan norma etika dalam bisnis transportasi sebagai jembatan bagi para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan ditanamkannya etika bisnis, maka kasus-kasus penipuan pesanan transportasi *online*, pesan-pesan tidak patut yang dikirimkan dari *driver*/pengendara kepada *client*/pengguna aplikasi, atau bahkan bentrok antar penyedia aplikasi akan dengan konkret teratasi. Tinggal perlu ditinjau kembali bagianmana dari sektor ini yang seharusnya diatur dengan etika bisnis. Penulis berpendapat bahwa yang seharusnya dibenahi adalah 1.) Hubungan antara transportasi *online* dan transportasi *non-online*, 2.) Hubungan antar sesama transportasi *online*, dan 3.) Hubungan antara penyedia jasa transportasi *online* dengan pengguna jasa.

*Pertama*, hubungan antara transportasi *online* dengan transportasi *non-online* dapat dibina dengan keberadaan etika bisnis. Bahwa salah satu prinsip yang harus dijaga pelaku bisnis adalah prinsip saling menguntungkan. Jelas bahwa kehadiran transportasi *online* menjadikan persaingan semakin ketat di bidang transportasi. Namun tidak serta-merta hal ini hanya dapat dibiarkan, namun etika bisnis dapat memberikan koridor yang jelas. Dengan prinsip saling menguntungkan, transportasi *online* tidak perlu merebut pasar atau kawasan yang memang sejak dahulu menjadi pusat keramaian dan tempat transportasi *non-online* mencari penumpang. Di area-area tersebut secara ketat harus diperuntukkan hanya bagi para transportasi *non-online*. Di satu sisi, transportasi *non-online* wajib menyisihkan beberapa pusat keramaian bagi transportasi *online* untuk mencari penumpang. Dengan adanya solusi ini, maka kedua belah pihak diuntungkan secara finansial, maupun moral.

*Kedua*, hubungan antar sesama transportasi *online* dapat terjalin berdasarkan pada etika bisnis. Persaingan usaha yang ketat sejatinya tetap dapat menguntungkan semua pihak apabila masing-masing pihak mematuhi “etika bisnis”. Adapun yang cocok untuk digunakan sebagai etika bisnis tersebut adalah tidak menjadikan persaingan tarif yang tidak sehat dan menjadi *predator* bagi sesama transportasi *online*.

*Ketiga*, hubungan antara transportasi *online* dengan pengguna transportasi *online* dapat diatur dengan etika bisnis. Apabila etika bisnis benar-benar diterapkan, maka tidak ditemukan lagi adanya penipuan-penipuan berbasis bisnis transportasi *online*. Contoh konkretnya adalah pesanan-pesanan transportasi *online* palsu yang dilakukan oleh pengguna dan merugikan *driver* dari transportasi *online* tersebut. Etika bisnis dapat mencegah terjadinya praktik-praktik ini dan menjaga kepentingan bagi masing-masing pihak.

Oleh karena itu, pengaturan dan keberadaan etika bisnis dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan seputar bisnis transportasi *online* yang masih sulit untuk diatur saat ini. Etika bisnis dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan yang meliputi banyak aspek hubungan.

### Kesimpulan dan Saran

Etika bisnis yang diterapkan sebagai bagian dari hukum bisnis di bidang pengaturan penyedia jasa transportasi *online* dapat menjadi jalan keluar permasalahan yang timbul saat ini. Konkretisasi dari aturan tersebut di satu

sisi tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah, namun tidak semata-mata mengesampingkan pentingnya etika bisnis sebagai sarana pengaturan yang lengkap. Kelemahan dari etika bisnis adalah tidak mempunya etika bisnis untuk menjadi dasar untuk menghukum secara pidana atau perdata seorang pelanggar etika. Faktor tersebut tidak kemudian menyurutkan dampak pengaturannya yang berpotensi untuk menjadi efektif.

Saran dari penulis adalah dilakukannya penerapan etika bisnis sebagai aturan yang efektif berlaku bagi penyedia jasa transportasi *online*. Dengan penjabaran yang telah dilakukan di atas, maka dampaknya berpotensi besar untuk terwujud dengan nyata dan dengan efektif mampu menjaga kualitas dari penyedia jasa transportasi *online*. Yang paling penting adalah menjaga agar kepentingan ekonomis semua pihak dapat terjaga dan transportasi *online* menjadi jalan keluar dari buruknya sistem transportasi saat ini.

## Referensi

- Agoes, Cenik & Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat
- Baderi, Firdaus. (22/01/2016). Dimuat dalam Harian Ekonomi Neraca.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis, Edisi Keenam*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fuady, Munir. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Purwosucipto, H. M. N. (2000). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Djambatan: Jakarta
- Sardjono, Agus., et al. *Pengantar Hukum Dagang*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis. (1987). *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius: Yogyakarta.
- Sardi, M. (2004). *Hukum, Keadilan, dan Hak Azasi Manusia*. Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 12 Juli 2004.



## **Globalisasi Informasi dan Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

**Subkhan Rojuli**

**P4TK PKn dan IPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi mempermudah masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang bertentangan dengan moral dan etika dalam tatanan sosial masyarakat kita. Globalisasi informasi mengharuskan para remaja untuk pandai menyikapinya. Diperlukan etika sebagai kerangka konseptual untuk menerjemahkan apa yang dilihat agar dituangkan ke dalam sikap yang sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia. Kalau tidak demikian, sekarang ini kecenderungan kebebasan arus informasi mengarah kepada ditabraknya nilai-nilai moral. Memang tidak bisa dihindari dalam pergaulan selalu berinteraksi dengan individu lain, dengan anggota masyarakat lainnya, atau dengan lingkungannya sangat leluasa. Akan tetapi tidak berarti tidak ada batasan sama sekali, karena sekali saja seseorang melakukan kesalahan dengan menyinggung atau melanggar batasan hak-hak asasi seseorang lainnya, maka seseorang tersebut akan berhadapan dengan sanksi hukum. Sekolah sebagai tempat pembentukan karakter harus mentransfer anti virus yang kuat untuk menyaring berbagai informasi yang diserap oleh peserta didik.

Perkembangan teknologi informasi mempercepat transformasi sosial masyarakat. Disamping memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Perkembangan tersebut dapat mengarah perubahan masyarakat informasi yang beretika dan demokratis, atau pun sebaliknya. Perubahan yang tidak diantisipasi cenderung melahirkan pandangan atau pembentukan nilai baru yang bertentangan dengan nilai yang bersumber dari keagamaan yang selama ini terbukti menjadi sumber nilai yang memperkuat pertimbangan dasar seseorang dalam berperilaku sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat. Sementara, anak-anak pada tingkatan pendidikan dasar dan menengah masih rapuh landasan karakternya karena

masih mencari jati diri. Keadaan ini menjadi tantangan kita untuk memperkuat sistem sosial kita agar tidak muncul pola kehidupan yang kontra produktif dengan etika dengan mengembangkan pendidikan IPS di Indonesia.

Kondisi masyarakat sekarang sangat berbeda dengan kehidupan di masa lalu yang cenderung bersikap kaku dan tertutup karena kehidupan sehari-harinya sangat dibatasi oleh berbagai nilai normatif dan penuh dengan larangan. Anak-anak sekarang pun mempunyai sikap dan perilaku yang lebih bebas dan terbuka sebagai pengaruh berbagai informasi yang mereka dapatkan. Kurikulum pendidikan sekolah harus disusun dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kemajuan teknologi dan informasi dengan menerapkan unsur etika sebagai barometer anak dalam bertindak. Nilai-nilai etika menjadi batasan normatif yang harus dituangkan dalam pengintegrasian pembelajaran sosial. Jika peserta didik telah dibelajarkan tentang etika dalam kondisi riil, maka akan memperoleh pengalaman yang nyata sehingga saat terjun ke dalam masyarakat mereka akan tepat dalam bersikap. Nilai-nilai etika yang tertanam kuat dalam diri peserta didik akan mampu membentengi dirinya terhadap pengaruh negatif akibat globalisasi informasi. Etika dikembangkan dalam struktur kurikulum sekolah sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur seseorang dalam bertindak.

Dalam struktur kurikulum 2013 IPS SMP, nilai-nilai etik termuat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nilai-nilai religius tertuang juga dalam kompetensi inti. Tiap agama mempunyai suatu etik dalam ajaran-ajaran yang bisa digunakan untuk menanggulangi bahaya global (Sumartana, 1999). Tentu etik tersebut tidak memberikan solusi langsung bagi semua persoalan dunia yang luas ini, namun ia memberikan dasar moral bagi tatanan individu maupun global yang lebih baik. Adanya konsensus fundamental minimum berkaitan dengan nilai-nilai yang mengikat, standar-standar yang tidak bisa diganggu gugat, dan sikap moral fundamental. Terbentuknya tatanan global yang lebih baik adalah tanggung jawab semua orang.

IPS sebagai bagian terpadu yang merupakan saripati berbagai disiplin ilmu sosial dihadapkan pada tantangan pembaharuan untuk dapat mengimbangi tuntutan dan dinamika perubahan kehidupan sosial masyarakat (Suwarma, 2014). IPS dihadapkan pada kenyataan globalisasi informasi yang memungkinkan anak-anak sekolah memperoleh pendidikan

pada latar yang secara etik bisa bertentangan atau tidak sesuai dengan kepribadian dan moralitas bangsa serta sistem nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik harus dibekali kemampuan seleksi dan kebebasan dalam mengakses berbagai informasi. Dengan demikian, akan diperoleh transformasi sosial menuju masyarakat informasi yang beretika dan demokratis.

### **Tinjauan Pustaka**

Etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Fernanda, 2009:2). Etika dilatarbelakangi oleh nilai-nilai moral. Moral atau moralitas ini dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan. Tetapi antara moralitas dengan nilai-nilai etika dapat saja tidak sejalan atau bertentangan. Pembeneran seseorang akan sesuatu merujuk pada nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, etika suatu bangsa akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi secara konseptual, etika merupakan bagian dari disiplin ilmu filsafat yang berfokus pada nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh manusia beserta pembenerannya, termasuk nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Terbentuknya etika sebagai nilai-nilai filosofis yang berlaku dan diyakini dalam pergaulan hidup manusia dalam lingkungannya, secara umum dilandasi oleh prinsip-prinsip yang diarahkan untuk menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

Pengetahuan etika adalah pengakuan terfokus dan sangat sadar bahwa agensi moral mempengaruhi tindakan dan interaksi sehari-hari mereka, memaksa mereka senantiasa, dengan sengaja dan penuh perhatian, memastikan agar pengaruh-pengaruh tersebut dirasakan secara positif dalam arti moral dan etis (Nucci & Narvaes, 2016 : 875). Menurut Irmim dan Rochim (2004) etika merupakan sendi-sendi pergaulan yang menjadi kesan mendalam yang sulit dilupakan dan akan terus terpatri di benak seseorang yang merupakan dasar tata cara pergaulan yang meliputi : percaya diri, disiplin diri, mengucapkan salam, bersikap sopan santun dan ramah, perhatian, menjaga perasaan, toleransi, mampu mengendalikan diri, memakai pakaian dengan rapi, berbicara dengan tata bahasa yang baik dan simpatik, menghormati orang lain, berdiskusi yang sehat, menjaga sikap

tubuh, jujur, menepati janji, rasa tanggung jawab yang tinggi, sikap loyal, dan menganggap orang lain sebagai keluarga.

Etika menurut Suseno, dkk (1996) adalah pemikiran kritis normatif tentang moralitas, sedangkan etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup yang mencakup bidang atau segi sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, dan kritik terhadap ideologi-ideologi. Menurutnya, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum (prinsip dan moral), dan etika khusus (etika individual dan etika sosial).

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia dan warga bangsa (Fernanda, 2009 : 18). Untuk menumbuhkan etika tersebut memerlukan keteladanan para pemimpin bangsa yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang berpegang pada moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya (Suseno, 1994 : 13). Etika sebagai ilmu pengetahuan berarti penyelidikan mengenai tanggapan-tanggapan kesusilaan, sedangkan etika sebagai ajaran bersangkutan dengan membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan (Irmim dan Rochim, 2004 : 2).

Pengertian IPS di SMP adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi dan Ekonomi (Gunawan, 2013 : 48). Menurut Somantri (2001 : 92) bahwa pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu social dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan konsep IPS pada dasarnya merupakan satu konsep keterpaduan sebab IPS hakikatnya merupakan kajian yang diambil dari berbagai disiplin ilmu yang bertujuan agar siswa dapat menjadi warga Negara yang baik dan memiliki tanggung jawab dan dapat memiliki

kemampuan untuk mengambil keputusan bagi dirinya (Agus Mulyana dalam Somantri, dkk; 2010 : 112).

Pendidikan IPS bukan merupakan pendidikan disiplin ilmu tetapi adalah suatu kajian tentang masalah-masalah social yang dikemas sedemikian rupa dengan mempertimbangkan factor psikologis perkembangan peserta didik dan beban waktu kurikuler untuk program pendidikan, sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah sebuah program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, maupun ilmu pendidikan (Gunawan, 2013 : 113).

Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia sebagai makhluk social yang selalu hidup bersama dan dunianya (Gunawan, 2013 : 17). Menurut Ridwan Effendi dalam Somantri, dkk (2010 : 32) alasan mempelajari pendidikan IPS adalah membantu kita untuk memahami bagaimanapun hidup bersama dengan yang lain (seperti bertetangga dan berinteraksi dengan lingkungannya, meningkatkan kepedulian dengan masalah sekitar sehingga untuk memupuk nilai-nilai hidup bersama di atas diperlukan sarana, yaitu pelajaran IPS.

Pada kurikulum 2013 tujuan pembelajaran IPS (Widarwati dan Wijayati, 2016 : 9) yang sesuai dengan konsep etika adalah IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative social studies*, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu, sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan social dan alam; disamping itu, tujuan pendidikan IPS menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau *space* wilayah NKRI; dan tujuan pendidikan IPS menekankan pada *pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau space wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan cara studi literature lewat browsing internet dan referensi dari buku-buku untuk mempermudah dan mendukung bahan diskusi dan pembahasan. Peneliti melakukan analisis terhadap konten data dokumen yang berkaitan dengan

etika pada kurikulum IPS SMP, kemudian mengidentifikasi, dan menginterpretasikannya. Muatan kurikulum IPS SMP berisi seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial yang mencakup materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content analysis) kualitatif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: (a) penentuan fokus, (b) pengajuan pertanyaan penelitian, (c) pengumpulan data, (d) keabsahan data dan (e) penganalisaan, pembahasan, dan atau penginterpretasian data (Wiersma, 1991). Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, proses pengumpulan data, pengkodean data, penganalisisan data dan penginterpretasian data dilakukan sejak awal penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang menjadi instrumen penelitian itu adalah peneliti itu sendiri.

### **Pembahasan**

Pendidikan IPS pada jenjang SMP merupakan penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan, sedangkan menurut versi FPIPS dan jurusan Pendidikan IPS, merupakan seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang disajikan dan diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Berdasarkan hasil rumusan Forum Komunikasi II HISPISI tahun 1991 di Yogyakarta (Somantri, 2001:92).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengertian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, beretika, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Salah satu tujuan mata pelajaran IPS menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006, tujuan Mata Pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-

nilai sosial dan kemanusiaan. Sedangkan salah satu ruang lingkup mata pelajaran IPS menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 adalah sistem sosial dan budaya. Perubahan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia terus dilakukan dan pada kurikulum 2013 ini hanya dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dari kurikulum 2006. Pada kurikulum 2013, muatan etika tercermin dari kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS SMP yang Memuat Etika

KI Kelas VII dan VIII	KD Kelas VII dan VIII
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	Menunjukkan perilaku jujur, gotong royong, bertanggung jawab, toleran, dan percaya diri sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh sejarah pada masa lalu Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, terbuka, dan kritis terhadap permasalahan sosial sederhana Menunjukkan perilaku santun, peduli, dan menghargai perbedaan pendapat dalam interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya
KI Kelas IX	KD Kelas IX
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	Memiliki perilaku cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan rasa nasionalisme Menunjukkan kepedulian dan sikap kritis terhadap permasalahan sosial sederhana Memiliki rasa tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam mengembangkan pola hidup sehat,

	kelestarian lingkungan fisik, budaya, dan peninggalan berharga di masyarakat Menunjukkan perilaku santun, peduli, dan menghargai perbedaan pendapat dalam interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya
--	--

Sumber : Permendikbud No. 68 Tahun 2013

Tabel 1 di atas menunjukkan terdapat muatan etika sosial yang mencakup jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri. Kaitannya dengan globalisasi informasi diperlukan etika sosial untuk mengawal transformasi sosial agar sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa dengan sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi dan tanggung jawab terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan analisis, sikap kritis tersebut termuat pada kompetensi inti dan kompetensi dasar struktur kurikulum IPS SMP dalam bentuk kepedulian (toleransi, gotong royong) terhadap permasalahan sosial. Rasa tanggung jawab menghadapi transformasi sosial menuju masyarakat informasi yang beretika dan demokratis ditunjukkan oleh kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mengembangkan pola hidup sehat, menjaga kelestarian lingkungan fisik, budaya, dan peninggalan berharga dalam masyarakat.

Tuntutan globalisasi mengharuskan peserta didik mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif dengan tetap menjunjung budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah sebagai warisan leluhur yang membanggakan. Rasa cinta tanah air harus ditumbuhkan pada anak-anak agar kelestarian budaya, maupun peninggalan berharga tetap terjaga. Oleh karena itu, dibutuhkan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan, dan kreativitas budaya dari masyarakat.

Kejujuran menjadi modal dasar etika bagi peserta didik dalam kebebasan memilih berbagai informasi yang sesuai dengan martabat dan moral bangsa. Jadi ia jujur terhadap diri sendiri terhadap apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Artinya bahwa manusia jangan



pernah bertindak bertentangan dengan suara hatinya agar selalu sesuai dengan tanggung jawab yang sebenarnya. Etika erat kaitannya dengan kredibilitas dan citra diri. Kredibilitas berpangkal pada integritas. Integritas seseorang terlihat dari sikap dan kejujuran. Kejujuran merupakan sikap mental positif untuk menjaga kredibilitas atau citra diri. Kejujuran merupakan sendi utama dalam pergaulan yang harus dimiliki agar dapat diterima di segala lapisan masyarakat. Kejujuran harus ditumbuhkembangkan pada jiwa peserta didik agar lahir generasi bangsa yang beretika.

Kebebasan seseorang dalam memilih informasi dibatasi antara lain oleh etika yang berlaku di masyarakat. Kebebasan yang bertanggung jawab sebagai masyarakat, artinya bertindak sesuai dengan suara hatinya. Keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan informasi harus dilandasi tanggung jawab akan nilai-nilai kemanusiaan, terhadap tugas yang menjadi kewajiban, atau terhadap tanggung jawab akan sesuatu yang paling bernilai. Orang yang tidak mau tanggung jawab, berarti orang yang tidak peduli. Kepedulian sebagai bagian dari etika sosial memperkuat kelestarian nilai-nilai luhur bangsa. Toleransi dan gotong royong merupakan bentuk kepedulian sebagai warisan nilai-nilai luhur bangsa yang harus dipertahankan. Beragam teknologi canggih yang memanjakan justru memperlemah kepedulian dan membuat seseorang cenderung individualis, karena asyik menggunakannya. Sekolah sebagai tempat pembentukan karakter harus bisa membaca dan mengatasi fenomena transformasi sosial tersebut. Anak-anak harus dibelajarkan pada kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan gotong-royong, seperti memasukkan permainan-permainan tradisional yang bernuansa kebersamaan dalam kegiatan pembelajaran.

Kita adalah bangsa yang besar dan sejajar bangsa-bangsa lain. Generasi muda kita pun tidak kalah bersaing dengan negara lain. Etika bangsa yang berkarakter merupakan daya tawar kita dalam pergaulan bangsa sebagai modal kepercayaan diri. Negara kita lahir dari sejarah panjang yang penuh dengan pengalaman dalam mengatasi persoalan bangsa. Tantangan-tantangan dari kemajuan teknologi informasi dapat disikapi dengan etika bangsa. Kepercayaan diri sebagai bangsa tersebut sudah termuat pada struktur kurikulum IPS SMP.

Kita dianggap memiliki etika apabila kita mampu menunjukkan disiplin diri. Disiplin merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Disiplin harus menjadi kesadaran dalam melindungi nilai dan karakter bangsa dalam

percaturan global agar didapatkan transformasi sosial ke arah masyarakat yang beretika. Namun kenyataannya diberbagai aspek kehidupan yang terjadi pada anak-anak kita disiplin masih rendah. Anak sekolah dilarang merokok, tetapi setelah pulang sekolah didapati anak-anak merokok di pinggir jalan atau di tempat-tempat keramaian lain. Jam karet sudah membudaya, banyak anak-anak sekolah yang terlambat walaupun sudah berulang kali mendapat hukuman. Hal itu merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik untuk meningkatkan etika kedisiplinan peserta didik.

Interaksi dengan lingkungan dan masyarakat melalui komunikasi merupakan kebutuhan pokok manusia. Interaksi akan berjalan apabila kedua belah pihak saling toleransi dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Kita dinilai mempunyai etika dalam pergaulan apabila bersikap sopan santun dan ramah kepada orang lain. Perilaku seseorang akan berbeda-beda karena mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Demikian pula, aturan dan norma setiap bangsa. Arus informasi yang cepat, rentan akan pengaruh negatif yang menciptakan budaya baru yang tidak sesuai dengan aturan dan norma bangsa sendiri. Tetapi kita harus bersikap toleran dengan budaya asing sepanjang tidak melanggar untuk menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya. Diperlakukan dengan sikap santun merupakan kebutuhan seseorang akan kasih sayang melalui perhatian. Hal-hal yang nampaknya sepele itu ternyata membawa perubahan besar dalam pergaulan. Membelajarkan anak pada perilaku santun akan menciptakan tatanan menuju masyarakat yang berbudaya dan beretika.

Muatan kurikulum IPS SMP sudah mewadahi pembelajaran etika melalui pengalaman belajar aktif yang bermakna yang memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan etika dalam dunia nyata. Hal ini memerlukan tanggung jawab dan kerja sama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk membuat seting pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam seting sosial masyarakat yang sebenarnya. Menyikapi perubahan jaman akibat pengaruh globalisasi informasi menuntut keberanian sikap mempertahankan apa yang diyakini sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai ciri watak moral yang kuat. Oleh karena itu, perlu pembinaan atau pembelajaran etika yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tersebut akan efektif bila dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Praktik beretika harus ditumbuhkan dengan latihan

dengan keteladanan guru sebagai contohnya. Tujuan kurikulum hendaknya tidak hanya berorientasi pada capai pengetahuan tetapi juga keterampilan sosial, seperti bagaimana beretika.

## Penutup

Muatan kurikulum IPS SMP mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial yang mencakup materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, beretika, dan bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai. Muatan etika dalam kurikulum IPS SMP mencakup kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri. Kaitannya dengan globalisasi informasi diperlukan etika sosial untuk mengawal transformasi sosial agar sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa dengan sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi dan tanggung jawab terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan analisis, sikap kritis tersebut termuat pada kompetensi inti dan kompetensi dasar struktur kurikulum IPS SMP dalam bentuk kepedulian (toleransi, gotong royong) terhadap permasalahan sosial. Rasa tanggung jawab menghadapi transformasi sosial menuju masyarakat informasi yang beretika dan demokratis ditunjukkan oleh kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mengembangkan pola hidup sehat, menjaga kelestarian lingkungan fisik, budaya, dan peninggalan berharga dalam masyarakat. Kejujuran menjadi modal dasar etika bagi peserta didik dalam kebebasan memilih berbagai informasi yang sesuai dengan martabat dan moral bangsa.

Menyikapi perubahan jaman akibat pengaruh globalisasi informasi menuntut keberanian sikap mempertahankan apa yang diyakini sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai ciri watak moral yang kuat. Oleh karena itu, perlu pembinaan atau pembelajaran etika yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tersebut akan efektif bila dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Praktik beretika harus ditumbuhkan dengan latihan dengan keteladanan guru sebagai contohnya. Tujuan kurikulum hendaknya

tidak hanya berorientasi pada capai pengetahuan tetapi juga keterampilan sosial, seperti bagaimana beretika. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan dalam pengembangan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penguasaan pengetahuan umum, tetapi juga bermuatan etika. Perlunya penataan struktur kurikulum IPS SMP yang memuat durasi waktu yang tidak hanya mengacu pada tuntutan capaian kurikulum, tetapi juga tantangan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan beretika dalam menghadapi globalisasi informasi.

## Referensi

- Aryani, I. (2006). *Pendidikan Nilai dan Moral*. Purwakarta : Karya Swadaya Mandiri
- Fernanda, D. (2009). *Etika*. Jakarta : LAN
- Gunawan, R. (2013). *Pendidikan IPS*. Bandung : Alfabeta
- Irmin, S & Rochim, A. (2004). *Etika*. Jakarta : Batavia Press
- Nucci, L., P & Narvaez, D. (2016). *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*. Bandung : Nusa Media
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Tentang KD dan Struktur Kurikulum SD-MI
- Somantri, M.N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung : Rosda
- Somantri, M. N., dkk. (2010). *Inovasi Pembelajaran IPS*. Bandung : Rizqi Press
- Sumartana. (1999). *Etik Global*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suseno (1996). *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia
- Suseno. (1996). *Etika Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

- Suwarma, A. (2014). *Epistomologi Pendidikan IPS*. Bandung : Wahana Jaya Abadi
- Widarwati dan Wijayati, E. (2016). *Modul Pelatihan Guru Mata Pelajaran IPS SMP*. Batu : P4TK PKn IPS Dirjend GTK Kemendikbud
- Wiersma, William. (1991). *Research Methods in Education : An Introduction*. Boston : Allyn and Bacon
- Yulianita, N. (2002). *Implementasi Etika di Era Global*. Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, 18(4) : 457-473



# **Peran Lembaga Praperadilan Dengan Konsep Hakim Komisaris Dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka Pada Proses Upaya Paksa (*Dwang-Middelen*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

**Seno Wibowo Gumbira**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka**

## **PENDAHULUAN**

Sistem hukum yang terdapat pada seluruh negara-negara di dunia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan berbagai faktor baik dari pengeruh segi politik, sosiologis, kultur dan bahkan karena proses lahirnya negara yang bersangkutan, serta perkembangan dan perubahan yang terjadi pada negara yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang mana sistem hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental hal tersebut dikarenakan Indonesia pernah menjadi bangsa yang dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda selama kurang lebih dari hampir tiga setengah abad lamanya, dan hal ini juga secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi sistem hukum bangsa Indonesia.

Sistem hukum negara kita Indonesia jika kita melihat secara relitasnya pada saat ini telah mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan yang secara signifikan. Menurut Achmad Ali, Realitas hukum kita di Indonesia, memberlakukan (1) Perundang-undangan, (ciri Eropa Kontinental), (2) Hukum adat (ciri Costomary Law) (3) Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia (Ciri Musilm Law Sistem), dan (4) Hakim Indonesia dalam praktik mengikuti “yurisprudensi” (yang merupakan ciri Common Law, dengan asasnya ‘*stare decisis*’). Itulah argumen sehingga

pakar modern memasukan Indonesia kedalam “*Mix Legal System*”, dan memang itulah yang tepat<sup>24</sup>.

Perkembangan dan perubahan pada sistem hukum Indonesia yang terjadi juga mempengaruhi sistem peradilan pidana. Tujuan peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses pemeriksaan yang demikian tersebut di Indonesia diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan diperadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana yang tertuang dalam KUHAP, telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *Due Process Model*, sebab model ini menawarkan procedural yang ketat, yang didukung oleh sikap batin (penegak hukum) untuk menghormati hak-hak warganya. Namun dalam kenyataanya, formulasi aturan model yang demikian itu biasanya tidak memperhatikan hubungan yang signifikan terhadap komitmen dalam praktik, yaitu menyangkut persoalan substantif yang sering dikesampingkan, yang pada akhirnya muncul prosedur formal semata.

Sehubungan dengan ini, sitem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menggunakan “*due process model*”. Marc Weber Tobias mengatakan bahwa “*due process model of law is the frame work upon which the system of ordered justice is build...*” Artinya, *due process of law* itu adalah kerangka kerja untuk memastikan bahwa keadilan akan tercapai dalam suatu sistem peradilan pidana. Sejalan dengan pilihan bentuk pemerintahan demokrasi dan rule of law. Pengaruh konsep dan prinsip Hak Asasi Manusia terhadap hukum utamanya sistem peradilan pidana tidak bisa dihindarkan<sup>25</sup>. Pengaruh ini tengah dimulai dari waktu yang cukup lama sampai dengan hari ini. Pengaruh ini juga berakibat antara lain pada batas-batas yuridiksi suatu negara bisa menjadi relatif, karena Hak asasi Manusia sifatnya universal. Sebagai contoh dikemukakan julukan master piece pada hukum acara pidana Indonesia ketika saja baru diundangkanadalah karena di dalamnya banyak termuat konsep dan subtansi Hak Asasi Manusia.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 2009, Kencana, Jakarta, Hal. 499.

<sup>25</sup> Marc weber Tobias R David Peterson, pre-trial criminal procedure,a survey of constitutional right. Charles.



Bahkan secara resmi pada pengakuan ini diberikan khususnya karena termuatnya konsep-konsep dari “*The International Bill of Human Right*”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana termaktub sepuluh asas kesemuanya merupakan ketentuan Hak Asasi Manusia. Sebutlah seperti *habean corpus*, *the right to Silence*, prinsip *nonself merimination*, pembatasan waktu penangkapan dan penahanan, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi dan miranda warning. Singkatnya secara substansial hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terjadi osmose sehingga statusnya sebagai hukum positif. Oleh karena itu, bukan hanya *spirit of law* dari konsep Hak Asasi Manusia itu saja, sesungguhnya yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetapi konsep dan subtransi itu juga sudah melebur tanpa proses transplantasi hukum secara resmi untuk menjadi bagian dari kaedah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>26</sup>. Akan tetapi pada tahap pelaksanaannya masih jauh dari tujuan KUHAP itu sendiri, sebagaimana kita ketahui tujuan KUHAP yakni mencari dan atau mendekati kebenaran materiil<sup>27</sup>, serta melindungi harkat dan martabat manusia khususnya tersangka atau terdakwa yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Contoh kongkritnya adalah masih banyaknya pelaksanaan upaya paksa yang disertai kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum khususnya pada tahap penyidikan, hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya kasus pada kasus Sengkon dan Karta, Kasus kematian Sudarto dalam tahanan Polres Jakarta Utara<sup>28</sup>, Penyiksaan Leonardus Lasaruddun di tingkat penyidikan, dan terakhir kasus Asrori di Jombang.

Salah satu instrumen pada proses pengawasan horizontal pada sistem peradilan khususnya di Indonesia guna tegaknya hukum dan perlindungan Hak Asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan yakni praperadilan<sup>29</sup>. Sejak awal implementasi berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, lembaga praperadilan ternyata lahir tidak sesuai dengan ide awal kehendak adanya lembaga ini sebagai proteksi terhadap penyimpangan upaya paksa dalam arti luas (*dwang-middelen*) dari

---

<sup>26</sup> Luhut Pangribuan. *Lay Judge Dan Hakim Ad hoc suatu stidu teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia*. UI Press dan Papis sinar sinanti. 2009. Hal 56.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2005, Hal 7

<sup>28</sup> Oc Kaligis, *Praktik praperadilan dari waktu ke waktu*, Jakarta. 2000. Hal 109-110

<sup>29</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan siding pengadilan, banding, Kasasi dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal 3

aparatur penegak hukum, sekaligus nyatanya tidak sesuai dengan kehendak maksud adanya perlindungan hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembaharuan terhadap UU No. 8 Tahun 1981 adalah sebagai bentuk responsitas yang wajar saja mengingat pengalaman empiris terhadap implementasi KUHAP ini di temukan segala kekurangan dan kelemahan selain memang harus diakui adanya sesuatu terobosan yang di introdusir KUHAP, seperti misalnya asas *Non-Self Incrimination*, *Presumption Of Innocence*, *Verschongsrech* dan lain-lain<sup>30</sup>.

Salah satu kekurangan dan kelemahan yang substansiel adalah keberadaan lembaga praperadilan yang ternyata dianggap tidak sesuai atau menyimpang dari konsep awalnya, yaitu sebagai lembaga yang representasi terhadap perlindungan Hak asasi manusia, khususnya pada kedudukan tersangka dalam proses penyidika terdakwa pada proses penuntutan. Dan disinilah yang menjadi bagian pada makalah ini ingin memperbandingkan perspektif praperadilan dengan konsep hakim komisaris yang terdapat pada RUU KUHAP yang mana diharapkan efektif dalam menjamin dan menegakan hak asasi justiabelen (pencari keadilan). Dengan demikian, tulisan ini akan mefokuskan pada peran lembaga praperadilan dengan konsep hakim komisaris dalam dalam melindungi hak asasi tersangka pada proses upaya paksa (*dwang-middelen*) dalam sistem peradilan pidana indonesia.

### **Praperadilan dengan Konsep Hakim Komisaris**

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habean Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habean Corpus act* memberikan hak kepada seseorang untuk melaui surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal itu untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM<sup>31</sup>.

Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus:

---

<sup>30</sup> Omar Seno adji dan Indriayanto Omar Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Diadit Media. 2007. Hal.174

<sup>31</sup> Lobby Luqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, Hal 54

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP. Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Namun sampai saat ini belum terdengar Kejaksaan mempraperadilankan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya tidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum di atas. Berdasarkan pasal 80 terlihat bahwa peluang tersebut diberikan dengan masuknya “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan di atas. Menurut Darwan Prinst yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah<sup>32</sup>:

- a. Tersangka/terdakwa
- b. Keluarga dari tersangka/terdakwa
- c. Kuasa dari tersangka/terdakwa
- d. Pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.

---

<sup>32</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan, 1984, hal. 193.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar pengajuan permohonan itu sendiri. Pemeriksaan Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang Panitera. Jangka waktu Pemeriksaan praperadilan paling lambat dalam waktu 7 hari. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk itu Penyidik atau Penuntut Umum dapat memintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (Pasal 82 ayat (2) KUHP).

Sekalipun lembaga praperadilan adalah alat kontrol bagi penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, tetapi dalam praktik ternyata bahwa putusan hakim praperadilan adalah putusan yang bersifat deklaratoir, misalnya, menyatakan bahwa penghentian penuntutan oleh penuntut umum adalah tidak sah dan memerintahkan kejaksan untuk meneruskan penuntutan. Putusan seperti ini tidak bersifat eksekutorial dan tidak mengandung sanksi. Contohnya adalah putusan praperadilan yang dimohonkan oleh Haryono Winarta terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Karen apenghentian penuntutan Kejaksaan ternyata tidak meneruskan penuntutan tersebut, sekalipun oleh hakim dinyatakan bahwa penghentian penuntutan tersebut tidak sah. Kesulitan eksekusi dalam perkara ini dapat dipahami karena fungsi kejaksan menurut pasal 270 KUHP adalah pelaksana putusan peradilan (eksekutor). Tanpa ada *political will* dari kejaksan sendiri untuk menaati putusan praperadilan tersebut, putusan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan, sebab tidak ada lembaga yang mempunyai wewenang untuk memaksa kejaksan untuk melaksanakan putusan tersebut<sup>33</sup>.

Kondisi seperti ini akan sangat merugikan saksi pelapor /penggugat. Karena berbeda dengan praperadilan yang diajukan kepada penyidik/polisi mengenai penangkapan atau penahanan yang sah, dimana pihak ketiga yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kebebasannya yang dirampas secara tidak sah; pada gugatan praperadilan yang ditujukan terhadap penghentian

---

<sup>33</sup> OC Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Alumni Bandung. 2003. Hal. 336

penuntutan, tujuan atau maksud saksi pelapor/pemohon bukanlah untuk meminta ganti rugi, tetapi untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya<sup>34</sup>.

Dalam Rancangan Undang-Undang (revisi) KUHAP yang diajukan oleh Departemen kehakiman, lembaga praperadilan telah dihilangkan dan perannya digantikan oleh Hakim Komisaris. Meskipun hamper semua wewenang lembaga praperadilan dialihkan kepada Hakim Komisaris, putusannya hanya merupakan penetapan (tidak punya kekuatan eksekutorial).

Menurut Oemar Seno Adji bahwa hakim komisaris ii adalah yang memimpin pemeriksaan pendahuluan tetapi tidak melakukan sendiri pemeriksaan itu, Hakim Komisaris menangani bagaiman upaya-paksa dilaksanakan. Dengan demikian hakim komisaris dengan fungsi jaksa dalam hubungannya pengawasan jaksa terhadap polisi menurut hukum acara pidana dahulu yang lengkapnya sebagai berikut :

Lembaga "*rechter commisaris*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai perwujudan dari keaktifan hakim, yang di Eropa tengah memberikan "*rechter commisaris*" suatu posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya jaksa "*dwang middelen*", penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. Jadi dapat dikatakan bahwa "*rechter commisaris*" dalam tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pejabat penegak hukum yang paling dekat dengan jaksa, yang di dalam hukum Eropa kontinental merupakan pusat daripada proses penyelidikan perkara pidana<sup>35</sup>.

Jabatan "*rechter commisaris*" yang di Indonesia sebelumnya di hukum acara pidana diterapkan terhadap golongan Eropa, bilamana dimasukkan dalam hukum acara pidana yang akan datang akan ditempatkan disamping kejaksaan.

Tetapi, tanpa mencampuri wewenang dari jaksa dengan tidak melakukan sendiri pemeriksaan pendahuluan itu maka parallel dengan wewenang jaksa untuk mengawasi dan mengkoordinasikan polisi maka "*rechter commisaris*" mempunyai wewewngang untuk mengawasi pelaksanaan upaya-upaya paksa dari kejaksaan dan polisi.

Menurut Loebby Loqman, wewenang Hakim Komisaris adalah :

---

<sup>34</sup> Ibid. Hal.367

<sup>35</sup> Luhut Pangribuan. Opcit. Hal. 166

- a. Melakukan pengawasan apakah upaya paksa dilaksanakan sesuai dengan ataupun bertentangan dengan hukum.
- b. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa wewenang antara polisi dan jaksa.
- c. Bertindak secara eksekutif antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa; dan jaksa; dan
- d. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan.

Di sini, Hakim Komisaris berwenang selaku *examining judge* (pelaksana pengawasan upaya paksa oleh penyidik) maupun *investigating judge* (penangkapan, penahanan, penggeledahan badan dan pemeriksaan surat atas permintaan penyidik maupun menentukan penyidik mana yang paling berwenang untuk melakukan penyidikan), sehingga lembaga ini sangat dibutuhkan pada proses yang disebut sebagai *initial phase investigation* (tahap awal penyidikan) di mana seringkali ditemukan pelanggaran hak asasi tersangka<sup>36</sup>. Contohnya dalam kasus kematian Ali Harta Winata pada tanggal 17 November 2002 yang disidik oleh Polres Bekasi. Tanpa adanya bukti yang cukup, Budi dinyatakan sebagai tersangka atas pembunuhan ayahnya tersebut. Selain itu, Budi juga mengalami penyiksaan fisik dan mental sewaktu berada dalam penahanan Polres Bekasi. Dalam penyidikan, Budi Harjono diaksa mengakui semua cerita versi penyidik demi menjaga keselamatan ibunya yang diancam akan dibunuh oleh penyidik.

Sebelum disidangkan, Budi Harjono harus mengalami masa penahanan selama 6 bulan di pemasyrakatan Bulak Kapal, Bekasi pada pertengahan 2002. Di dalam persidangan karena tidak cukup bukti, Budi Harjono dibebaskan dari segala tuduhan, tetapi stigma sebagai pembunuh sulit dihilangkan.

Kebenaran akan pembunuh sebenarnya baru terungkap pada tanggal 27 juni 2006 ketika Marsin, mantan pekerja bangunan di rumah keluarga Alm. Ali Harta Winata mengaku sebagai pembunuh Ali Harta Winata<sup>37</sup>. Kasus ini merupakan preseden buruk bagi subsistem peradilan pidana di Indonesia dan makin memantapkan pentingnya konsep hakim investigasi di Indonesia.

---

<sup>36</sup> Omar Seno adjii dan Indriayanto Omar Seno Adjii, *Peradilan Bebas Dan Contempt Of Court*. Opcit. Hal.136

<sup>37</sup> Kompas. *Manipulasi Penyidikan*. Pada Tanggal 6 Juli 2006. Hal 25

Dengan adanya Hakim Investigasi, penyidik yang melampaui wewenangnyanya dengan menggunakan siksaan fisik dan mental demi mendapatkan keterangan yang sangat melanggar hak asasi tersangka dapat diberikan sanksi agar pejabat penegak hukum tersebut mendapat efek jera dan tidak mengulangi tindakan tersebut.

Jika dibandingkan dengan forum praperadilan saat ini penyidik atau penuntut umum harus membuktikan bahwa ia telah menjalankan penyidikan upaya paksa hanya dengan memenuhi syarat formil belaka. Yang mana sifat pengujiannya bersifat administrasi. Hal tersebutlah yang menjadi kelemahan proses praperadilan yang mengabaikan pengujian substansi dan putusan praperadilan tersebut deklaratoir (putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum), tidak bersifat kondemnatoir (putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi/putusan yang sifatnya mewajibkan untuk dilaksanakan). Aspek inilah hal yang menjadi perbedaan kedua hal tersebut.

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis berikan secara limitatif ini merupakan eksplanasi terhadap kehendak adanya suatu lembaga Hakim Komisaris yang memiliki eksistensi sebagai representasi perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya tersangka/terdakwa,

Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, dalam kaitannya dengan “*dwang middelen*” (upaya paksa), kewenangan lembaga praperadilan bersifat limitative (sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan), karenanya tidak teramsuk upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, penggeledahan, pula penahanan yang berkaitan dengan penyiksaan dan kekerasan sebagai bentuk responsitas ratifikasi terhadap *Convention Against Torture* tersebut. Kesulitan memberikan pedoman untuk menentukan persyaratan objektif penahanan karena pencari keadilan dengan penegak hukum memiliki persepsi yang differensial mengenai syarat penangkapan tersebut. Sifat limitative ini menunjukkan bahwa lembaga praperadilan hanya memiliki wewenang sebagai *examining judge* bukan sebagai *investigating judge*. Maka fungsi lembaga praperadilan dianggap tidak berhasil meletakkan posisinya sebagai lembaga presentasi yang melindungi hak asasi manusia secara komprehensif. Bahkan sering dikatakan bersifat diskriminatif terhadap masyarakat yang tidak eksistensi terhadap permasalahan materil,

artinya lembaga pra peradilan masih berpihak kepada status sosial yang memiliki pranata status atas dan sifat dari putusan praperadilan bersifat deklaratoir semata.

Sebagai rekomendasi diharapkan segera merevisi KUHAP dan mensahkan RCUHAP dengan memasukkan peraturan mengenai hakim komisaris dan semua wewenangnya dan menghapus lembaga praperadilan. Melalui hakim komisaris dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenangan para aparaturnegak hukum sehingga dapat menjamin hak asasi tersangka dan terdakwa, selain itu diikuti dan disesuaikan dengan Undang-Undang subsistem peradilan pidana di Indonesia guna menciptakan dan mencapai sistem peradilan pidana yang terpadu.



## Referensi

- Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana. Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta
- Prinst, Darwan. (1984). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. PT. Djambatan. Jakarta
- Luqman, Lobby. (1982). Praperadilan di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Pangribuan, Luhut. (2009). Lay Judge Dan Hakim Ad hoc suatu stidu teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia. UI Press dan Papas sinar sinanti. Jakarta
- David Peterson, Marc weber Tobias R, pre-trial criminal procedure,a survey of constitutional right. Charles.
- Kaligis, OC. (2007). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. Alumni. Bandung
- Harahap, Yahya. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan siding pengadilan, banding, Kasasi dan peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kompas. Manipulasi Penyidikan. Pada Tanggal 6 Juli 2006



## Profil Penulis



**Muhammad Husni Arifin** adalah dosen tetap pada Program Studi Sosiologi Universitas Terbuka. Saat ini, Arifin juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial, Hukum dan Humaniora pada FHSIP Universitas Terbuka. Lulusan S3 dari University of Southampton UK ini menekuni kajian di bidang sosiologi pendidikan, *open and distance learning*, *open educational resources*, dan analisis kebijakan sosial. Email: [mhusni@ecampus.ut.ac.id](mailto:mhusni@ecampus.ut.ac.id)



**I Wayan Gde Wiryawan** adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan bidang akademik FH Unmas. Lulusan Doktor dari Universitas Brawijaya ini berminat dalam kajian law & tourism dan sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah, salah satunya adalah “The Role of the Customary Village in Cultural Tourism with Environmental Vision (case Study on the Development of Tourism Village in Bongkasa Pertiwi Village, Badung Regency-Bali) dalam Buku Sustainable Tourism and Law. The Hague: Eleven International Publishing”. Email: [wiryawan1976@gmail.com](mailto:wiryawan1976@gmail.com).



**Dedy Hermawan** dilahirkan di Bandar Lampung pada 20 Juli 1975. Pendidikan Sarjana ditempuh di Universitas Lampung dari tahun 1996-2001, selanjutnya meneruskan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000-2003 dan terakhir melanjutkan pendidikan pada Program Doktor di Universitas Brawijaya pada tahun 2008-2012. Pada tahun 2003 beliau diangkat sebagai Dosen tetap pada Jurusan

Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lampung pada tahun 2011-2013 dan sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila pada tahun 2013-2017. Saat ini, beliau tercatat sudah menghasilkan penelitian kompetitif tingkat nasional dan regional, selain itu juga menulis pada beberapa Jurnal Ilmiah dan media cetak populer. Email: [dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id](mailto:dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id).



**Simon Sumanjoyo Hutagalung** dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 1981. Pendidikan sarjana ditempuh pada Jurusan Administrasi Negara FISIP Unila pada tahun 1999-2004, selanjutnya meneruskan pendidikan pada program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM Yogyakarta pada tahun 2008-2010. Beliau menjadi dosen tetap pada Jurusan Administrasi Negara sejak tahun 2005 hingga sekarang dan pada tahun 2013-2017 menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Beliau tercatat sudah menghasilkan berbagai judul penelitian kompetitif tingkat nasional dan regional, serta menghasilkan beberapa artikel ilmiah pada jurnal nasional dan artikel populer pada media cetak lokal dan nasional. Email: [simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id](mailto:simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id)



**Nurma Khusna Khanifa** adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo Jawa Tengah. Lulusan Magister Hukum Bisnis Syariah dari UIN Sunan Kalijaga ini aktif menulis di berbagai media dan jurnal ilmiah. Selain menulis, Nurma juga aktif di lembaga bantuan hukum buruh migran Kab. Wonosobo. Nurma juga pernah memenangkan (Juara III) lomba bisnis plan tingkat III Kab. Wonosobo. Email: [nurmakhusna@unsiq.ac.id](mailto:nurmakhusna@unsiq.ac.id)



**Susanti** adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka. Susanti menekuni bidang ilmu pemerintahan dan politik (lokal) di Indonesia. Gelar magister ilmu politik disandanginya dari Universitas Indonesia tahun 2003, dan saat ini sedang menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Email: [susanti@ecampus.ut.ac.id](mailto:susanti@ecampus.ut.ac.id)



**Sri Suharmini Wahyuningsih**, lahir di Solo Jawa Tengah. Saat ini, Sri Suharmini adalah dosen tetap pada Program Studi Peprustakaan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Lulusan Magister Humaniora Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia ini menekuni bidang kajian perpustakaan dan informasi, serta pendidikan jarak jauh. Email: [minuk@ecampus.ut.ac.id](mailto:minuk@ecampus.ut.ac.id).



**Ace Sriati Rachman** adalah dosen tetap pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (FHISIP) Universitas Terbuka. Ace memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia pada 2004. Bidang kajian yang ditekuni saat ini adalah manajemen media massa, komunikasi antar budaya, dan komunikasi inovasi. Email: [acesr@ut.ac.id](mailto:acesr@ut.ac.id)



**Pranajaya** adalah dosen dan peneliti pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Pranajaya memperoleh Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari Universitas Indonesia. Minat kajian meliputi literasi informasi, sistem informasi, dan manajemen perpustakaan. Email: [pranajaya@yarsi.ac.id](mailto:pranajaya@yarsi.ac.id)



**Ika Atikah** adalah dosen pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Lahir di Tangerang pada 16 Mei 1987, Atikah berhasil memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bidang kajian yang diminati meliputi hukum bisnis, hukum perbankan, sosiologi hukum. Atikah juga aktif sebagai penulis buku dan jurnal ilmiah. Buku yang telah dipublikasikan antara lain aspek hukum dalam ekonomi dan hukum acara peradilan agama. Email:

[ika.atikah@uinbanten.ac.id](mailto:ika.atikah@uinbanten.ac.id)



**Syihaabul Hudaa** adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta. Selain mengajar di STIE Ahmad Dahlan, penulis juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Akper/Akbid YPDR. Lulusan Magister dari UNJ ini juga aktif menulis karya sastra, salah satunya novel penulis yang terbit tahun ini dengan judul Saleh. Selain novel, penulis juga aktif menulis puisi, dan cerpen yang akan diterbitkan tahun 2018 mendatang. Email:

[hudaasyihaabul@gmail.com](mailto:hudaasyihaabul@gmail.com)



**Sri Sedyaningsih** atau yang dikenal dengan nama panggilan akrabnya Dian Budiargo, adalah Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. Selain bergelut di ranah pendidikan tinggi jarak jauh, dunia Public Relations kini menjadi bagian dari tugasnya di Universitas Terbuka. Selain itu, lulusan S3 Universitas Indonesia ini juga fasilitator di berbagai pelatihan, khususnya dalam bidang komunikasi interpersonal, desain instruksional, public speaking, dan pengembangan kepribadian. Meskipun begitu, Dian Budiargo juga aktif sebagai penulis, publikasi buku yang ditulisnya berjudul “Berkomunikasi Ala Net Generation”. Email: [dianb@ecampus.ut.ac.id](mailto:dianb@ecampus.ut.ac.id)



**Purwaningdyah Murti Wahyuni** adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Lulus S1 dan S2 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada (UGM) dengan kekhususan Hukum Bisnis. Bidang kajian yang diminati saat ini adalah hukum agraria dan hukum bisnis. Beberapa artikel yang sudah dimuat dalam jurnal, antara lain: Reklamasi Pantai dalam Hubungannya dengan Pendaftaran Tanah Studi Kasus di Pantai Utara Jakarta, Perubahan Hak Guna Bangunan ke Hak Milik untuk rumah yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah, Kesadaran dan Kesenjangan Hukum bagi Semua Warga Negara. Email: [purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id](mailto:purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id).



**Subkhan Rojuli** adalah seorang widyaiswara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) PKn dan IPS, Kemendikbud. Lahir di Kebumen, 30 April 1980. S-1 Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten lulus tahun 2005. S-2 Pendidikan IPS Universitas Indraprasta PGRI Jakarta lulus tahun

---

2013. S-3 Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung lulus tahun 2017. Email: subkhan\_rojuli@student.upi.edu